



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA GUNAWAN, S.Sos;**  
Tempat lahir : Perigi Raja (Indra Giri Hilir Prov. Riau);  
Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun / 21 Agustus 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Teluk Air, Rt. 006.001, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Pemda Kabupaten Karimun);

Terdakwa telah ditahan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018 ;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Halaman 1 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Mahkamah Agung RI I (Pertama), sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan 8 April 2019;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Februari 2019 Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk :PDS -03/TBK/Ft.1/05/2018 tanggal 17 Mei 2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : KPTS.01/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 terdakwa bertindak sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 15 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 37 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 52 Tahun 2016 tanggal

Halaman 2 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2016 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 bersama-sama dengan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 (dalam penuntutan terpisah), maupun bertindak sendiri-sendiri pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 1.13.01.15.09.5 tanggal 06 Januari 2014 mendapatkan alokasi dana belanja sejumlah Rp. 5.931.008.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah) yang kemudian pada tanggal 01 September 2014 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 yang merubah jumlah alokasi belanja yang semula Rp. 5.931.008.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah) menjadi Rp.7.352.075.076,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian perubahan belanja sebagai berikut:

No.	Uraian Alokasi Belanja	DPA 2014 (Rp)	DPPA 2014 (Perubahan)
Belanja Tidak Langsung:			
1.	Belanja Pegawai	2.163.422.750,-	2.469.489.826,-

Halaman 3 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Belanja Tidak Langsung		2.163.422.750,-	2.469.489.826,-
Belanja Langsung :			
1.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	922.400.000,-	1.322.400.000,-
2.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,-	80.000.000,-
3.	Sosialisasi dan Bimtek Reguler Service Provider UPPKH Kabupaten Karimun	0,-	75.000.000,-
4.	Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)	0,-	100.000.000,-
5.	Penyusunan LAKIP	15.000.000,-	15.000.000,-
6.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak huni dan KUBE	425.000.000,-	425.000.000,-
7.	Verifikasi dan Penetapan Penerima Hibah Pembangunan / Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS TA 2015	200.000.000,-	200.000.000,-
8.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Money) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Sosialisasi Terhadap Penerima RTLH)	75.000.000,-	150.000.000,-
9.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Insentif Pendamping RTLH)	70.000.000,-	70.000.000,-
10.	Fasilitasi Monitoring	75.000.000,-	75.000.000,-

Halaman 4 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping Kube)		
11.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap Pendamping Kube)	70.000.000,-	70.000.000,-
12.	Dukungan Operasional Pembangunan Rumah Suku Duane Kecamatan Kundur	0,-	150.000.000,-
13.	Pelayanan Sosial dan Perlindungan Orang dengan Kecacatan	76.000.000,-	206.000.000,-
14.	Pembinaan Anak jalanan (Sharing dengan Provinsi Kepri)	93.000.000,-	93.000.000,-
15.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Perlindungan Sosial Anak	125.000.000,-	125.000.000,-
16.	Pelayanan dan Rehabilitasi perlindungan Sosial Anak	51.000.000,-	51.000.000,-
17.	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	26.000.000,-	26.000.000,-
18.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan	25.000.000,-	25.000.000,-
19.	Bantuan Ibu Hamil Rawan Sosial	100.000.000,-	100.000.000,-
20.	Bimbingan Teknis	120.000.000,-	120.000.000,-

Halaman 5 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Peningkatan Kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Kecamatan Se-Kabupaten Karimun		
21.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	100.000.000,-	100.000.000,-
22.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karimun	300.000.000,-	300.000.000,-
23.	Penyusunan Renja	15.000.000,-	15.000.000,-
24.	Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran	25.000.000,-	25.000.000,-
25.	Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum dan Taman Makam Pahlawan	150.000.000,-	150.000.000,-
26.	Pengadaan Sarana Keranda (Asongan) Jenazah untuk Masyarakat (Dana Community Development)	50.000.000,-	170.000.000,-
27.	Pembinaan Kapasitas Lembaga Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat	120.130.250,-	120.130.250,-
28.	Bantuan Perlengkapan Anak sekolah RTSM	150.000.000,-	150.000.000,-
29.	Dukungan Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam/ Sosial	100.000.00,-	140.000.000,-
30.	Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH Kabupaten Karimun	179.055.000,-	204.055.000,-
31.	Tanggap Darurat Jenazah Terlantar	50.000.000,-	50.000.000,-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2)		3.667.685.250,-	4.882.585.250,-
JUMLAH BELANJA (1)+(2)		5.931.008.000,-	7.352.075.076,-

Halaman 6 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 15 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang / Jasa Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang menetapkan antara lain:

No	Nama	Jabatan
	H. INDRA GUNAWAN, S. SOS	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang / Jasa
	ARDIYANSAH	Bendahara Pengeluaran
	EFFY YANTI, S.SOS	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen)
	ISKANDAR ZULKARNAIN	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Pembukuan)
	ETI MARIATI	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Daftar Gaji)

- Bahwa tugas terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dalam pengelolaan anggaran kegiatan pada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun berdasarkan Pasal 10 Permendagri No.13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 Ayat (3) huruf "c" mempunyai tugas:

- Menyusun RKA-SKPD.
- Menyusun DPA-SKPD.
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan.
- Menandatangani SPM.
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.

Halaman 7 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- Mengawasi pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

➤ Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN
1	Hj.Mitrayati,S. Sos	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor
2	Hj. Jesmiwati	Kegiatan Penyusunan LAKIP Kegiatan Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 3. Kegiatan Penyusunan RENJA
3	Dudy Isnandar, SE, MM	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dan kube Kegiatan verifikasi dan penetapan penerima hibah pembangunan/rehabilitasi RTLH dan kube PMKS tahun anggaran 2015
4	Prihandayani Bayusari,SE, AK	Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (monev) rehab rumah tidak layak Huni (RTLH) insentif pedamping RTLH). Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (monev) rehab rumah tidak layak Huni (RTLH) sosialisasi terhadap penerima RTLH)
5	Mohammad	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Halaman 8 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR





	Amin, S.TIS	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) kelompok usaha bersama kube insentif pendamping kube Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (monev) rehab rumah tidak layak Huni (RTLHO sosialisasi terhadap pendamping kube Kegiatan pembinaan kapasitas lembaga tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.
6	Hj. Darlisma, S.Sos	Kegiatan Pelayanan Sosial dan perlindungan Orang dengan Kecacatan (ODK)
7	Rita Agustina, ST, MM	Pembinaan anak jalanan (sharing dengan Provinsi Kep. Riau) Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan kesejahteraan sosial kabupaten karimun Kegiatan sosialisasi dan publikasi kegiatan SKPD melalui pameran dan pawai pembangunan
8	Nazirah, S. Psi	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan Sosial dan anak.
9	Aris Tiyanto, SE	Kegiatan pelayanan sosial, perlindungan dan rehabilitasi tuna sosial Kegiatan pelayanan sosial, perlindungan dan rehabilitasi pekerja migran dan korban tindak kekerasan.
10	Herianto, S.ST	Pelayanan sosial lanjut Usia
11.	Drs. Syafrudin Abdul Rochim	Kegiatan bantuan ibu hamil rawan sosial Kegiatan bantuan perlengkapan anak sekolah RTSM Kegiatan dukungan Operasional tanggap darurat bencana alam/social
12	Abdullah, S.Pd	Kegiatan bimbingan teknis peningkatan kualitas tenaga kesejahteraan sosial (TKSK) kecamatan se-Kabupaten Karimun
13	Drs. Zukri, MM	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kegiatan pengadaan sarana keranda



		(asongan) jenazah untuk masyarakat (dana community development)
14.	Zureskhan Karimunba, SE	Kegiatan dukungan operasional UPPKH Kabupaten Karimun
15.	Djunaidi Ama, Pd	Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun No. 04 Tahun 2014 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) di Lingkungan Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun Anggaran 2014 pada Kegiatan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran TA 2014 ditunjuk PPTK yaitu saksi Hj. MITRAYATI, S. Sos namun hanya selama 6 (enam) bulan karena pada bulan Juni 2014 saksi mengundurkan diri sebagai PPTK kegiatan Adum dengan alasan saksi Hj. MITRAYATI, S. Sos merasa bahwa pengelolaan Adum tidak sebagaimana mestinya karena semua kegiatan dalam kegiatan Adum tersebut dilaksanakan sendiri oleh bendahara pengeluaran yaitu saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH atas perintah Kepala Dinas Sosial saat itu yaitu terdakwa, Saksi Hj. MITRAYATI, S. Sos tidak mengetahui dan tidak ada mengerjakan kegiatan sebagaimana dalam RKA pelaksanaan Adum, karena seluruh penggunaan anggaran dan kegiatan seluruhnya dilaksanakan oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH termasuk pembuatan SPJ-nya. Karena saksi Hj. MITRAYATI, S.Sos merasa sebagai PPTK kegiatan Adum kemudian, pada sekitar bulan Juni 2014 saksi Hj. MITRAYATI, S.Sos meminta SPJ untuk kegiatan Adum yang dilakukan oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH, namun hingga bulan Juni 2014 saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH tidak memberikannya, kemudian saksi Hj. MITRAYATI, S.Sos membuat surat pengunduran diri selaku PPTK Adum dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas Sosial Kab.Karimun yaitu terdakwa.
- Bahwa mekanisme pencairan/penggunaan dana yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten karimun tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Mekanisme pembayaran langsung (LS) yaitu digunakan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu atau untuk pembayaran gaji dan tunjangan



yang dilajukan oleh bendahara pengeluaran dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.

2. Mekanisme Uang Persediaan (UP), yaitu Bendahara pengeluaran mempersiapkan surat permintaan pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM), setelah SPM-UP ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Yaitu Kepala Dinas sosial Kabupaten Karimun, selanjutnya Bendahara pengeluaran membawa ke Bendahara Umum Daerah (BUD), /Kuasa BUD di BPKAD Kabupaten Karimun, dan kemudian Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan pencairan dana dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang memerintahkan Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun untuk mencairkan uang kepada Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
3. Mekanisme ganti uang (GU) apabila uang kas atas penerimaan UP telah habis dipergunakan maka akan diajukan kembali penggantianannya dengan pencairan Ganti Uang (GU) dengan mekanisme :
  - PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) membuat daftar transaksi belanja atas kegiatan yang belum terlaksana ke dalam BKU Manual untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.
  - Bendahara pengeluaran meng-entry daftar transaksi belanja atas kegiatan yang telah dibuat PPTK di BKU (Buku Kas Umum) Manual kedalam aplikasi SIMDA Keuangan.
  - Dari aplikasi SIMDA keuangan Bendahara pengeluaran membuat Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah uang Persediaan atas SPJ dan laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional).
  - Bendahara Pengeluaran mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang (SPP-GU), Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) dan laporan pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah uang persediaan atas SPJ (SPJ Belanja) yang selanjutnya diverifikasi oleh pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
  - SPP-GU dan SPM-GU serta surat pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) yang telah lengkap ditandatangani diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/kuasa BUD yaitu di BPKAD Kabupaten Karimun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa BUD melakukan pencairan dana dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) yang memerintahkan Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun mencairkan dana kepada Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

➤ Bahwa berdasarkan arsip register penerbitan dokumen SP2D untuk pencairan anggaran belanja barang dan jasa melalui UP dan GU kepada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 yang ada pada bagian keuangan (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Karimun, sebagai berikut :

NO.	Bulan	Tanggal	JENIS		NO. SP2D	Keterangan
			UP	GU		
I	Januari					
1		16-Jan-14	350,000,000	-	0108/BUD-SP2D/2014	
II	Februari					
1		14-Feb-14		24,181,600	0686/BUD-SP2D/2014	
2		14-Feb-14		14,265,000	0687/BUD-SP2D/2014	
3		14-Feb-14		16,824,500	0688/BUD-SP2D/2014	
4		14-Feb-14		2,675,000	0689/BUD-SP2D/2014	
5		14-Feb-14		65,717,500	0690/BUD-SP2D/2014	
6		14-Feb-14		77,780,000	0691/BUD-SP2D/2014	
7		14-Feb-14		3,385,000	0692/BUD-SP2D/2014	
8		14-Feb-14		22,309,000	0693/BUD-SP2D/2014	
9		14-Feb-14		575,000	0694/BUD-SP2D/2014	
10		14-Feb-14		7,738,750	0695/BUD-SP2D/2014	
11		14-Feb-14		13,317,500	0696/BUD-SP2D/2014	
12		26-Feb-14		27,260,000	0893/BUD-SP2D/2014	
13		26-Feb-14		18,390,000	0894/BUD-SP2D/2014	
14		26-Feb-14		19,257,500	0895/BUD-SP2D/2014	
15		26-Feb-14		9,695,500	0896/BUD-SP2D/2014	
16		26-Feb-14		10,464,000	0897/BUD-SP2D/2014	
17		26-Feb-14		52,232,500	0898/BUD-	

Halaman 12 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

18		26-Feb-14	10,049,000	SP2D/2014 0899/BUD-
19		26-Feb-14	78,445,500	SP2D/2014 0900/BUD-
20		26-Feb-14	50,301,000	SP2D/2014 0901/BUD-
21		26-Feb-14	4,085,000	SP2D/2014 0902/BUD-
22		26-Feb-14	21,370,000	SP2D/2014 0903/BUD-
23		26-Feb-14	2,450,000	SP2D/2014 0904/BUD-
24		26-Feb-14	1,250,000	SP2D/2014 0905/BUD-
25		26-Feb-14	25,038,750	SP2D/2014 0906/BUD-
26		26-Feb-14	3,775,000	SP2D/2014 0907/BUD-
		Jumlah	<b>582,832,600</b>	
III	Maret			
1		21-Mar-14	<b>4,892,500</b>	1790/BUD- SP2D/2014
2		21-Mar-14	<b>58,873,800</b>	1791/BUD- SP2D/2014
3		21-Mar-14	<b>15,685,000</b>	1792/BUD- SP2D/2014
4		21-Mar-14	<b>14,416,750</b>	1793/BUD- SP2D/2014
5		21-Mar-14	<b>4,477,500</b>	1794/BUD- SP2D/2014
6		21-Mar-14	<b>24,740,000</b>	1795/BUD- SP2D/2014
7		21-Mar-14	<b>4,998,000</b>	1796/BUD- SP2D/2014
8		21-Mar-14	<b>20,889,500</b>	1797/BUD- SP2D/2014
9		21-Mar-14	<b>9,796,000</b>	1798/BUD- SP2D/2014
10		21-Mar-14	<b>8,755,000</b>	1799/BUD- SP2D/2014
11		21-Mar-14	<b>775,000</b>	1800/BUD- SP2D/2014
12		21-Mar-14	<b>20,285,000</b>	1801/BUD- SP2D/2014
13		21-Mar-14	<b>10,225,000</b>	1802/BUD- SP2D/2014
14		21-Mar-14	<b>6,250,000</b>	1803/BUD- SP2D/2014
15		21-Mar-14	<b>19,414,500</b>	1804/BUD- SP2D/2014
16		21-Mar-14	<b>7,888,750</b>	1805/BUD-

Halaman 13 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					SP2D/2014	
		Jumlah		232,362,300		
IV	April					
1		28-Apr-14		2,220,000	2929/BUD- SP2D/2014	
2		28-Apr-14		10,970,000	2930/BUD- SP2D/2014	
3		28-Apr-14		11,425,000	2931/BUD- SP2D/2014	
4		28-Apr-14		2,350,000	2932/BUD- SP2D/2014	
5		28-Apr-14		475,000	2933/BUD- SP2D/2014	
6		28-Apr-14		9,097,500	2934/BUD- SP2D/2014	
7		28-Apr-14		9,333,750	2935/BUD- SP2D/2014	
8		28-Apr-14		88,885,592	2936/BUD- SP2D/2014	
9		28-Apr-14		83,136,100	2937/BUD- SP2D/2014	
		Jumlah		217,892,942		
V	Mei					
1		28-May-14		50,644,000	4384/BUD- SP2D/2014	
2		28-May-14		18,895,000	4385/BUD- SP2D/2014	
3		28-May-14		62,902,500	4386/BUD- SP2D/2014	
4		28-May-14		14,050,000	4387/BUD- SP2D/2014	
5		28-May-14		15,712,500	4388/BUD- SP2D/2014	
6		28-May-14		16,943,900	4389/BUD- SP2D/2014	
7		28-May-14		26,000,000	4390/BUD- SP2D/2014	
8		28-May-14		15,085,000	4391/BUD- SP2D/2014	
9		28-May-14		1,050,000	4392/BUD- SP2D/2014	
		Jumlah		221,282,900		
VI	Juni					
1		-	-	-	-	Selama bln Juni tidak ada Pengajuan & Pencairan GU

Halaman 14 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII	Juli				
1		02-Jul-14		21,170,000	6201/BUD-SP2D/2014
2		02-Jul-14		127,610,545	6202/BUD-SP2D/2014
3		02-Jul-14		8,325,000	6203/BUD-SP2D/2014
4		02-Jul-14		12,400,000	6204/BUD-SP2D/2014
5		02-Jul-14		16,758,000	6205/BUD-SP2D/2014
6		02-Jul-14		35,173,000	6206/BUD-SP2D/2014
7		02-Jul-14		1,425,000	6207/BUD-SP2D/2014
8		10-Jul-14		32,335,000	6597/BUD-SP2D/2014
9		10-Jul-14		2,225,000	6598/BUD-SP2D/2014
10		10-Jul-14		9,650,000	6599/BUD-SP2D/2014
11		10-Jul-14		3,595,000	6600/BUD-SP2D/2014
12		10-Jul-14		67,675,000	6601/BUD-SP2D/2014
13		10-Jul-14		12,665,000	6602/BUD-SP2D/2014
14		10-Jul-14		28,661,000	6603/BUD-SP2D/2014
15		10-Jul-14		475,000	6604/BUD-SP2D/2014
16		10-Jul-14		14,266,789	6605/BUD-SP2D/2014
17		10-Jul-14		38,802,900	6606/BUD-SP2D/2014
		Jumlah		433,212,234	
VIII	Agustus				
1		22-Aug-14		27,530,000	8516/BUD-SP2D/2014
2		22-Aug-14		83,005,000	8517/BUD-SP2D/2014
3		22-Aug-14		52,916,500	8518/BUD-SP2D/2014
4		22-Aug-14		24,282,500	8519/BUD-SP2D/2014
5		22-Aug-14		10,135,000	8520/BUD-SP2D/2014
6		22-Aug-14		12,420,000	8521/BUD-SP2D/2014
7		22-Aug-14		4,250,000	8522/BUD-SP2D/2014

Halaman 15 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah	214,539,000		
IX	September				
1		30-Sep-14	7,539,000	9855/BUD-SP2D/2014	
2		30-Sep-14	11,341,000	9856/BUD-SP2D/2014	
3		30-Sep-14	35,370,000	9857/BUD-SP2D/2014	
4		30-Sep-14	23,850,000	9858/BUD-SP2D/2014	
5		30-Sep-14	129,134,600	9859/BUD-SP2D/2014	
6		30-Sep-14	60,365,000	9860/BUD-SP2D/2014	
7		30-Sep-14	11,851,500	9861/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah	279,451,100		
X	Oktober				
1		06-Oct-14	203,867,000	10209/BUD-SP2D/2014	
2		06-Oct-14	30,805,000	10210/BUD-SP2D/2014	
3		06-Oct-14	20,605,000	10211/BUD-SP2D/2014	
4		16-Oct-14	10,692,000	10662/BUD-SP2D/2014	
5		16-Oct-14	9,425,000	10663/BUD-SP2D/2014	
6		16-Oct-14	33,860,000	10664/BUD-SP2D/2014	
7		16-Oct-14	65,345,000	10665/BUD-SP2D/2014	
8		16-Oct-14	63,915,000	10666/BUD-SP2D/2014	
9		16-Oct-14	15,258,053	10667/BUD-SP2D/2014	
10		16-Oct-14	950,000	10668/BUD-SP2D/2014	
11		16-Oct-14	30,878,000	10669/BUD-SP2D/2014	
12		16-Oct-14	92,985,000	10670/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah	578,585,053		
XI	November				
1		17-Nov-14	20,691,000	11924/BUD-SP2D/2014	
2		17-Nov-14	30,186,000	11925/BUD-SP2D/2014	
3		17-Nov-14	25,825,400	11926/BUD-SP2D/2014	
4		17-Nov-14	36,640,100	11927/BUD-	

Halaman 16 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					SP2D/2014	
5		17-Nov-14		37,986,500	11928/BUD-SP2D/2014	
6		17-Nov-14		4,938,000	11929/BUD-SP2D/2014	
7		17-Nov-14		23,015,000	11930/BUD-SP2D/2014	
8		17-Nov-14		29,175,000	11931/BUD-SP2D/2014	
9		17-Nov-14		11,408,000	11932/BUD-SP2D/2014	
10		17-Nov-14		9,541,500	11933/BUD-SP2D/2014	
11		17-Nov-14		29,459,000	11934/BUD-SP2D/2014	
12		17-Nov-14		23,195,900	11935/BUD-SP2D/2014	
13		17-Nov-14		3,557,500	11936/BUD-SP2D/2014	
14		17-Nov-14		64,018,700	11937/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		349,637,600		
XII	Desember					
1		09-Dec-14		28,009,474	13185/BUD-SP2D/2014	
2		09-Dec-14		16,852,421	13186/BUD-SP2D/2014	
3		09-Dec-14		900,000	13187/BUD-SP2D/2014	
4		09-Dec-14		63,640,000	13188/BUD-SP2D/2014	
5		09-Dec-14		6,667,500	13189/BUD-SP2D/2014	
6		09-Dec-14		21,536,000	13190/BUD-SP2D/2014	
7		09-Dec-14		9,652,000	13191/BUD-SP2D/2014	
8		09-Dec-14		37,087,400	13192/BUD-SP2D/2014	
9		09-Dec-14		26,374,900	13193/BUD-SP2D/2014	
10		09-Dec-14		95,357,000	13194/BUD-SP2D/2014	
11		12-Dec-14		199,054,000	13419/BUD-SP2D/2014	
12		12-Dec-14		1,265,500	13420/BUD-SP2D/2014	
13		12-Dec-14		550,000	13421/BUD-SP2D/2014	
14		12-Dec-14		36,536,560	13422/BUD-SP2D/2014	
15		16-Dec-14		27,104,400	13539/BUD-	

Halaman 17 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SP2D/2014	
		Jumlah	570,587,155		
Jumlah Total	350,000,000	3,097,550,284	3,447,550,284	Jumlah UP + GU	

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Sosial Kabupaten Karimun mendapat Uang Persediaan sebesar Rp. 350.000.000,- yang mana uang tersebut digunakan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH untuk membayar hutang kepada saksi TONY CHARLES and saksi AGUSTIAWAN dengan bunga yang cukup besar serta memberikan uang Panjar kepada 4 (empat) bidang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana dimintakan pertanggungjawaban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

No	Nama Bidang / Kegiatan	Pemberian & Pembebanan SPJ (Rp)		
		Pemberian Riil	Beban Anggaran SPJ Fiktif	Jumlah
1	Bidang Kesejahteraan Sosial	25.000.000	25.000.000	50.000.000
2	Bidang Pelayanan Sosial	25.000.000	25.000.000	50.000.000
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	25.000.000	25.000.000	50.000.000
4	Bidang Pemakaman	25.000.000	25.000.000	50.000.000
5	Kegiatan Adum	30.000.000	120.000.000	150.000.000
Total		130.000.000	220.000.000	350.000.000

dan sisa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang panjar kegiatan administrasi umum perkantoran.

- Bahwa saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH mendapatkan Pinjaman dari Saksi Agustianwan selama bulan Desember 2014 yang diberikan secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 1.272.752.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi AGUSTIAWAN dengan cara tunai ataupun ditransfer melalui rekening giro yang saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH buka dan atas nama sendiri.
- Bahwa saksi EFFY YANTI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen) dalam laporan SPJ kegiatan administrasi Umum tahun 2014 tidak sesuai antara yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ, terdapat SPJ perjalanan dinas fiktif dan bukti belanja fiktif, serta ada mark up untuk menyesuaikan BKU aplikasi dan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH meminta kepada saksi EFFY YANTI untuk dibuatkan kwitansi

Halaman 18 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanda bukti pembayaran ATK pengadaan, cetak, peralatan kebersihan dan materai

- Bahwa pada Kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp1.136.573.697,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp 325.740.647,00
Selisih	Rp 810.833.050,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.600.000,00
2	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.000.000,00
3	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00
4	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.600.000,00
5	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	42.000.000,00
6	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	195.750,00
7	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/ Majalah	250.000,00
8	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00
9	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.500.000,00
10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00
11	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.850.000,00
12	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Mobilitas Darat	12.000.000,00
13	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.300.000,00
14	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.254.400,00
15	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	480.482.900,00
16	5.2.2.17.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	42.800.000,00
Jumlah			810.833.050,00

- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi SYAFRUDDIN, saksi ABDULLAH selaku Kepala Bidang untuk membuat SPJ kegiatan dari uang panjar yang diterima sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menjadi SPJ sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selama tahun 2014 kegiatan yang tidak diserahkan pencairan anggarannya oleh saksi

Halaman 19 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH namun SPJ yang dibuat sesuai dengan nilai SP2D atas kegiatan yang dilakukan dan pertanggungjawaban tidak sama atau fiktif karena saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH tidak memberikan anggaran kegiatan sesuai dengan yang diajukan.

- Bahwa Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Reguler Service Provider UPPKH pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun terdapat perbedaan antara Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp74.997.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp55.098.000,00
Selisih	Rp19.899.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	185.000,00
2	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.997.000,00
3	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.317.000,00
4	5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00
Jumlah			19.899.000,00

- Bahwa Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.96.859.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.58.411.500,00
Selisih	Rp.38.447.500,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

N o	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	437.500,00
2	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.490.000,00
3	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	460.000,00
4	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	21.060.000,00
5	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung Pertemuan	3.000.000,00
6	5.2.2.26.01	Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga	6.000.000,00
Jumlah			38.447.500,00

Halaman 20 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR





Pada Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan KUBE TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.380.721.900,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.113.447.900,00
Selisih	Rp.267.274.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.980.000,00
2	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00
3	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	11.200.000,00
4	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	46.500.000,00
5	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.050.000,00
6	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Mobilitas Darat	1.000.000,00
7	5.2.2.08.02	Belanja Mobilitas Air	12.800.000,00
8	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00
9	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	163.264.000,00
10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.480.000,00
Jumlah			267.274.000,00

Saksi DUDY ISNANDAR selaku PPTK tidak mengetahui adanya kegiatan dan tidak pernah saksi DUDY ISNANDAR buat namun uraian kegiatan tersebut ada dalam BKU Gabungan aplikasi Simda. Selama tahun 2014 untuk kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan KUBE anggaran yang diserap berdasarkan SPJ hanya sebesar Rp.64.882.900,00 (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa Kegiatan Verifikasi dan penetapan penerima Hibah Pembangunan / Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.170.538.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.53.581.500,00
Selisih	Rp.116.956.500,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :



No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00
2	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00
3	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	8.500.000,00
4	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.675.000,00
5	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00
6	5.2.2.08.02	Belanja Mobilitas Air	5.200.000,00
7	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00
8	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.742.500,00
9	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.539.000,00
Jumlah			116.956.500,00

Saksi DUDY ISNANDAR selaku PPTK menjelaskan realisasi anggaran yang diberikan hanya untuk SPJ bulan Desember 2014 yaitu sebesar Rp.37.295.400,00 (tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan untuk anggaran bulan Agustus dan September 2014 awalnya diminta oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH untuk membuat BKU dan SPJ agar anggaran dapat dicairkan melalui GU yang akan diajukan, namun setelah dibuat dan diserahkan kepada saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH setelah anggaran GU pada bulan tersebut diterima uang kegiatan tidak diserahkan kepada saksi selaku PPTK, sehingga SPJ untuk bulan Agustus dan September banyak yang tidak ditandatangani.

- Bahwa Kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping KUBE) TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.62.335.300,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.56.400.300,00
Selisih	Rp 5.935.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	635.000,00
2	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000,00
3	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	275.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Media	500.000,00
		Propaganda	
5	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00
6	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan	3.000.000,00
		Minuman Rapat	
		Jumlah	5.935.000,00

Saksi MOHAMMAD AMIN selaku PPTK Kegiatan menyatakan bahwa terdapat pencairan kegiatan sesuai dengan BKU Manual yang dibuat oleh PPTK tetapi dana pencairan tersebut tidak diberikan kepada PPTK, yaitu terhadap kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping KUBE) TA 2014, terdapat realisasi SPJ yang tidak real sebesar Rp10.135.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap pendamping KUBE) TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.56.060.500
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.37.853.000
Selisih	Rp.18.207.500

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	275.000,00
2	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Media	750.000,00
		Propaganda	
3	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan	9.000.000,00
		Minuman Rapat	
4	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas	8.182.500,00
		Dalam Daerah	
		Jumlah	18.207.500,00

Saksi MOHAMMAD AMIN selaku PPTK Kegiatan menyatakan bahwa terdapat pencairan kegiatan sesuai dengan BKU Manual yang dibuat oleh PPTK tetapi dana pencairan tersebut tidak diberikan kepada PPTK, yaitu terhadap kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap pendamping KUBE) TA 2014, terdapat realisasi SPJ yang tidak real sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Halaman 23 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan (Sharing dengan Provinsi Kepri) TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp 67.500.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp 67.200.000,00
Selisih	Rp 300.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	300.000,00
JUMLAH			300.000,00

- Bahwa Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Kecamatan Se-Kabupaten Karimun TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.117.043.850,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.116.522.850,00
Selisih	Rp 521.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00
2	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000,00
JUMLAH			521.000,00

- Bahwa Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.119.360.000,00
	0
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.118.350.000,00
	0
Selisih	Rp 1.010.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.010.000,00
JUMLAH			1.010.000,00

Halaman 24 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



- Bahwa Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.204.055.000,0
	0
Nilai Realisasi Belanja	Rp.136.622.500
Riil	,00
Selisih	Rp.67.432.500,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.0 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00
2	5.2.2.03.1 2	Belanja Dokumentasi	437.500,00
3	5.2.2.11.0 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00
4	5.2.2.15.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.010.000,00
5	5.2.2.15.0 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.725.000,00
6	5.2.2.22.0 1	Belanja Transportasi	18.600.000,00
JUMLAH			67.482.500,00

- Bahwa Selisih yang didapat merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu antara lain :

Adanya belanja barang dan belanja perjalanan dinas pegawai yang fiktif;  
Adanya mark up atas belanja barang seperti pada pos belanja alat tulis kantor, Belanja penggandaan, belnja cetak, belanja materai dan lain-lain;  
Adanya penggunaan atas belanja bahan bakar Minyak/gas dan pelumas, belanja penggantian suku cadang dan belanja jasa service untuk keperluan Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa;

- Bahwa saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH melakukan pemotongan perjalanan dinas luar daerah atas perintah Kepala Dinas Sosial yaitu terdakwa dan bagi pegawai yang tidak melakukan perjalanan dinas luar dan dalam, namun namanya ada dipakai dalam Surat Perintah Tugas (SPT) maka atas kebijakan terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun akan dibantu uang saku sedikit sesuai perintah terdakwa yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Halaman 25 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH mengambil anggaran dinas yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dalam angsuran mobil dan angsuran pinjaman yang saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH yang disetorkan ke Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 74.505.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2014 saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ada mengentri dan mengkonsep uraian kegiatan dalam beberapa kegiatan PPTK pada Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014. Selanjutnya saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH mencairkan sendiri anggaran tersebut tanpa sepengetahuan PPTK.
- Bahwa cara saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH mengentri dan mengkonsep uraian kegiatan senilai anggaran yang akan diajukan dan setelah itu saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH membuat SPP dan SPM nya untuk diajukan kepada Kepala Dinas yaitu terdakwa dan saat itu terdakwa mengetahui dan menyetujuinya. Selanjutnya SPM dan SPP tersebut diajukan kembali ke BUD untuk diterbitkan SP2D. Setelah SP2D dicairkan kemudian uang anggarannya saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ada yang digunakan untuk membayar hutang pinjaman pada tahun 2014 kepada saksi TONY CHARLES dan sebagian digunakan untuk menutupi kebutuhan pribadi terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial beserta pembayaran angsuran mobil milik saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH.
- Bahwa kemudian pada tahun anggaran 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 1.13.00.00.5 tanggal 02 Januari 2015 mendapatkan alokasi dana belanja sejumlah Rp. 7.946.449.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian pada tanggal 04 November 2015 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 yang merubah jumlah alokasi belanja yang semula 7.946.449.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp.7.746.205.800,- (Tujuh milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima ribu delapan ratus rupiah) dengan rician perubahan belanja sebagai berikut:

No	Uraian Alokasi Belanja	DPA 2015 (Rp)	DPPA 2015 (Perubahan)
.			
Belanja Tidak Langsung:			

Halaman 26 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Belanja Pegawai	2.450.599.000,00,-	2.472.655.300,00,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung		2.450.599.000,00,-	2.472.655.300,00,-
Belanja Langsung :			
1.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	1.397.186.000,00,-	1.222.486.000,00,-
2.	Pengadaan Mebeleur	197.909.000,00,-	197.909.000,00,-
3.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.250.000,00,-	102.250.000,00,-
4.	Penyusunan LAKIP	20.000.000,00,-	20.000.000,00,-
5.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak huni dan KUBE	375.000.000,00,-	303.000.000,00,-
6.	Verivikasi dan Penetapan Penerima Hibah Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS	0,00,-	350.000.000,00,-
7.	Pengadaan Website	216.505.000,00,-	107.641.000,00,-
8.	Updating Data PMKS dan PSKS Kabupaten Karimun	300.000.000,00,-	300.000.000,00,-
9.	Peningkatan Pembinaan PenyandangDisabilitas/Orang Dengan Kecatatan	175.000.000,00,-	245.000.000,00,-
10.	Pembinaan Anak jalanan (Sharing dengan provinsi Kepri)	93.000.000,00,-	150.000.000,00,-
11.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Perlindungan Tuna Sosial	150.000.000,00,-	150.000.000,00,-
12.	Pelayanan dan Rehabilitasi perlindungan Sosial Anak	50.000.000,00,-	50.000.000,00,-
13.	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	50.000.000,00,-	50.000.000,00,-
14.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan	25.000.000,00,-	25.000.000,00,-
15.	Aksesibilitas Pelayanan Sosial Melalui Rumah Perlindungan Anak	200.000.000,00,-	200.000.000,00,-
16.	Pembinaan dan Peningkatan Karang Taruna	100.000.000,00,-	96.644.300,00,-
17.	Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	70.000.000,00,-	0,00,-
18.	Fasilitasi Pelaksanaan Program Aksesos Tahun 2015	100.000.000,00,-	70.000.000,00,-
19.	Penyusunan RENJA	20.000.000,00,-	20.000.000,00,-
20.	Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran	39.000.000,00,-	0,00,-
21.	Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum dan Taman Makam Pahlawan	200.000.000,00,-	200.000.000,00,-

Halaman 27 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Pengadaan Sarana Keranda (Asongan) Jenazah untuk Masyarakat (Dana Community Development)	70.000.000,00,-	70.000.000,00,-
23.	Revisi Master Plan/ DED TPU Sememal	65.000.000,00,-	0,00,-
24.	Registrasi dan Pendapatan Taman Pemakaman Bukan Umum	65.000.000,00,-	0,00,-
25.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Insentif Pendamping RTLH)	75.000.000,00,-	60.000.000,00,-
26.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Sosialisasi Terhadap Penerima RTLH)	65.000.000,00,-	65.000.000,00,-
27.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping Kube)	75.000.000,00,-	60.000.000,00,-
28.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi Terhadap Pendamping KUBE)	55.000.000,00,-	44.000.000,00,-
29.	Fasilitasi Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera	100.000.000,00,-	75.000.000,00,-
30.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat	100.000.000,00,-	95.392.700,00,-
31.	Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Rawan Sosial	150.000.000,00,-	150.000.000,00,-
32.	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin	195.000.000,00	195.000.000,00
33.	Dukungan Operasional Tangap Darurat bencana alam/sosial kegiatan tanggap darurat jenazah terlantar/korban bencana alam	150.000.000,00	150.000.000,00

Halaman 28 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



34.	Kegiatan tanggap darurat jenazah terlantar/korban bencana alam/social	100.000.000,00	100.000.000,00
35.	Pengadaan logistic bencana	150.000.000,00	146.902.500,00
36.	Kegiatan dukungan operasional UPPKH kabupaten karimun	200.000.000,00	200.000.000,00
37.	Fasilitasi pelaksanaan seleksi/rekrutmen pendampingan program keluarga harapan kabupaten karimun tahun 2015	0,00	2325.000,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2)		5.495.850.000,00	5.273.550.500,00
JUMLAH BELANJA (1)+(2)		7.946.449.000,00	7.746.205.800,00

- Bahwa terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 37 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang menetapkan antara lain:

No	Nama	Jabatan
	H. INDRA GUNAWAN, S. SOS	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang / Jasa
	ARDIYANSAH	Bendahara Pengeluaran
	Nursyafiani,Amd	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen)
	EDDY ISWANTO	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Pembukuan)
	EFFY YANTI,S.Sos	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Daftar Gaji)

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

N	NAMA	NAMA KEGIATAN
O		
1	RYO GUNAWAN,ST	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran.

Halaman 29 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kegiatan pengadaan Meubelir kantor Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan pembuatan website dinas sosial kabupaten karimun Kegiatan sosialisasi dan publikasi kegiatan SKPD melalui pameran dan pawai pembangunan
2	Ridwan,SE,Ak	Kegiatan penyusunan LAKIP Kegiatan penyusunan RENJA
3	DUDY ISNANDAR, SE, MM	Kegiatan fasilitasi Monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (Monev) kube sosialisasi terhadap penrimaan kube Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (Monev) kube (insentif) terhadap penerima kube
4	Prihandayani Bayusari,SE,AK	Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan Pelaporan Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Insetif Pendamping RTLH)
5	Mohammad Amin, S.TIS	Updating Data KIS,KIP,KKS,PMKS dan PSKS Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penaggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAN Kube Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah Kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Sosialisasi Terhadap

Halaman 30 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penerimaan RTLH)
6	Hj. Darlisma, S.Sos	Kegiatan Pelayanan Sosial dan Perlindungan Orang Dengan Kecatatan (ODK)
7	Rita Agustina, ST, MM	Kegiatan Akseibilitas Pelayanan Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan (Sharing dengan Provinsi Kepulauan Riau)
8	Naazirah, S. Psi	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Lansia)
9	Muhammad Zen, SH,MA	Kegiatan Pelayanan Sosial, Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Kegiatan Pelayanan Sosial, Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan Kegiatan Fasilitasi Pekerjaan Pelaksanaan Program Askesos Tahun 2015
10	Defrizal,S.Sos	Kegiatan Dukungan Operasionalisasi UPPKH Kabupaten Karimun Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) 2015
11.	Drs. Syafrudin Abdul Rochim	Kegiatan pengadaan logistic bantuan bencana alam/sosial Kegiatan dukungan opsional tanggap darurat bencana alam/sosial Kegiatan peningkatan rumah tangga sangat miskin (RTSM) 2015 Kegiatan peningkatan kesejahteraan perempuan rawan social
11	Abdullah, S.Pd	Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas karang taruna se-kabupaten karimun Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat (PSM)

Halaman 31 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.	Drs.Zukri,MM	Kegiatan revisi master plan/DED TPU sememal Kegiatan tanggap darurat jenazah terlantar/korban bencana alam/sosial
15.	Hj. Jesmiwati	Kegiatan pengadaan sarana keranda (asongan) jenaah untuk masyarakat
16.	Fetty Yulianti, SH	Kegiatan pembinaan dan pengawasan penjaga taman pemakaman umum dan tama makan pahlawan Kegiatan registrasi dan pendataan taman pemakanan bukan umum

- Bahwa berdasarkan arsip register penerbitan dokumen SP2D untuk pencairan anggaran belanja barang dan jasa melalui UP dan GU kepada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2015 yang ada pada bagian keuangan (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Karimun, antara lain sebagai berikut :

NO.	Bulan	TANGGA L	JENIS PENGELUARAN		NO. SP2D	KETERANGA N
			UP	GU		
I	Januari					
1		23-Jan-15	513,000,00 0		00308/BUD- SP2D/2015	
II	Februari					
2		23-Feb-15		4,857,000	00772/BUD- SP2D/2015	
3		23-Feb-15		20,450,000	00773/BUD- SP2D/2015	
4		23-Feb-15		45,476,000	00774/BUD- SP2D/2015	
5		23-Feb-15		107,096,408	00775/BUD- SP2D/2015	
6		23-Feb-15		10,459,700	00776/BUD- SP2D/2015	
7		23-Feb-15		7,338,200	00777/BUD- SP2D/2015	
8		23-Feb-15		34,970,832	00778/BUD- SP2D/2015	
9		23-Feb-15		9,085,000	00779/BUD- SP2D/2015	
10		23-Feb-15		20,795,000	00780/BUD- SP2D/2015	
11		23-Feb-15		18,695,000	00781/BUD- SP2D/2015	
12		23-Feb-15		28,479,200	00782/BUD- SP2D/2015	
13		23-Feb-15		32,073,800	00783/BUD- SP2D/2015	
14		23-Feb-15		18,200,000	00784/BUD-	

Halaman 32 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15		23-Feb-15		2,272,500	SP2D/2015 00785/BUD- SP2D/2015	
16		23-Feb-15		10,670,000	00786/BUD- SP2D/2015	
17		23-Feb-15		14,578,000	00787/BUD- SP2D/2015	
18		23-Feb-15		51,035,000	00788/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah		436,531,640		
III	Maret					
-	-	-	-	-	-	Selama bln Maret tidak ada Pengajuan & Pencairan GU
IV	April					
1		07-Apr-15		135,825,000	02233/BUD- SP2D/2015	
2		07-Apr-15		9,343,000	02234/BUD- SP2D/2015	
3		07-Apr-15		10,933,000	02235/BUD- SP2D/2015	
4		07-Apr-15		7,550,000	02236/BUD- SP2D/2015	
5		07-Apr-15		525,000	02237/BUD- SP2D/2015	
6		07-Apr-15		33,006,537	02238/BUD- SP2D/2015	
7		07-Apr-15		27,124,000	02239/BUD- SP2D/2015	
8		07-Apr-15		3,205,000	02240/BUD- SP2D/2015	
9		07-Apr-15		11,417,500	02241/BUD- SP2D/2015	
10		07-Apr-15		12,895,200	02242/BUD- SP2D/2015	
11		07-Apr-15		8,900,000	02243/BUD- SP2D/2015	
12		07-Apr-15		75,849,300	02244/BUD- SP2D/2015	
13		07-Apr-15		40,734,900	02245/BUD- SP2D/2015	
14		07-Apr-15		12,422,000	02246/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah		389,730,437		
V	Mei					
1		21-May-15		34,349,300	03702/BUD- SP2D/2015	
2		21-May-15		8,090,000	03703/BUD- SP2D/2015	
3		21-May-15		11,603,700	03704/BUD- SP2D/2015	
4		21-May-15		525,000	03705/BUD- SP2D/2015	
5		21-May-15		39,769,390	03706/BUD- SP2D/2015	
6		21-May-15		6,375,000	03707/BUD-	

Halaman 33 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7		21-May-15		140,769,172	SP2D/2015 03708/BUD- SP2D/2015	
8		21-May-15		30,506,450	03709/BUD- SP2D/2015	
9		21-May-15		35,962,800	03710/BUD- SP2D/2015	
10		21-May-15		51,367,000	03711/BUD- SP2D/2015	
11		21-May-15		6,385,000	03712/BUD- SP2D/2015	
12		21-May-15		6,685,000	03713/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah		372,387,812		
<b>VI</b>	<b>Juni</b>					
1		09-Jun-15		135,225,960	04468/BUD- SP2D/2015	
2		09-Jun-15		13,574,600	04469/BUD- SP2D/2015	
3		09-Jun-15		19,760,515	04470/BUD- SP2D/2015	
4		09-Jun-15		2,005,000	04471/BUD- SP2D/2015	
5		09-Jun-15		15,783,000	04472/BUD- SP2D/2015	
6		09-Jun-15		15,866,000	04473/BUD- SP2D/2015	
7		09-Jun-15		35,423,000	04474/BUD- SP2D/2015	
8		09-Jun-15		28,250,000	04475/BUD- SP2D/2015	
9		09-Jun-15		5,543,000	04476/BUD- SP2D/2015	
10		09-Jun-15		26,119,400	04477/BUD- SP2D/2015	
11		09-Jun-15		13,144,250	04478/BUD- SP2D/2015	
12		09-Jun-15		4,075,000	04479/BUD- SP2D/2015	
13		09-Jun-15		13,225,000	04480/BUD- SP2D/2015	
14		09-Jun-15		29,893,000	04481/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah		357,887,725		
<b>VII</b>	<b>Juli</b>					
1		06-Jul-15		13,835,800	05701/BUD- SP2D/2015	
2		06-Jul-15		11,700,000	05702/BUD- SP2D/2015	
3		06-Jul-15		9,125,000	05703/BUD- SP2D/2015	
4		06-Jul-15		65,902,200	05704/BUD- SP2D/2015	
5		06-Jul-15		70,262,000	05705/BUD- SP2D/2015	
6		06-Jul-15		16,255,089	05706/BUD- SP2D/2015	
7		06-Jul-15		525,000	05707/BUD-	

Halaman 34 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8		06-Jul-15		5,000,000	SP2D/2015 05708/BUD- SP2D/2015	
9		06-Jul-15		48,800,500	05709/BUD- SP2D/2015	
10		06-Jul-15		14,796,600	05710/BUD- SP2D/2015	
11		06-Jul-15		20,691,400	05711/BUD- SP2D/2015	
12		06-Jul-15		15,089,300	05712/BUD- SP2D/2015	
13		06-Jul-15		35,996,868	05713/BUD- SP2D/2015	
14		06-Jul-15		10,250,000	05714/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah		338,229,757		
VIII	Agustus					
-	-	-	-	-	-	Selama bln Agustus tidak ada Pengajuan & Pencairan GU
IX	September					
-	-	-	-	-	-	Selama bln September tidak ada Pengajuan & Pencairan GU
X	Oktober					
1		06-Oct-15		187,951,250	11173/BUD- SP2D/2015	
2		30-Oct-15		3,850,000	11622/BUD- SP2D/2015	
3		30-Oct-15		9,610,341	11623/BUD- SP2D/2015	
4		30-Oct-15		13,207,000	11624/BUD- SP2D/2015	
5		30-Oct-15		26,559,616	11625/BUD- SP2D/2015	
6		30-Oct-15		14,073,000	11626/BUD- SP2D/2015	

Halaman 35 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7		30-Oct-15		32,668,500	11627/BUD-SP2D/2015	
8		30-Oct-15		44,000,000	11628/BUD-SP2D/2015	
9		30-Oct-15		111,000,000	11629/BUD-SP2D/2015	
10		30-Oct-15		88,320,000	11630/BUD-SP2D/2015	
		Jumlah		531,239,707		
<b>XI November</b>						
1		30-Nov-15		65,029,000	12646/BUD-SP2D/2015	
2		30-Nov-15		6,723,000	12647/BUD-SP2D/2015	
3		30-Nov-15		29,705,400	12648/BUD-SP2D/2015	
4		30-Nov-15		59,419,100	12649/BUD-SP2D/2015	
5		30-Nov-15		60,998,942	12650/BUD-SP2D/2015	
6		30-Nov-15		26,796,200	12651/BUD-SP2D/2015	
7		30-Nov-15		43,636,866	12652/BUD-SP2D/2015	
8		30-Nov-15		32,191,000	12653/BUD-SP2D/2015	
9		30-Nov-15		101,702,500	12654/BUD-SP2D/2015	
10		30-Nov-15		12,402,500	12655/BUD-SP2D/2015	
		Jumlah		438,604,508		
<b>XII Desember</b>						
1		11-Dec-15		256,056,500	13126/BUD-SP2D/2015	
2		14-Dec-15		63,048,680	13263/BUD-SP2D/2015	
3		14-Dec-15		7,775,216	13264/BUD-SP2D/2015	
4		14-Dec-15		10,070,000	13265/BUD-SP2D/2015	
5		14-Dec-15		125,388,500	13266/BUD-SP2D/2015	
6		14-Dec-15		13,306,000	13267/BUD-SP2D/2015	
7		14-Dec-15		10,829,000	13268/BUD-SP2D/2015	
8		14-Dec-15		47,386,000	13269/BUD-	

Halaman 36 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	23-Dec-15	27,450,000	SP2D/2015 13564/BUD- SP2D/2015	
10	23-Dec-15	30,000,000	13565/BUD- SP2D/2015	
11	23-Dec-15	23,513,500	13566/BUD- SP2D/2015	
12	23-Dec-15	6,827,000	13567/BUD- SP2D/2015	
Jumlah		621,650,396		
Jumlah Total		513,000,000	3,486,261,98	3,999,261,98
			2	2
				Jumlah UP + GU

- Bahwa pada tahun 2015 dinas sosial mendapatkan Uang Persediaan sebesar Rp. 513.000.000,- yang mana uang UP tersebut digunakan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH untuk membayar hutang kepada saksi AGUSTIAWAN sehingga seluruh PPTK kegiatan tidak mendapat uang panjar kegiatan.
- Bahwa kegiatan pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran langsung dikelola oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH bersama dengan terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun tanpa melibatkan saksi RYO GUNAWAN selaku PPTK kegiatan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran.
- Bahwa saksi EFFY YANTI selaku pembantu PPTK menjelaskan bahwa belanja riil atas kegiatan Adum tidak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa meminta bagian uang dari anggaran kegiatan yang dilaksanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kegiatan, tetapi saksi ABDULLAH hanya sanggup memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per- kegiatan.
- Bahwa saksi DEFRIZAL selaku PPTK kegiatan atas perintah terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dalam pembuatan SPJ terhadap anggaran yang dipergunakan untuk terdakwa pada tahun 2015 dibuat seolah-oleh telah terlaksana namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan.
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2015 terdapat ketidaksesuaian antara jumlah belanja barang dalam SPJ dengan realisasi riil belanja atas pos belanja sebagai berikut :

No	Pos belanja	Nilai SPJ	Nilai realisasi Belanja Riil	Selisih
1.	Belanja alat tulis kantor	84.363.500,00	67.512.088,00	16.851.412,00
2.	Belanja alat listrik dan elektronik	7.871.408,00	1.945.000,000	5.926.408,00

Halaman 37 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.220.000,00	13.040.000,00	5.180.000,00
4.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	66.100.000,00	56.100.000,00	10.000.000,00
5.	Belanja surat kabar/majalah	13.230.000,00	12.840.000,00	390.000,00
6.	Belanja jasa media propaganda	61.160.000,00	7.510.000,00	53.650.000,00
7.	Belanja jasa service	18.020.000,00	4.800.000,00	13.220.000,00
8.	Belanja penggantian suku cadang	24.850.000,00	6.000.000,00	18.850.000,00
9.	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
10.	Belanja cetak	86.980.500,00	69.564.682,00	17.415.818,00
11.	Belanja pengadaan	59.424.150,00	43.959.701,00	15.464.449,00
12.	Belanja makanan dan minuman harian	230.300.000,00	227.300.000,00	3.000.000,00
13.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	104.645.000,00	96.570.000,00	8.075.000,00
14.	Belanja makanan dan minuman rapat	41.285.000,00	39.585.000,00	1.700.000,00
15.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	543.584.200,00	485.531.200,00	58.053.000,00
16.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	675.541.950,00	515.859.370,00	159.682.580,00
17.	Belanja kursus pelatihan, sosialisasi, dan bimtek	75.000.000,00	21.000.000,00	54.000.000,00
18.	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	25.110.000,00	4.010.000,00	21.100.000,00
19.	belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00

Halaman 38 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR





20.	Belanja dokumentasi	15.569.500,00	12.822.000,00	2.747.500,00
21.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18.250.000,00	15.750.000,00	2.500.000,00
22.	Belanja penginapan	29.300.000,00	26.700.000,00	2.600.000,00
23.	Belanja transportasi	246.360.104,00	227.200.104,00	19.160.000,00
24.	Belanja tenaga ahli/instruktur narasumber	20.500.000,00	17.500.000,00	3.000.000,00
25	Pengembalian STS	0,00	143.054.538,00	143.054.538,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.521.165.312,00</b>	<b>2.116.153.683,00</b>	<b>405.011.629,00</b>

➤ Bahwa selisih yang didapatkan di tahun 2015 saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH gunakan sebagai berikut :

Keperluan Pribadi Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa.

1. Pembayaran angsuran hutang Bank Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa dengan rincian :

- Hutang Bank atas nama terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya ke Bank RIAU KEPRI Cabang Tanjung Balai Karimun dan uangnya diambil dari anggaran kegiatan Adum Dinas Sosial Kab. Karimun.
- Hutang Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa yang dipinjam atas nama saksi sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank RIAU KEPRI Cabang Tanjung Balai Karimun, uangnya juga diambil dari anggaran kegiatan Adum Dinas Sosial Kab. Karimun.

Sehingga total angsuran uang pinjaman bank terdakwa yang dibayarkan dari anggaran Adum setiap bulannya dari bulan Januari s/d Desember 2015 adalah sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dalam satu tahun selama tahun 2015 pengalokasian anggaran Adum untuk membayar pinjaman pribadi terdakwa adalah sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).

2. Pembayaran angsuran mobil pribadi Honda Civic bekas milik saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ada juga memakai

Halaman 39 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Adum untuk pembayaran uang muka mobil tersebut namun dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Untuk hitungan anggaran yang saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH pakai pada tahun 2015 hanya dari bulan Januari s/d Juli 2015 saja karena pada sekitar bulan Juli karena anggaran Defisit maka saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kredit mobil tersebut dan akhirnya saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH kembalikan kepada pihak delaer Automa yang berada di depan Hotel Golden Tanjung Balai Karimun.

3. Pembayaran angsuran sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH yang dengan angsuran sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari bulan Januari s/d April 2015 di Plaza Elektronik, kemudian pada bulan April tersebut juga saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH melunaskan sisa kredit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang juga saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ambil dari anggaran kegiatan Adum.
4. Angsuran pembayaran barang elektronik berupa Orgen merk Yamaha selama 6 bulan di Plaza Elektronik Tanjung Balai Karimun dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang juga saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ambil dari anggaran kegiatan Adum,
5. Pinjaman terdakwa selama tahun 2015 yang belum ada diganti maupun dikembalikan sampai sekarang ini sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. Jasa servis mobil pribadi terdakwa sebesar Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) di Bengkel Akeng Kampung Baru Tebing.
7. Pembelian Laptop untuk menjadi milik pribadi saksi ISKANDAR atas perintah dari Kepala Dinas yaitu Terdakwa dengan harga Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan setiap bulannya kepada saksi UMAR yang tinggal d daerah Tg. Batu, saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH lakukan transfer setiap bulannya ke rekening milik saksi UMAR tersebut atas perintah terdakwa sehingga dalam 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 jumlahnya adalah sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Halaman 40 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang yang dikirim setiap bulan atas perintah terdakwa dengan jumlah variatif antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Tembilahan dengan No. Rek : 1122108224 an. PUJI ASTUTI.
10. Pembelian tiket pesawat pribadi mertua saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada bulan Desember 2015.

Pembayaran untuk Keperluan Non-Budgeter.

1. Pengeluaran untuk pemberian dana bantuan bagi Wartawan yang meminta bantuan operasional ke Dinas Sosial Kab. Karimun dari Januari s/d Desember 2015 sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Upah tanda-tangan untuk para pegawai yang dipergunakan namanya untuk SPJ fiktif pada Tahun 2014, namun pembayaran dilakukan dengan mengalokasikan anggaran dari kegiatan Adum tahun 2015 dengan total uang yang dialokasikan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), untuk 2 (dua) orang yaitu saksi ISKANDAR dan Saksi RIDWAN,SE,Ak untuk 11 (sebelas) kegiatan.
3. Pembayaran tiket pesawat Terdakwa untuk perjalanan dinas selama tahun 2015 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), padahal sebelumnya uang untuk biaya dalam melakukan perjalanan dinas tersebut sudah diberikan utuh kepada terdakwa.
4. Pembelian gula dan kopi untuk keperluan kantor Dinas Sosial Kab Karimun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Pembuatan baju dinas untuk tiga orang yaitu untuk saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH, saksi ISKANDAR dan saksi ETI MARIATI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Pembayaran hutang untuk dana kegiatan saksi SYAFRUDDIN yang telah terpakai pada tahun 2014 dengan mengalokasikan anggaran kegiatan Adum tahun 2015 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
7. Pemberian uang untuk kegiatan MTQ sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada staf Kesra Setda Kab. Karimun.
8. Pembayaran hutang untuk dana kegiatan saksi M. AMIN yang juga telah terpakai pada tahun 2014, dan pengembaliannya dilakukan pada tahun

Halaman 41 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan mengalokasikan dana Adum sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

9. Upah tanda-tangan untuk saksi RIDWAN,SE.Ak untuk SPD Fiktif pada tahun 2014, yang dibayarkan dari alokasi anggaran Adum 2015, sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

10. Pembayaran pembelian air lori pada bulan Januari dan Februari 2015 sebesar Rp.1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 desember 2015 berdasarkan sistem aplikasi keuangan, yang digunakan oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH selaku Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp. 4.359.446.982,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga sisa dana pada akhir tahun 2015 sebesar Rp. 513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2015 saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH kembali melakukan peminjaman kepada saksi TONY CHARLES untuk menutupi anggaran kegiatan yang sudah terpakai oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa.
- Bahwa berdasarkan sistem aplikasi keuangan jumlah realisasi belanja periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sejumlah Rp. 4.466.983.484,00 (empat milyar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 139.174.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 1.13.01.00.00.5 tanggal 27 Januari 2016 mendapatkan alokasi dana belanja sejumlah Rp. 7.545.255.080,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan puluh rupiah) yang kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 yang merubah jumlah alokasi belanja yang semula Rp. 7.545.255.080,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan puluh rupiah) menjadi Rp.7.755.580.480,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima

Halaman 42 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan rician perubahan belanja sebagai berikut:

No.	Uraian Alokasi Belanja	DPA 2016 (Rp)	DPPA 2016 (Perubahan)
Belanja Tidak Langsung:			
1.	Belanja Pegawai	2.219.355.080,-	2.335.861.480,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung		2.219.355.080,-	2.335.861.480,-
Belanja Langsung :			
1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	1.582.900.000,-	1.849.325.000,-
2.	Penyusunan LAKIP Dinas Sosial	20.000.000,-	20.000.000,-
3.	Monev dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah dan Tidak Layak Huni dan KUBE	125.000.000,-	80.000.000,-
4.	Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan Sosial Anak	100.000.000,-	100.000.000,-
5.	Peningkatan Pembinaan Penyandang Disabilitas/ Orang dengan Kecacatan.	215.000.000,-	315.000.000,-
6.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial	185.000.000,-	185.000.000,-
7.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan korban Tindak Kekerasan	25.000.000,-	25.000.000,-
8.	Aksesibilitas Pelayanan Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial	125.000.000,-	125.000.000,-
9.	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	70.000.000,-	70.000.000,-
10.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	30.000.000,-	30.000.000,-
11.	Penyusunan RENJA	20.000.000,-	20.000.000,-
12.	Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum dan Taman Makam Pahlawan	100.000.000,-	100.000.000,-

Halaman 43 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Registrasi dan Pendataan Taman Pemakaman Bukan Umum	135.000.000,-	135.000.000,-
14.	Asistensi Pelayanan Pemakaman Masyarakat	185.000.000,-	135.000.000,-
15.	Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Rawan Sosial	75.000.000,-	75.000.000,-
16.	Bantuan Perlengkapan Anak Sekolah	100.000.000,-	95.244.000,-
17.	Asistensi Sosial Penyandang Masalah Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	304.000.000,-	221.150.000,-
18.	Dukungan Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam/ Sosial	100.000.000,-	170.000.000,-
19.	Tanggap Darurat Jenazah Terlantar/ Korban Bencana Alam/ Sosial	75.000.000,-	75.000.000,-
20.	Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH Kabupaten Karimun	325.000.000,-	390.000.000,-
21.	Fasilitas Pelaksanaan Program Aksesos 2016	75.000.000,-	75.000.000,-
22.	Fasilitas Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera	75.000.000,-	75.000.000,-
23.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rastra (Beras sejahtera) Kabupaten Karimun	200.000.000,-	200.000.000,-
24.	Pendataan / Updating data PMKS dan PSKS Kabupaten Karimun	139.000.000,-	139.000.000,-
25.	Pembinaan Lembaga Taruna Siaga Bencana	100.000.000,-	100.000.000,-
26.	Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	200.000.000,-	200.000.000,-
27.	Fasilitas Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan RTLH (Insentif Pendampingan RTLH)	50.000.000,-	25.000.000,-
28.	Asistensi Sosial dan Pembinaan Lembaga Veteran Kabu-	390.000.000,-	390.000.000,-

Halaman 44 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	paten Karimun		
29.	Sinergitas Program dan Pengembangan Potensi Ke-wirausahaan Karang Taruna Kabupaten Karimun	200.000.00,-	200.000.000,-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2)		5.325.900.000,-	5.419.719.000,-
JUMLAH BELANJA (1)+(2)		7.545.255.080,-	7.755.580.480,-

- Bahwa terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 52 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang menetapkan antara lain:

N O	NAMA	JABATAN
1	H. INDRA GUNAWAN, S.Sos	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa
2	ARDIYANSYAH	Bendahara Pengeluaran
3	NURSYAFIANI, S.Mn	Pembantu Bendahara Pengeluaran
4	EDDY ISWANTO	Pembantu Bendahara Pengeluaran
5	EFFY YANTI, S.Sos	Pembantu Bendahara Pengeluaran

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN
1	MUHAMMAD ZEN, SH, MA	1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran. 2. Kegiatan Pelayanan Sosial, Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial. 1. Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan. 2. Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan

Halaman 45 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Program Askesos 2016. 3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rastra (Beras Sejahtera) Kabupaten Karimun.
2	RIDWAN, SE, AK	1. Kegiatan Penyusunan RENJA. 2. Kegiatan Penyusunan RENSTRA. 3. Kegiatan Penyusunan LAKIP.
3	DUDY ISNANDAR, SE, MM	1. Kegiatan Verifikasi Monitoring dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kube.
4	DEFRIZAL, S.Sos	➤ Kegiatan Pembinaan Lembaga Taruna Siaga Bencana. ➤ Kegiatan Asistensi Sosial dan Pembinaan Lembaga Veteran Kabupaten Karimun. 1. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan
5	MOHAMMAD AMIN, S.TIS	1. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Kube. 2. Fasilitas Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Insentif Pendamping RTLH)
6	Hj. DARLISMA, S.Sos	1. Kegiatan Pelayanan Sosial dan perlindungan Orang dengan Kecacatan (Penyandang Disabilitas)
7	RITA AGUSTINA, ST, MM	1. Kegiatan Akseibilitas Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial

Halaman 46 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pusat Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial.</li><li>3. Kegiatan Asistensi Sosial Penyandang Masalah Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.</li></ol>
8	Nazirah, S. Psi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan Sosial dan anak.</li></ol>
9	Hj. JESMIWARTI	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah Terlantar/ Korban Bencana Alam/ Sosial</li></ol>
10	Drs. SYAFRUDIN ABDUL ROCHIM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan Bantuan Ibu Hamil Rawan Sosial</li><li>2. Kegiatan Bantuan Perlengkapan Anak Sekolah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)</li><li>3. Kegiatan dukungan operasional Tanggap Darurat Bencana Alam/ Sosial</li><li>4. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)</li><li>5. Kegiatan Pendataan/ Updating Data PMKS dan PSKS Kabupaten Karimun</li></ol>
11	ABDULLAH, S.Pd	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan Sinergisitas Program dan Pengembangan Potensi Kewirausahaan Karang taruna Kabupaten Karimun</li></ol>
12	Drs. ZUKRI, MM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Makam Pahlawan (TMP)</li><li>2. Kegiatan Regristasi Pendataan Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU)</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan Asistensi Pelayanan</li></ol>

Halaman 47 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemakaman Masyarakat.
--	-----------------------

- Bahwa pada Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan Rp.1.553.423.382,00  
Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 492.199.526,00  
Selisih Rp1.061.223.856,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.000.000,00
2	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.450.000,00
3	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	1.100.000,00
4	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.500.000,00
5	5.2.2.03.02	Belanja Air	4.652.000,00
6	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	640.000,00
7	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Media Propaganda	60.000.000,00
8	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.000.000,00
9	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.000.000,00
10	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	54.600.000,00
11	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.000.000,00
12	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.675.000,00
13	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.152.700,00
14	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	572.890.156,00
15	5.2.2.17.01	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek	72.000.000,00
16	5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.564.000,00
17	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.000.000,00
JUMLAH			1.061.223.856,00

ahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu antara lain :

Halaman 48 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
  - Terdapat perbedaan antara nilai SPJ dan nilai realisasi belanja pada bukti pendukung yang berbeda.
  - Terdapat pengeluaran atas belanja barang dan belanja perjalanan dinas yang fiktif.
  - Adanya mark – up nilai belanja barang yang di SPJ kan.
- Bahwa saksi Effy Yanti, S.Sos selaku Pembantu PPTK menyatakan bahwa untuk penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, untuk mempertanggung jawabkan penggunaan anggarannya, biasanya cara yang dilakukan adalah membuat sendiri (merekayasa) bukti-bukti atas belanja yang dilakukan dan kemudian melampirkan bukti tersebut kedalam SPJ sehingga bukti pertanggung jawaban dalam SPJ sebenarnya hanya bukti belanja fiktif.
- Bahwa pada Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.147.177.357,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.103.651.461,00
Selisih	Rp. 43.525.896,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00
2	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00
3	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.455.500,00
4	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	3.157.896,00
5	5.2.2.15.02	Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya	9.912.500,00
JUMLAH			43.525.896,00

Selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu dikarenakan :

- a. Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
- b. Terdapat pengeluaran atas belanja perjalanan dinas yang fiktif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban tindak kekerasan tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.10.050.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp. 9.300.000,00
Selisih	Rp. 750.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00
2	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	250.000,00
JUMLAH			750.000,00

- Bahwa Selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
- Bahwa Pada Kegiatan Bantuan Ibu Hamil Rawan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 74.100.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp. 3.325.000,00
Selisih	Rp. 70.775.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.0	Belanja Alat Tulis Kantor	426.250,00
1			
2	5.2.2.01.0	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	310.000,00
3	5.2.2.03.1	Belanja Jasa Media Propaganda	500.000,00
4	5.2.2.06.0	Belanja Cetak	182.500,00
5	5.2.2.06.0	Belanja Penggandaan	698.750,00
6	5.2.2.11.0	Belanja Makanan dan Minuman	420.000,00
7	5.2.2.15.0	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.200.000,0
8	5.2.2.15.0	Belanja Perjalanan Dinas Luar	9.550.000,00

Halaman 50 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR





No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
	2	Daerah	
9	5.2.2.22.0	Belanja Transportasi	5.800.000,00
10	5.2.2.03.1	Belanja Dokumentasi	637.500,00
11	5.2.2.11.0	Belanja Makan dan Minum	3.300.000,00
12	5.2.2.23.0	Honorarium Narasumber	1.000.000,00
13	5.2.2.24.0	Belanja Pengadaan Barang	33.750.000,0
	1	yang diserahkan kepada masyarakat	0
JUMLAH			70.775.000,0
			0

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran atas belanja yang fiktif.
- Bahwa pada Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 356.217.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp. 322.217.000,00
Selisih	Rp. 34.000.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
		Belanja	
1	5.2.2.22.01	Transportasi	34.000.000,00
JUMLAH			34.000.000,00

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran atas belanja transportasi yang fiktif.
- Pada Kegiatan Fasilitasi program Askesos tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.74.266.250,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.53.921.250,00
Selisih	Rp.20.365.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.365.000,0 0
JUMLAH			20.365.000,0 0

➤ Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu dikarenakan :

- Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
- Terdapat pengeluaran atas belanja perjalanan dinas yang fiktif.

➤ Bahwa pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rastra (Beras Sejahtera) TA 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.198.588.750,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.103.658.250,00
Selisih	Rp. 94.900.500,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00
2	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00
3	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.365.000,0 0
4	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.535.500,0 0
5	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00
6	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00
JUMLAH			94.900.500,0 0

➤ Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu dikarenakan :

- Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.

Halaman 52 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



b. Terdapat pengeluaran atas belanja perjalanan dinas yang fiktif.

- Bahwa pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Taruna Siaga Bencana TA 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 84.987.500,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp. 70.287.500,00
Selisih	Rp.14.700.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.950.000,00
2	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	4.750.000,00
JUMLAH			14.700.000,0
			0

Selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.

- Bahwa pada Kegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 198.172.500,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp. 147.500.000,00
Selisih	Rp. 50.672.500,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.672.500,00
JUMLAH			50.672.500,00

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu dikarenakan :

- Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
- Terdapat pengeluaran atas belanja perjalanan dinas yang fiktif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kegiatan Asistensi sosial dan Pembinaan Lembaga Veteran tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 372.253.750,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp. 344.253.750,00
Selisih	Rp. 28.000.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00
2	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00
3	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00
4	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00
JUMLAH			28.000.000,00

Selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.

- Bahwa perbedaan antara nilai SPJ dengan uang yang diterima oleh PPTK dari Bendahara disebabkan :

Dalam membuat realisasi belanja, Bendahara Pengeluaran meminta PPTK untuk membuat BKU Manual atas rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh PPTK sedangkan kegiatan tersebut belum dilaksanakan PPTK sehingga realisasi dan bukti pendukung kegiatan disesuaikan dengan BKU Manual yang telah dibuat dan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran.

BKU Manual yang dibuat oleh PPTK kemudian diinput kedalam Aplikasi SIMDA sebagai dasar pengajuan pencairan GU ke Bagian Keuangan Kabupaten Karimun.

Atas pencairan GU atas SPJ Kegiatan tidak sepenuhnya diberikan kepada PPTK dan terdapat juga pencairan GU atas SPJ kegiatan tanpa sepengetahuan PPTK.

- Bahwa saksi MUHAMMAD ZEN selaku PPTK kegiatan Administrasi Umum tahun anggaran 2016 menjelaskan penggunaan anggaran Adum tahun 2016 tidak semuanya sudah sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan,

Halaman 54 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat belanja-belanja yang telah pertanggungjawabkan namun tidak sesuai pengeluaran riil belanja dikarenakan Kepala Dinas Sosial yaitu Terdakwa ada menggunakan anggaran kegiatan ADUM untuk kepentingan pribadinya berupa pembayaran pinjaman bank, pembayaran kredit mobil, pembayaran Saksi IJAL, pembayaran Saksi DEN, dan pemberian uang kepada wartawan.

- Bahwa saksi Syafruddin selaku PPTK kegiatan tahun 2016 tidak menerima uang panjar yang bersumber dari uang persediaan tahun anggaran 2016 dan uang yang diberikan oleh bendahara tidak sesuai dengan yang diajukan / diSPJ dalam BKU.
- Bahwa di tahun 2016 Uang persediaan dicairkan sebesar Rp. 384.750.000,00 dan sisanya digunakan untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga dan PPTK kegiatan tidak ada menerima uang panjar untuk kegiatan yang bersumber dari dana Uang persediaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun bersama-sama dengan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. Karimun yang menyalahgunakan uang anggaran kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Karimun seperti memotong anggaran belanja dan jasa untuk SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun yang merupakan anggaran belanja dalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para PPTK pada masing-masing bidang yang ada pada SKPD dinas sosial Kab Karimun yang mana pemotongan anggaran belanja PPTK yang dilaksanakan bersumber dari kegiatan Administrasi Umum yang dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH seperti untuk pembayaran hutang, pembayaran pinjaman bank pribadi dan kebutuhan pribadi lainnya serta dalam membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ yang fiktif seperti nota fiktif atas belanja yang tidak ada dilakukan dan bukti fiktif atas perjalanan dinas baik dalam maupun luar yang hanya menggunakan nama-nama pegawai di dalam lingkungan Dinas Sosial Kab. Karimun, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan:

Pasal 122 ayat (6) dan (9) dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pasal 122

Halaman 55 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

## Pasal 132

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 59 ayat (5), (6) dan ayat (8), Pasal 68 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah Kab. Karimun No. 19 Tahun 2007, Tentang pokok-pokok Pengelolaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

## Pasal 59

(5) SKPD dilarang mengeluarkan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

(6) Pengeluaran dalam ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat / mendesak yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan / atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(8) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

## Pasal 68

(1) Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Dan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH dalam pengelolaan anggaran belanja dan jasa SKPD dins sosial kab karimun tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016 mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 3.170.740.431 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), hal ini sesuai Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah dari Badan Pengawasan Keuangan Keuangan dan Pembangunan

Halaman 56 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-4186/PW28/5/2017  
Tanggal 19 Desember 2017.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo 64 ayat (1) KUHPidana.

## SUBSIDIAR :

----- Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : KPTS.01/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 terdakwa bertindak sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 15 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 37 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 52 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 bersama-sama dengan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 (dalam penuntutan terpisah), maupun bertindak sendiri-sendiri pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016,

Halaman 57 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada tahun anggaran 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 1.13.01.15.09.5 tanggal 06 Januari 2014 mendapatkan alokasi dana belanja sejumlah Rp. 5.931.008.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah) yang kemudian pada tanggal 01 September 2014 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 yang merubah jumlah alokasi belanja yang semula Rp. 5.931.008.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah) menjadi Rp.7.352.075.076,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah) dengan rician perubahan belanja sebagai berikut:

No.	Uraian Alokasi Belanja	DPA 2014 (Rp)	DPPA 2014 (Perubahan)
Belanja Tidak Langsung:			
1.	Belanja Pegawai	2.163.422.750,-	2.469.489.826,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung		2.163.422.750,-	2.469.489.826,-
Belanja Langsung :			
1.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	922.400.000,-	1.322.400.000,-
2.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,-	80.000.000,-
3.	Sosialisasi dan Bimtek	0,-	75.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Reguler Service Provider UPPKH Kabupaten Karimun		
4.	Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)	0,-	100.000.000,-
5.	Penyusunan LAKIP	15.000.000,-	15.000.000,-
6.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penang- gulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak huni dan KUBE	425.000.000,-	425.000.000,-
7.	Verifikasi dan Penetapan Penerima Hibah Pem- bangunan / Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS TA 2015	200.000.000,-	200.000.000,-
8.	Fasilitasi Monitoring Eva- luasi dan Pelaporan Pe- nanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Money) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Sosialisasi Terhadap Penerima RTLH)	75.000.000,-	150.000.000,-
9.	Fasilitasi Monitoring Eva- luasi dan Pelaporan Pe- nanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Insentif Pendamping RTLH)	70.000.000,-	70.000.000,-
10.	Fasilitasi Monitoring Eva- luasi dan Pelaporan Pe- nanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelom-pok Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping Kube)	75.000.000,-	75.000.000,-
11.	Fasilitasi Monitoring Eva- luasi dan Pelaporan Pe-	70.000.000,-	70.000.000,-

Halaman 59 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	nanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap Pendamping Kube)		
12.	Dukungan Operasional Pembangunan Rumah Suku Duane Kecamatan Kundur	0,-	150.000.000,-
13.	Pelayanan Sosial dan Perlindungan Orang dengan Kecacatan	76.000.000,-	206.000.000,-
14.	Pembinaan Anak jalanan (Sharing dengan Provinsi Kepri)	93.000.000,-	93.000.000,-
15.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Perlindungan Sosial Anak	125.000.000,-	125.000.000,-
16.	Pelayanan dan Rehabilitasi perlindungan Sosial Anak	51.000.000,-	51.000.000,-
17.	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	26.000.000,-	26.000.000,-
18.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan	25.000.000,-	25.000.000,-
19.	Bantuan Ibu Hamil Rawan Sosial	100.000.000,-	100.000.000,-
20.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Kecamatan Se-Kabupaten Karimun	120.000.000,-	120.000.000,-
21.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	100.000.000,-	100.000.000,-
22.	Penyebarnya Informasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karimun	300.000.000,-	300.000.000,-
23.	Penyusunan Renja	15.000.000,-	15.000.000,-
24.	Sosialisasi dan Publikasi	25.000.000,-	25.000.000,-



	Kegiatan SKPD melalui Pameran		
25.	Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum dan Taman Makam Pahlawan	150.000.000,-	150.000.000,-
26.	Pengadaan Sarana Keranda (Asongan) Jenazah untuk Masyarakat (Dana Community Development)	50.000.000,-	170.000.000,-
27.	Pembinaan Kapasitas Lembaga Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat	120.130.250,-	120.130.250,-
28.	Bantuan Perlengkapan Anak sekolah RTSM	150.000.000,-	150.000.000,-
29.	Dukungan Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam/ Sosial	100.000.00,-	140.000.000,-
30.	Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH Kabupaten Karimun	179.055.000,-	204.055.000,-
31.	Tanggap Darurat Jenazah Terlantar	50.000.000,-	50.000.000,-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2)		3.667.685.250,-	4.882.585.250,-
JUMLAH BELANJA (1)+(2)		5.931.008.000,-	7.352.075.076,-

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 15 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang / Jasa Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang menetapkan antara lain:

No	Nama	Jabatan
	H. INDRA GUNAWAN, S. SOS	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang / Jasa
	ARDIYANSAH	Bendahara Pengeluaran
	EFFY YANTI, S.SOS	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ISKANDAR ZULKARNAIN	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Pembukuan)
	ETI MARIATI	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Daftar Gaji)

- Bahwa tugas terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dalam pengelolaan anggaran kegiatan pada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun berdasarkan Pasal 10 Permendagri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 Ayat (3) huruf "c" mempunyai tugas:

- Menyusun RKA-SKPD.
- Menyusun DPA-SKPD.
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan.
- Menandatangani SPM.
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- Mengawasi pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN
----	------	---------------

Halaman 62 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR





1	Hj.Mitrayati, S.Sos	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor
2	Hj. Jesmiwati	Kegiatan Penyusunan LAKIP Kegiatan Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 3. Kegiatan Penyusunan RENJA
3	Dudy Isnandar, SE, MM	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dan kube Kegiatan verifikasi dan penetapan penerima hibah pembangunan/rehabilitasi RTLH dan kube PMKS tahun anggaran 2015
4	Prihandayani Bayusari,SE, AK	Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (monev) rehab rumah tidak layak Huni (RTLH) insentif pendamping RTLH). Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (monev) rehab rumah tidak layak Huni (RTLH) sosialisasi terhadap penerima RTLH)
5	Mohammad Amin, S.TIS	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) kelompok usaha bersama kube insentif pendamping kube Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (monev) rehab rumah tidak layak Huni (RTLH) sosialisasi terhadap pendamping kube Kegiatan pembinaan kapasitas lembaga tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.
6	Hj. Darlisma, S.Sos	Kegiatan Pelayanan Sosial dan perlindungan Orang dengan Kecacatan (ODK)
7	Rita Agustina, ST,	Pembinaan anak jalanan (sharing dengan Provinsi Kep. Riau)

Halaman 63 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



	MM	Kegiatan penyebaran informasi pembangunan kesejahteraan sosial kabupaten karimun Kegiatan sosialisasi dan publikasi kegiatan SKPD melalui pameran dan pawai pembangunan
8	Nazirah, S. Psi	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan Sosial dan anak.
9	Aris Tiyanto,SE	Kegiatan pelayanan sosial, perlindungan dan rehabilitasi tuna sosial Kegiatan pelayanan sosial, perlindungan dan rehabilitasi pekerja migran dan korban tindak kekerasan.
10	Herianto, S.ST	Pelayanan sosial lanjut Usia
11.	Drs. Syafudin Abdul Rochim	Kegiatan bantuan ibu hamil rawan sosial Kegiatan bantuan perlengkapan anak sekolah RTSM Kegiatan dukungan Operasional tanggap darurat bencana alam/social
12	Abdullah, S.Pd	Kegiatan bimbingan teknis peningkatan kualitas tenaga kesejahteraan sosial (TKSK) kecamatan se-Kabupaten Karimun
13	Drs. Zukri, MM	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kegiatan pengadaan sarana keranda (asongan) jenazah untuk masyarakat (dana community development)
14.	Zureskhan Karimunba, SE	Kegiatan dukungan operasional UPPKH Kabupaten Karimun
15.	Djunaidi Ama, Pd	Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun No. 04 Tahun 2014 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) di Lingkungan Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun Anggaran 2014 pada Kegiatan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran TA 2014 ditunjuk PPTK yaitu saksi Hj. MITRAYATI, S. Sos

Halaman 64 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



namun hanya selama 6 (enam) bulan karena pada bulan Juni 2014 saksi mengundurkan diri sebagai PPTK kegiatan Adum dengan alasan saksi Hj. MITRAYATI, S. Sos merasa bahwa pengelolaan Adum tidak sebagaimana mestinya karena semua kegiatan dalam kegiatan Adum tersebut dilaksanakan sendiri oleh bendahara pengeluaran yaitu saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH atas perintah Kepala Dinas Sosial saat itu yaitu terdakwa, Saksi Hj. MITRAYATI, S. Sos tidak mengetahui dan tidak ada mengerjakan kegiatan sebagaimana dalam RKA pelaksanaan Adum, karena seluruh penggunaan anggaran dan kegiatan seluruhnya dilaksanakan oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH termasuk pembuatan SPJ-nya. Karena saksi Hj. MITRAYATI, S.Sos merasa sebagai PPTK kegiatan Adum kemudian, pada sekitar bulan Juni 2014 saksi Hj. MITRAYATI, S.Sos meminta SPJ untuk kegiatan Adum yang dilakukan oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH, namun hingga bulan Juni 2014 saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH tidak memberikannya, kemudian saksi Hj. MITRAYATI, S.Sos membuat surat pengunduran diri selaku PPTK Adum dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas Sosial Kab.Karimun yaitu terdakwa.

➤ Bahwa mekanisme pencairan/penggunaan dana yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten karimun tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Mekanisme pembayaran langsung (LS) yaitu digunakan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu atau untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.
- Mekanisme Uang Persediaan (UP), yaitu Bendahara pengeluaran mempersiapkan surat permintaan pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM), setelah SPM-UP ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Yaitu Kepala Dinas sosial Kabupaten Karimun, selanjutnya Bendahara pengeluaran membawa ke Bendahara Umum Daerah (BUD), /Kuasa BUD di BPKAD Kabupaten Karimun, dan kemudian Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan pencairan dana dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang memerintahkan Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun untuk mencairkan uang kepada Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Karimun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanisme ganti uang (GU) apabila uang kas atas penerimaan UP telah habis dipergunakan maka akan diajukan kembali penggantiannya dengan pencairan Ganti Uang (GU) dengan mekanisme :

PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) membuat daftar transaksi belanja atas kegiatan yang belum terlaksana ke dalam BKU Manual untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Bendahara pengeluaran meng-entry daftar transaksi belanja atas kegiatan yang telah dibuat PPTK di BKU (Buku Kas Umum) Manual kedalam aplikasi SIMDA Keuangan.

Dari aplikasi SIMDA keuangan Bendahara pengeluaran membuat Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah uang Persediaan atas SPJ dan laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional).

Bendahara Pengeluaran mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang (SPP-GU), Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) dan laporan pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah uang persediaan atas SPJ (SPJ Belanja) yang selanjutnya diverifikasi oleh pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

SPP-GU dan SPM-GU serta surat pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) yang telah lengkap ditandatangani diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/ kuasa BUD yaitu di BPKAD Kabupaten Karimun.

Kuasa BUD melakukan pencairan dana dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) yang memerintahkan Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun mencairkan dana kepada Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

- Bahwa berdasarkan arsip register penerbitan dokumen SP2D untuk pencairan anggaran belanja barang dan jasa melalui UP dan GU kepada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 yang ada pada bagian keuangan (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Karimun, sebagai berikut :

NO.	Bulan	TANGGAL	JENIS		NO. SP2D	KETERANGAN
			UP	GU		
I	Januari					
1		16-Jan-14	350,000,00 0	-	0108/BUD- SP2D/201 4	

Halaman 66 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	Februar i					
1		14-Feb-14		24,181,600	0686/BUD- SP2D/201 4	
2		14-Feb-14		14,265,000	0687/BUD- SP2D/201 4	
3		14-Feb-14		16,824,500	0688/BUD- SP2D/201 4	
4		14-Feb-14		2,675,000	0689/BUD- SP2D/201 4	
5		14-Feb-14		65,717,500	0690/BUD- SP2D/201 4	
6		14-Feb-14		77,780,000	0691/BUD- SP2D/201 4	
7		14-Feb-14		3,385,000	0692/BUD- SP2D/201 4	
8		14-Feb-14		22,309,000	0693/BUD- SP2D/201 4	
9		14-Feb-14		575,000	0694/BUD- SP2D/201 4	
10		14-Feb-14		7,738,750	0695/BUD- SP2D/201 4	
11		14-Feb-14		13,317,500	0696/BUD- SP2D/201 4	
12		26-Feb-14		27,260,000	0893/BUD- SP2D/201 4	
13		26-Feb-14		18,390,000	0894/BUD- SP2D/201 4	
14		26-Feb-14		19,257,500	0895/BUD- SP2D/201 4	
15		26-Feb-14		9,695,500	0896/BUD- SP2D/201 4	
16		26-Feb-14		10,464,000	0897/BUD- SP2D/201 4	
17		26-Feb-14		52,232,500	0898/BUD-	

Halaman 67 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					SP2D/201 4	
18		26-Feb-14		10,049,000	0899/BUD- SP2D/201 4	
19		26-Feb-14		78,445,500	0900/BUD- SP2D/201 4	
20		26-Feb-14		50,301,000	0901/BUD- SP2D/201 4	
21		26-Feb-14		4,085,000	0902/BUD- SP2D/201 4	
22		26-Feb-14		21,370,000	0903/BUD- SP2D/201 4	
23		26-Feb-14		2,450,000	0904/BUD- SP2D/201 4	
24		26-Feb-14		1,250,000	0905/BUD- SP2D/201 4	
25		26-Feb-14		25,038,750	0906/BUD- SP2D/201 4	
26		26-Feb-14		3,775,000	0907/BUD- SP2D/201 4	
		Jumlah		<b>582,832,600</b>		

III	Maret					
1		21-Mar-14		4,892,500	1790/BUD- SP2D/2014	
2		21-Mar-14		58,873,800	1791/BUD- SP2D/2014	
3		21-Mar-14		15,685,000	1792/BUD- SP2D/2014	
4		21-Mar-14		14,416,750	1793/BUD- SP2D/2014	
5		21-Mar-14		4,477,500	1794/BUD- SP2D/2014	
6		21-Mar-14		24,740,000	1795/BUD- SP2D/2014	
7		21-Mar-14		4,998,000	1796/BUD- SP2D/2014	
8		21-Mar-14		20,889,500	1797/BUD- SP2D/2014	
9		21-Mar-14		9,796,000	1798/BUD- SP2D/2014	
10		21-Mar-14		8,755,000	1799/BUD- SP2D/2014	
11		21-Mar-14		775,000	1800/BUD- SP2D/2014	
12		21-Mar-14		20,285,000	1801/BUD- SP2D/2014	

Halaman 68 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13		21-Mar-14		10,225,000	1802/BUD-SP2D/2014	
14		21-Mar-14		6,250,000	1803/BUD-SP2D/2014	
15		21-Mar-14		19,414,500	1804/BUD-SP2D/2014	
16		21-Mar-14		7,888,750	1805/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		232,362,300		
IV	April					
1		28-Apr-14		2,220,000	2929/BUD-SP2D/2014	
2		28-Apr-14		10,970,000	2930/BUD-SP2D/2014	
3		28-Apr-14		11,425,000	2931/BUD-SP2D/2014	
4		28-Apr-14		2,350,000	2932/BUD-SP2D/2014	
5		28-Apr-14		475,000	2933/BUD-SP2D/2014	
6		28-Apr-14		9,097,500	2934/BUD-SP2D/2014	
7		28-Apr-14		9,333,750	2935/BUD-SP2D/2014	
8		28-Apr-14		88,885,592	2936/BUD-SP2D/2014	
9		28-Apr-14		83,136,100	2937/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		217,892,942		
V	Mei					
1		28-May-14		50,644,000	4384/BUD-SP2D/2014	
2		28-May-14		18,895,000	4385/BUD-SP2D/2014	
3		28-May-14		62,902,500	4386/BUD-SP2D/2014	
4		28-May-14		14,050,000	4387/BUD-SP2D/2014	
5		28-May-14		15,712,500	4388/BUD-SP2D/2014	
6		28-May-14		16,943,900	4389/BUD-SP2D/2014	
7		28-May-14		26,000,000	4390/BUD-SP2D/2014	
8		28-May-14		15,085,000	4391/BUD-SP2D/2014	
9		28-May-14		1,050,000	4392/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		221,282,900		
VI	Juni					
1		-	-	-	-	Selama bln Juni tidak ada Pengajuan & Pencairan GU
VII	Juli					
1		02-Jul-14		21,170,000	6201/BUD-SP2D/2014	
2		02-Jul-14		127,610,545	6202/BUD-SP2D/2014	

Halaman 69 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3		02-Jul-14		8,325,000	6203/BUD-SP2D/2014	
4		02-Jul-14		12,400,000	6204/BUD-SP2D/2014	
5		02-Jul-14		16,758,000	6205/BUD-SP2D/2014	
6		02-Jul-14		35,173,000	6206/BUD-SP2D/2014	
7		02-Jul-14		1,425,000	6207/BUD-SP2D/2014	
8		10-Jul-14		32,335,000	6597/BUD-SP2D/2014	
9		10-Jul-14		2,225,000	6598/BUD-SP2D/2014	
10		10-Jul-14		9,650,000	6599/BUD-SP2D/2014	
11		10-Jul-14		3,595,000	6600/BUD-SP2D/2014	
12		10-Jul-14		67,675,000	6601/BUD-SP2D/2014	
13		10-Jul-14		12,665,000	6602/BUD-SP2D/2014	
14		10-Jul-14		28,661,000	6603/BUD-SP2D/2014	
15		10-Jul-14		475,000	6604/BUD-SP2D/2014	
16		10-Jul-14		14,266,789	6605/BUD-SP2D/2014	
17		10-Jul-14		38,802,900	6606/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		433,212,234		
VIII	Agustus					
1		22-Aug-14		27,530,000	8516/BUD-SP2D/2014	
2		22-Aug-14		83,005,000	8517/BUD-SP2D/2014	
3		22-Aug-14		52,916,500	8518/BUD-SP2D/2014	
4		22-Aug-14		24,282,500	8519/BUD-SP2D/2014	
5		22-Aug-14		10,135,000	8520/BUD-SP2D/2014	
6		22-Aug-14		12,420,000	8521/BUD-SP2D/2014	
7		22-Aug-14		4,250,000	8522/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		214,539,000		
IX	Septem ber					
1		30-Sep-14		7,539,000	9855/BUD-SP2D/2014	
2		30-Sep-14		11,341,000	9856/BUD-SP2D/2014	
3		30-Sep-14		35,370,000	9857/BUD-SP2D/2014	
4		30-Sep-14		23,850,000	9858/BUD-SP2D/2014	
5		30-Sep-14		129,134,600	9859/BUD-SP2D/2014	
6		30-Sep-14		60,365,000	9860/BUD-SP2D/2014	
7		30-Sep-14		11,851,500	9861/BUD-SP2D/2014	

Halaman 70 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah		279,451,100		
X	Oktober					
1		06-Oct-14		203,867,000	10209/BUD - SP2D/2014	
2		06-Oct-14		30,805,000	10210/BUD - SP2D/2014	
3		06-Oct-14		20,605,000	10211/BUD - SP2D/2014	
4		16-Oct-14		10,692,000	10662/BUD - SP2D/2014	
5		16-Oct-14		9,425,000	10663/BUD - SP2D/2014	
6		16-Oct-14		33,860,000	10664/BUD - SP2D/2014	
7		16-Oct-14		65,345,000	10665/BUD - SP2D/2014	
8		16-Oct-14		63,915,000	10666/BUD - SP2D/2014	
9		16-Oct-14		15,258,053	10667/BUD - SP2D/2014	
10		16-Oct-14		950,000	10668/BUD - SP2D/2014	
11		16-Oct-14		30,878,000	10669/BUD - SP2D/2014	
12		16-Oct-14		92,985,000	10670/BUD - SP2D/2014	
		Jumlah		578,585,053		
XI	Novem ber					
1		17-Nov- 14		20,691,000	11924/BUD - SP2D/2014	
2		17-Nov- 14		30,186,000	11925/BUD - SP2D/2014	
3		17-Nov- 14		25,825,400	11926/BUD - SP2D/2014	
4		17-Nov- 14		36,640,100	11927/BUD - SP2D/2014	
5		17-Nov- 14		37,986,500	11928/BUD - SP2D/2014	
6		17-Nov- 14		4,938,000	11929/BUD - SP2D/2014	
7		17-Nov- 14		23,015,000	11930/BUD - SP2D/2014	
8		17-Nov-		29,175,000	11931/BUD	

Halaman 71 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		14			- SP2D/2014	
9		17-Nov-14		11,408,000	11932/BUD -	
10		17-Nov-14		9,541,500	11933/BUD -	
11		17-Nov-14		29,459,000	11934/BUD -	
12		17-Nov-14		23,195,900	11935/BUD -	
13		17-Nov-14		3,557,500	11936/BUD -	
14		17-Nov-14		64,018,700	11937/BUD -	
		Jumlah		349,637,600	SP2D/2014	
XII	Desem-ber					
1		09-Dec-14		28,009,474	13185/BUD -	
2		09-Dec-14		16,852,421	13186/BUD -	
3		09-Dec-14		900,000	13187/BUD -	
4		09-Dec-14		63,640,000	13188/BUD -	
5		09-Dec-14		6,667,500	13189/BUD -	
6		09-Dec-14		21,536,000	13190/BUD -	
7		09-Dec-14		9,652,000	13191/BUD -	
8		09-Dec-14		37,087,400	13192/BUD -	
9		09-Dec-14		26,374,900	13193/BUD -	
10		09-Dec-14		95,357,000	13194/BUD -	
11		12-Dec-14		199,054,000	13419/BUD -	
12		12-Dec-14		1,265,500	13420/BUD -	
13		12-Dec-14		550,000	13421/BUD -	
14		12-Dec-14		36,536,560	13422/BUD -	
15		16-Dec-		27,104,400	13539/BUD	

Halaman 72 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



	14			-	
	Jumlah		570,587,155	SP2D/2014	
Jumlah Total	350,000,000	3,097,550,284	3,447,550,284	Jumlah UP + GU	

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Sosial Kabupaten Karimun mendapat Uang Persediaan sebesar Rp. 350.000.000,- yang mana uang tersebut digunakan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH untuk membayar hutang kepada saksi TONY CHARLES and saksi AGUSTIAWAN dengan bunga yang cukup besar serta memberikan uang Panjar kepada 4 (empat) bidang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana dimintakan pertanggungjawaban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

No	Nama Bidang / Kegiatan	Pemberian & Pembebanan SPJ (Rp)		
		Pemberian Riil	Beban Anggaran SPJ Fiktif	Jumlah
1	Bidang Kesejahteraan Sosial	25.000.000	25.000.000	50.000.000
2	Bidang Pelayanan Sosial	25.000.000	25.000.000	50.000.000
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	25.000.000	25.000.000	50.000.000
4	Bidang Pemakaman	25.000.000	25.000.000	50.000.000
5	Kegiatan Adum	30.000.000	120.000.000	150.000.000
Total		130.000.000	220.000.000	350.000.000

dan sisa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang panjar kegiatan administrasi umum perkantoran.

- Bahwa saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH mendapatkan Pinjaman dari Saksi Agustiawan selama bulan Desember 2014 yang diberikan secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 1.272.752.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi AGUSTIAWAN dengan cara tunai ataupun ditransfer melalui rekening giro yang saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH buka dan atas nama sendiri.
- Bahwa saksi EFFY YANTI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen) dalam laporan SPJ kegiatan administrasi Umum tahun 2014 tidak sesuai antara yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ, terdapat SPJ perjalanan dinas fiktif dan bukti belanja fiktif, serta ada mark up untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan BKU aplikasi dan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH meminta kepada saksi EFFY YANTI untuk dibuatkan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran ATK pengadaan, cetak, peralatan kebersihan dan materai.

- Bahwa pada Kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp1.136.573.697,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp 325.740.647,00
Selisih	Rp 810.833.050,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.0 1	Belanja Alat Tulis Kantor	41.600.000,00
2	5.2.2.01.0 3	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.000.000,00
3	5.2.2.01.0 4	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00
4	5.2.2.01.0 5	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.600.000,00
5	5.2.2.01.0 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	42.000.000,00
6	5.2.2.03.0 1	Belanja Telepon	195.750,00
7	5.2.2.03.0 5	Belanja Surat Kabar/ Majalah	250.000,00
8	5.2.2.05.0 1	Belanja Jasa Service	9.000.000,00
9	5.2.2.05.0 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.500.000,00
10	5.2.2.06.0 1	Belanja Cetak	30.000.000,00
11	5.2.2.06.0 2	Belanja Penggandaan	11.850.000,00
12	5.2.2.08.0 1	Belanja Sewa Mobilitas Darat	12.000.000,00
13	5.2.2.11.0 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.300.000,00
14	5.2.2.15.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.254.400,00
15	5.2.2.15.0 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	480.482.900,00

Halaman 74 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	5.2.2.17.0 1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	42.800.000,00
Jumlah			810.833.050,0 0

- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi SYAFRUDDIN, saksi ABDULLAH selaku Kepala Bidang untuk membuat SPJ kegiatan dari uang panjar yang diterima sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menjadi SPJ sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selama tahun 2014 kegiatan yang tidak diserahkan pencairan anggarannya oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH namun SPJ yang dibuat sesuai dengan nilai SP2D atas kegiatan yang dilakukan dan pertanggungjawaban tidak sama atau fiktif karena saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH tidak memberikan anggaran kegiatan sesuai dengan yang diajukan.
- Bahwa Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Reguler Service Provider UPPKH pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun terdapat perbedaan antara Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp74.997.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp55.098.000,00
Selisih	Rp19.899.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.0 1	Belanja Cetak	185.000,00
2	5.2.2.15.0 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.997.000,00
3	5.2.2.15.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.317.000,00
4	5.2.2.07.0 5	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00
Jumlah			19.899.000,00

➤  
B

ahwa Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp96.859.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp58.411.500,00
Selisih	Rp38.447.500,00

Halaman 75 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

N o	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	437.500,00
2	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.490.000,00
3	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	460.000,00
4	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	21.060.000,00
5	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung Pertemuan	3.000.000,00
6	5.2.2.26.01	Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga	6.000.000,00
Jumlah			38.447.500,00

Pada Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan KUBE TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp380.721.900,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp113.447.900,00
Selisih	Rp267.274.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.980.000,00
2	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00
3	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	11.200.000,00
4	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	46.500.000,00
5	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.050.000,00
6	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Mobilitas Darat	1.000.000,00
7	5.2.2.08.02	Belanja Mobilitas Air	12.800.000,00
8	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00
9	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	163.264.000,00
10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.480.000,00
Jumlah			267.274.000,00

Saksi DUDY ISNANDAR selaku PPTK tidak mengetahui adanya kegiatan dan tidak pernah saksi DUDY ISNANDAR buat namun uraian kegiatan tersebut ada dalam BKU Gabungan aplikasi Simda. Selama tahun 2014 untuk kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan KUBE anggaran yang diserap berdasarkan SPJ hanya sebesar Rp.64.882.900,00 (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa Kegiatan Verifikasi dan penetapan penerima Hibah Pembangunan / Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp170.538.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp 53.581.500,00
Selisih	Rp116.956.500,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00
2	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00
3	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	8.500.000,00
4	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.675.000,00
5	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00
6	5.2.2.08.02	Belanja Mobilitas Air	5.200.000,00
7	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00
8	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.742.500,00
9	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.539.000,00
Jumlah			116.956.500,00

Saksi DUDY ISNANDAR selaku PPTK menjelaskan realisasi anggaran yang diberikan hanya untuk SPJ bulan Desember 2014 yaitu sebesar Rp37.295.400,00 (tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan untuk anggaran bulan Agustus dan September 2014 awalnya diminta oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH untuk membuat BKU dan SPJ agar anggaran dapat dicairkan melalui GU yang akan diajukan, namun setelah dibuat dan diserahkan kepada saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH setelah anggaran GU pada bulan tersebut diterima uang kegiatan tidak diserahkan kepada saksi selaku PPTK, sehingga SPJ untuk bulan Agustus dan September banyak yang tidak ditandatangani.

- Bahwa Kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping KUBE) TA 2014 terdapat

Halaman 77 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp62.335.300,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp56.400.300,00
Selisih	Rp 5.935.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	635.000,00
2	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000,00
3	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	275.000,00
4	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Media Propaganda	500.000,00
5	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00
6	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00
		Rapat	0
		Jumlah	5.935.000,00
			0

Saksi MOHAMMAD AMIN selaku PPTK Kegiatan menyatakan bahwa terdapat pencairan kegiatan sesuai dengan BKU Manual yang dibuat oleh PPTK tetapi dana pencairan tersebut tidak diberikan kepada PPTK, yaitu terhadap kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping KUBE) TA 2014, terdapat realisasi SPJ yang tidak real sebesar Rp10.135.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

➤ Bahwa Kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap pendamping KUBE) TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp56.060.500
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp37.853.000
Selisih	Rp18.207.500

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	275.000,00
2	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Media Propaganda	750.000,00
3	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan	9.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Minuman Rapat	
4	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.182.500,00
Jumlah			18.207.500,00

Saksi MOHAMMAD AMIN selaku PPTK Kegiatan menyatakan bahwa terdapat pencairan kegiatan sesuai dengan BKU Manual yang dibuat oleh PPTK tetapi dana pencairan tersebut tidak diberikan kepada PPTK, yaitu terhadap kegiatan Fasilitas Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap pendamping KUBE) TA 2014, terdapat realisasi SPJ yang tidak real sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan (Sharing dengan Provinsi Kepri) TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp 67.500.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp 67.200.000,00
Selisih	Rp 300.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	300.000,00
JUMLAH			300.000,00

- Bahwa Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Kecamatan Se-Kabupaten Karimun TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp117.043.850,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp116.522.850,00
Selisih	Rp 521.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00

Halaman 79 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000,00
JUMLAH			521.000,00

- Bahwa Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan Rp119.360.000,00  
Nilai Realisasi Belanja Rp118.350.000,00  
Riil  
Selisih Rp 1.010.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.010.000,00
JUMLAH			1.010.000,00

- Bahwa Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan Rp204.055.000,00  
Nilai Realisasi Belanja Riil Rp136.622.500,00  
Selisih Rp 67.432.500,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00
2	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	437.500,00
3	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00
4	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.010.000,00
5	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.725.000,00
6	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	18.600.000,00
JUMLAH			67.482.500,00

- Bahwa Selisih yang didapat merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu antara lain :

Adanya belanja barang dan belanja perjalanan dinas pegawai yang fiktif  
Adanya mark up atas belanja barang seperti pada pos belanja alat tulis kantor, Belanja penggandaan, belnja cetak, belanja materai dan lain-lain

Halaman 80 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya penggunaan atas belanja bahan bakar Minyak/gas dan pelumas, belanja penggantian suku cadang dan belanja jasa service untuk keperluan Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa .

- Bahwa saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH melakukan pemotongan perjalanan dinas luar daerah atas perintah Kepala Dinas Sosial yaitu terdakwa dan bagi pegawai yang tidak melakukan perjalanan dinas luar dan dalam, namun namanya ada dipakai dalam Surat Perintah Tugas (SPT) maka atas kebijakan terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun akan dibantu uang saku sedikit sesuai perintah terdakwa yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH mengambil anggaran dinas yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dalam angsuran mobil dan angsuran pinjaman yang saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH yang disetorkan ke Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 74.505.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2014 saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ada mengentri dan mengkonsep uraian kegiatan dalam beberapa kegiatan PPTK pada Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014. Selanjutnya saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH mencairkan sendiri anggaran tersebut tanpa sepengetahuan PPTK.
- Bahwa cara saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH mengentri dan mengkonsep uraian kegiatan senilai anggaran yang akan diajukan dan setelah itu saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH membuat SPP dan SPM nya untuk diajukan kepada Kepala Dinas yaitu terdakwa dan saat itu terdakwa mengetahui dan menyetujuinya. Selanjutnya SPM dan SPP tersebut diajukan kembali ke BUD untuk diterbitkan SP2D. Setelah SP2D dicairkan kemudian uang anggarannya saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ada yang digunakan untuk membayar hutang pinjaman pada tahun 2014 kepada saksi TONY CHARLES dan sebagian digunakan untuk menutupi kebutuhan pribadi terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial beserta pembayaran angsuran mobil milik saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH.
- Bahwa kemudian pada tahun anggaran 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 1.13.00.00.5 tanggal 02 Januari 2015 mendapatkan alokasi dana belanja sejumlah Rp. 7.946.449.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh

Halaman 81 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) yang kemudian pada tanggal 04 November 2015 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 yang merubah jumlah alokasi belanja yang semula 7.946.449.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp.7.746.205.800,- (Tujuh milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima ribu delapan ratus rupiah) dengan rician perubahan belanja sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja	Alokasi (Rp)	DPA 2015 (Rp)	DPPA 2015 (Perubahan)
Belanja Tidak Langsung:				
1.	Belanja Pegawai	2.450.599.000,00,-	2.472.655.300,00	-
Jumlah Belanja Tidak Langsung		2.450.599.000,00,-	2.472.655.300,00	-
Belanja Langsung :				
1.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Per-kantoran	1.397.186.000,00,-	1.222.486.000,00	-
2.	Pengadaan Mebeleur	197.909.000,00,-	197.909.000,00,-	-
3.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.250.000,00,-	102.250.000,00,-	-
4.	Penyusunan LAKIP	20.000.000,00,-	20.000.000,00,-	-
5.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak huni dan KUBE	375.000.000,00,-	303.000.000,00,-	-
6.	Verivikasi dan Penetapan Penerima Hibah Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS	0,00,-	350.000.000,00,-	-
7.	Pengadaan Website	216.505.000,00,-	107.641.000,00,-	-
8.	Updating Data PMKS dan PSKS Kabupaten	300.000.000,00,-	300.000.000,00,-	-

Halaman 82 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



	Karimun		
9.	Peningkatan Pembi- naan Penyandang Disabilitas/Orang Dengan Kecatatan	175.000.000,00,-	245.000.000,00,-
10.	Pembinaan Anak ja- lanan (Sharing de- ngan provinsi Kepri)	93.000.000,00,-	150.000.000,00,-
11.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Perlin- dungan Tuna Sosial	150.000,000.00,-	150.000.000.00,-
12.	Pelayanan dan Reha- bilitasi perlindungan Sosial Anak	50.000.000,00,-	50.000.000,00,-
13.	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	50.000.000,00,-	50.000.000,00,-
14.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan	25.000.000,00,-	25.000.000,00,-
15.	Aksesibilitas Pela- yanan Sosial Melalui Rumah Perlindungan Anak	200.000.000,00,-	200.000.000,00,-
16.	Pembinaan dan Peningkatan Karang Taruna	100.000.000,00,-	96.644.300,00,-
17.	Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Pelak- sanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	70.000.000,00,-	0,00,-
18.	Fasilitasi Pelaksa- naan Program Ak- sesos Tahun 2015	100.000.000,00,-	70.000.000,00,-
19.	Penyusunan RENJA	20.000.000,00,-	20.000.000,00,-
20.	Sosialisasi dan Pub- likasi Kegiatan SKPD melalui Pameran	39.000.000,00,-	0,00,-
21.	Pembinaan dan Pe- ngawasan Penjaga	200.000.000,00,-	200.000.000,00,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Taman Pemakaman Umum dan Taman Makam Pahlawan		
22.	Pengadaan Sarana Keranda (Asongan) Jenazah untuk Masyarakat (Dana Community Development)	70.000.000,00,-	70.000.000,00,-
23.	Revisi Master Plan/ DED TPU Sememal	65.000.000,00,-	0,00,-
24.	Registrasi dan Pendapatan Taman Pemakaman Bukan Umum	65.000.000,00,-	0,00,-
25.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Insentif Pendamping RTLH)	75.000.000,00,-	60.000.000,00,-
26.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Sosialisasi Terhadap Penerima RTLH)	65.000.000,00,-	65.000.000,00,-
27.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok	75.000.000,00,-	60.000.000,00,-

Halaman 84 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping Kube)		
28.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi Terhadap Pendamping KUBE)	55.000.000,00,-	44.000.000,00,-
29.	Fasilitasi Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera	100.000.000,00,-	75.000.000,00,-
30.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat	100.000.000,00,-	95.392.700,00,-
31.	Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Rawan Sosial	150.000.000,00,-	150.000.000,00,-
32.	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin	195.000.000,00	195.000.000,00
33.	Dukungan Operasional Tangap Darurat bencana alam/sosial kegiatan tanggap darurat jenazah terlan- tar/korban bencana alam	150.000.000,00	150.000.000,00
34.	Kegiatan tanggap darurat jenazah terlan- tar/korban bencana alam/sosial	100.000.000,00	100.000.000,00
35.	Pengadaan logistic	150.000.000,00	146.902.500,00



	bencana		
36.	Kegiatan dukungan operasional UPPKH kabupaten karimun	200.000.000,00	200.000.000,00
37.	Fasilitasi pelaksanaan seleksi/rekrutmen pendampingan program keluarga harapan kabupaten karimun tahun 2015	0,00	2325.000,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2)		5.495.850.000,00	5.273.550.500,00
JUMLAH BELANJA (1)+(2)		7.946.449.000,00	7.746.205.800,00

- Bahwa terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 37 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang menetapkan antara lain:

No	Nama	Jabatan
	H. INDRA GUNAWAN, S. SOS	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang / Jasa
	ARDIYANSAH	Bendahara Pengeluaran
	Nursyafiani,Amd	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen)
	EDDY ISWANTO	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Pembukuan)
	EFFY YANTI,S.Sos	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Daftar Gaji)

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN
1	RYO GUNAWAN,ST	➤ Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran.

Halaman 86 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan pengadaan Meubeleir kantor</li><li>➤ Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor</li><li>➤ Kegiatan pembuatan website dinas sosial kabupaten karimun</li><li>➤ Kegiatan sosialisasi dan publikasi kegiatan SKPD melalui pameran dan pawai pembangunan</li></ul>
2	Ridwan,SE,Ak	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan penyusunan LAKIP</li><li>➤ Kegiatan penyusunan RENJA</li></ul>
3	DUDY ISNANDAR, SE, MM	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan fasilitasi Monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (Monev) kube sosialisasi terhadap penrimaan kube</li><li>➤ Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (Monev) kube (insentif) terhadap penerima kube</li></ul>
4	Prihandayani Bayusari,SE,AK	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan Pelaporan Penagggulan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Insetif Pendamping RTLH)</li></ul>
5	MOHAMMAD AMIN, S.TIS	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Updating Data KIS,KIP,KKS,PMKS dan PSKS</li><li>➤ Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penaggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAN Kube</li><li>➤ Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Bantuan</li></ul>

Halaman 87 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



		Sosial dan Bantuan Hibah <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Sosialisasi Terhadap Penerimaan RTLH)</li></ul>
6	Hj. DARLISMA, S.Sos	➤ Kegiatan Pelayanan Sosial dan Perlindungan Orang Dengan Kecatatan (ODK)
7	RITA AGUSTINA, ST, MM	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan Akseibilitas Pelayanan Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial</li><li>➤ Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan (Sharing dengan Provinsi Kepulauan Riau)</li></ul>
8	Naazirah, S. Psi	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak</li><li>➤ Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Lansia)</li></ul>
9	Muhammad Zen, SH,MA	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan Pelayanan Sosial, Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial</li><li>➤ Kegiatan Pelayanan Sosial, Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan</li><li>➤ Kegiatan Fasilitasi Pekerjaan</li></ul> <p>Pelaksanaan Program Askesos Tahun 2015</p>
10	Defrizal,S.Sos	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan Dukungan Operasionalisasi UPPKH Kabupaten Karimun</li><li>➤ Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) 2015</li></ul>
11.	Drs. Syafrudin abdul Rochim	➤ Kegiatan pengadaan logistic bantuan bencana alam/sosial



		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegiatan dukungan operasional tanggap darurat bencana alam/sosial</li> <li>➤ Kegiatan peningkatan rumah tangga sangat miskin (RTSM) 2015</li> <li>➤ Kegiatan peningkatan kesejahteraan perempuan rawan social</li> </ul>
11	Abdullah, S.Pd	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas karang taruna se-kabupaten karimun</li> <li>➤ Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat (PSM)</li> </ul>
14.	Drs.Zukri,MM	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegiatan revisi master plan/DED TPU sememal</li> <li>➤ Kegiatan tanggap darurat jenazah terlantar/korban bencana alam/social</li> </ul>
15.	Hj. Jesmiwanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegiatan pengadaan sarana keranda (asongan) jenaah untuk masyarakat</li> </ul>
16.	Fetty Yulianty, SH	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegiatan pembinaan dan pengawasan penjaga taman pemakaman umum dan taman pahlawan</li> <li>➤ Kegiatan registrasi dan pendataan taman pemakaman bukan umum</li> </ul>

- Bahwa berdasarkan arsip register penerbitan dokumen SP2D untuk pencairan anggaran belanja barang dan jasa melalui UP dan GU kepada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2015 yang ada pada bagian keuangan (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Karimun, antara lain sebagai berikut :

NO.	Bulan	TANGGAL	JENIS PENGELUARAN		NO. SP2D	KETERANGAN
			UP	GU		
I	Januari					
1		23-Jan-15	513,000,00		00308/BUD-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0		SP2D/2015	
II	Februari					
2		23-Feb-15		4,857,000	00772/BUD-SP2D/2015	
3		23-Feb-15		20,450,000	00773/BUD-SP2D/2015	
4		23-Feb-15		45,476,000	00774/BUD-SP2D/2015	
5		23-Feb-15		107,096,408	00775/BUD-SP2D/2015	
6		23-Feb-15		10,459,700	00776/BUD-SP2D/2015	
7		23-Feb-15		7,338,200	00777/BUD-SP2D/2015	
8		23-Feb-15		34,970,832	00778/BUD-SP2D/2015	
9		23-Feb-15		9,085,000	00779/BUD-SP2D/2015	
10		23-Feb-15		20,795,000	00780/BUD-SP2D/2015	
11		23-Feb-15		18,695,000	00781/BUD-SP2D/2015	
12		23-Feb-15		28,479,200	00782/BUD-SP2D/2015	
13		23-Feb-15		32,073,800	00783/BUD-SP2D/2015	
14		23-Feb-15		18,200,000	00784/BUD-SP2D/2015	
15		23-Feb-15		2,272,500	00785/BUD-SP2D/2015	
16		23-Feb-15		10,670,000	00786/BUD-SP2D/2015	
17		23-Feb-15		14,578,000	00787/BUD-SP2D/2015	
18		23-Feb-15		51,035,000	00788/BUD-SP2D/2015	
		Jumlah		436,531,640		
III	Maret					
-	-	-	-	-	-	Selama bln Maret tidak ada Pengajuan & Pencairan GU
IV	April					
1		07-Apr-15		135,825,000	02233/BUD-SP2D/2015	
2		07-Apr-15		9,343,000	02234/BUD-SP2D/2015	
3		07-Apr-15		10,933,000	02235/BUD-SP2D/2015	
4		07-Apr-15		7,550,000	02236/BUD-SP2D/2015	
5		07-Apr-15		525,000	02237/BUD-SP2D/2015	
6		07-Apr-15		33,006,537	02238/BUD-	

Halaman 90 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7		07-Apr-15	27,124,000	SP2D/2015 02239/BUD- SP2D/2015	
8		07-Apr-15	3,205,000	02240/BUD- SP2D/2015	
9		07-Apr-15	11,417,500	02241/BUD- SP2D/2015	
10		07-Apr-15	12,895,200	02242/BUD- SP2D/2015	
11		07-Apr-15	8,900,000	02243/BUD- SP2D/2015	
12		07-Apr-15	75,849,300	02244/BUD- SP2D/2015	
13		07-Apr-15	40,734,900	02245/BUD- SP2D/2015	
14		07-Apr-15	12,422,000	02246/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah	389,730,437		
<b>V</b>	<b>Mei</b>				
1		21-May-15	34,349,300	03702/BUD- SP2D/2015	
2		21-May-15	8,090,000	03703/BUD- SP2D/2015	
3		21-May-15	11,603,700	03704/BUD- SP2D/2015	
4		21-May-15	525,000	03705/BUD- SP2D/2015	
5		21-May-15	39,769,390	03706/BUD- SP2D/2015	
6		21-May-15	6,375,000	03707/BUD- SP2D/2015	
7		21-May-15	140,769,172	03708/BUD- SP2D/2015	
8		21-May-15	30,506,450	03709/BUD- SP2D/2015	
9		21-May-15	35,962,800	03710/BUD- SP2D/2015	
10		21-May-15	51,367,000	03711/BUD- SP2D/2015	
11		21-May-15	6,385,000	03712/BUD- SP2D/2015	
12		21-May-15	6,685,000	03713/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah	372,387,812		
<b>VI</b>	<b>Juni</b>				
1		09-Jun-15	135,225,960	04468/BUD- SP2D/2015	
2		09-Jun-15	13,574,600	04469/BUD- SP2D/2015	
3		09-Jun-15	19,760,515	04470/BUD- SP2D/2015	
4		09-Jun-15	2,005,000	04471/BUD- SP2D/2015	
5		09-Jun-15	15,783,000	04472/BUD- SP2D/2015	
6		09-Jun-15	15,866,000	04473/BUD-	

Halaman 91 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7		09-Jun-15		35,423,000	SP2D/2015 04474/BUD- SP2D/2015	
8		09-Jun-15		28,250,000	04475/BUD- SP2D/2015	
9		09-Jun-15		5,543,000	04476/BUD- SP2D/2015	
10		09-Jun-15		26,119,400	04477/BUD- SP2D/2015	
11		09-Jun-15		13,144,250	04478/BUD- SP2D/2015	
12		09-Jun-15		4,075,000	04479/BUD- SP2D/2015	
13		09-Jun-15		13,225,000	04480/BUD- SP2D/2015	
14		09-Jun-15		29,893,000	04481/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah		357,887,72 5		
VII	Juli					
1		06-Jul-15		13,835,800	05701/BUD- SP2D/2015	
2		06-Jul-15		11,700,000	05702/BUD- SP2D/2015	
3		06-Jul-15		9,125,000	05703/BUD- SP2D/2015	
4		06-Jul-15		65,902,200	05704/BUD- SP2D/2015	
5		06-Jul-15		70,262,000	05705/BUD- SP2D/2015	
6		06-Jul-15		16,255,089	05706/BUD- SP2D/2015	
7		06-Jul-15		525,000	05707/BUD- SP2D/2015	
8		06-Jul-15		5,000,000	05708/BUD- SP2D/2015	
9		06-Jul-15		48,800,500	05709/BUD- SP2D/2015	
10		06-Jul-15		14,796,600	05710/BUD- SP2D/2015	
11		06-Jul-15		20,691,400	05711/BUD- SP2D/2015	
12		06-Jul-15		15,089,300	05712/BUD- SP2D/2015	
13		06-Jul-15		35,996,868	05713/BUD- SP2D/2015	
14		06-Jul-15		10,250,000	05714/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah		338,229,75 7		
VIII	Agustus					
-	-	-	-	-	-	Selama bln Agustus tidak ada Pengajuan & Pencairan GU

Halaman 92 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX	September					
-	-	-	-	-	-	Selama bln September tidak ada Pengajuan & Pencairan GU
X	Oktober					
1		06-Oct-15		187,951,250	11173/BUD-SP2D/2015	
2		30-Oct-15		3,850,000	11622/BUD-SP2D/2015	
3		30-Oct-15		9,610,341	11623/BUD-SP2D/2015	
4		30-Oct-15		13,207,000	11624/BUD-SP2D/2015	
5		30-Oct-15		26,559,616	11625/BUD-SP2D/2015	
6		30-Oct-15		14,073,000	11626/BUD-SP2D/2015	
7		30-Oct-15		32,668,500	11627/BUD-SP2D/2015	
8		30-Oct-15		44,000,000	11628/BUD-SP2D/2015	
9		30-Oct-15		111,000,000	11629/BUD-SP2D/2015	
10		30-Oct-15		88,320,000	11630/BUD-SP2D/2015	
		Jumlah		531,239,707		
XI	November					
1		30-Nov-15		65,029,000	12646/BUD-SP2D/2015	
2		30-Nov-15		6,723,000	12647/BUD-SP2D/2015	
3		30-Nov-15		29,705,400	12648/BUD-	

Halaman 93 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



4		30-Nov-15		59,419,100	SP2D/2015 12649/BUD-	
5		30-Nov-15		60,998,942	SP2D/2015 12650/BUD-	
6		30-Nov-15		26,796,200	SP2D/2015 12651/BUD-	
7		30-Nov-15		43,636,866	SP2D/2015 12652/BUD-	
8		30-Nov-15		32,191,000	SP2D/2015 12653/BUD-	
9		30-Nov-15		101,702,500	SP2D/2015 12654/BUD-	
10		30-Nov-15		12,402,500	SP2D/2015 12655/BUD-	
		Jumlah		438,604,508		
<b>XII</b>	<b>Desember</b>					
1		11-Dec-15		256,056,500	13126/BUD- SP2D/2015	
2		14-Dec-15		63,048,680	13263/BUD- SP2D/2015	
3		14-Dec-15		7,775,216	13264/BUD- SP2D/2015	
4		14-Dec-15		10,070,000	13265/BUD- SP2D/2015	
5		14-Dec-15		125,388,500	13266/BUD- SP2D/2015	
6		14-Dec-15		13,306,000	13267/BUD- SP2D/2015	
7		14-Dec-15		10,829,000	13268/BUD- SP2D/2015	
8		14-Dec-15		47,386,000	13269/BUD- SP2D/2015	
9		23-Dec-15		27,450,000	13564/BUD- SP2D/2015	
10		23-Dec-15		30,000,000	13565/BUD- SP2D/2015	
11		23-Dec-15		23,513,500	13566/BUD- SP2D/2015	
12		23-Dec-15		6,827,000	13567/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah		621,650,396		
<b>Jumlah Total</b>			<b>513,000,000</b>	<b>3,486,261,982</b>	<b>3,999,261,982</b>	<b>Jumlah UP + GU</b>

- Bahwa pada tahun 2015 dinas sosial mendapatkan Uang Persediaan sebesar Rp. 513.000.000,- yang mana uang UP tersebut digunakan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH untuk membayar hutang kepada saksi AGUSTIAWAN sehingga seluruh PPTK kegiatan tidak mendapat uang panjar kegiatan.
- Bahwa kegiatan pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran langsung dikelola oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun tanpa melibatkan saksi RYO GUNAWAN selaku PPTK kegiatan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran.

- Bahwa saksi EFFY YANTI selaku pembantu PPTK menjelaskan bahwa belanja riil atas kegiatan Adum tidak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa meminta bagian uang dari anggaran kegiatan yang dilaksanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kegiatan, tetapi saksi ABDULLAH hanya sanggup memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per- kegiatan.
- Bahwa saksi DEFRIZAL selaku PPTK kegiatan atas perintah terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dalam pembuatan SPJ terhadap anggaran yang dipergunakan untuk terdakwa pada tahun 2015 dibuat seolah-oleh telah terlaksana namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan.
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2015 terdapat ketidaksesuaian antara jumlah belanja barang dalam SPJ dengan realisasi riil belanja atas pos belanja sebagai berikut :

No	Pos belanja	Nilai SPJ	Nilai realisasi Belanja Riil	Selisih
1.	Belanja alat tulis kantor	84.363.500,00	67.512.088,00	16.851.412,00
2.	Belanja alat listrik dan elektronik	7.871.408,00	1.945.000,000	5.926.408,00
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.220.000,00	13.040.000,00	5.180.000,00
4.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	66.100.000,00	56.100.000,00	10.000.000,00
5.	Belanja surat kabar/majalah	13.230.000,00	12.840.000,00	390.000,00
6.	Belanja jasa media propaganda	61.160.000,00	7.510.000,00	53.650.000,00
7.	Belanja jasa service	18.020.000,00	4.800.000,00	13.220.000,00
8.	Belanja penggantian suku cadang	24.850.000,00	6.000.000,00	18.850.000,00
9.	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
10.	Belanja cetak	86.980.500,00	69.564.682,00	17.415.818,00
11.	Belanja pengadaan	59.424.150,00	43.959.701,00	15.464.449,00
12.	Belanja makanan dan minuman harian	230.300.000,00	227.300.000,00	3.000.000,00
13.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	104.645.000,00	96.570.000,00	8.075.000,00
14.	Belanja makanan dan	41.285.000,00	39.585.000,00	1.700.000,00

Halaman 95 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



	minuman rapat			
15.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	543.584.200,00	485.531.200,00	58.053.000,00
16.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	675.541.950,00	515.859.370,00	159.682.580,00
17.	Belanja kursus pelatihan, sosialisasi, dan bimtek	75.000.000,00	21.000.000,00	54.000.000,00
18.	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	25.110.000,00	4.010.000,00	21.100.000,00
19.	belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
20.	Belanja dokumentasi	15.569.500,00	12.822.000,00	2.747.500,00
21.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18.250.000,00	15.750.000,00	2.500.000,00
22.	Belanja penginapan	29.300.000,00	26.700.000,00	2.600.000,00
23.	Belanja transportasi	246.360.104,00	227.200.104,00	19.160.000,00
24.	Belanja tenaga ahli/instruktur narasumber	20.500.000,00	17.500.000,00	3.000.000,00
25.	Pengembalian STS	0,00	143.054.538,00	143.054.538,00
	JUMLAH	2.521.165.312,00	2.116.153.683,00	405.011.629,00

➤ Bahwa selisih yang didapatkan di tahun 2015 saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH gunakan sebagai berikut :

a. Keperluan Pribadi Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa.

1. Pembayaran angsuran hutang Bank Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa dengan rincian :

- Hutang Bank atas nama terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya ke Bank RIAU KEPRI Cabang Tanjung Balai Karimun dan uangnya diambil dari anggaran kegiatan Adum Dinas Sosial Kab. Karimun.
- Hutang Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa yang dipinjam atas nama saksi sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank RIAU KEPRI Cabang Tanjung Balai Karimun, uangnya juga diambil dari anggaran kegiatan Adum Dinas Sosial Kab. Karimun.

Sehingga total angsuran uang pinjaman bank terdakwa yang dibayarkan dari anggaran Adum setiap bulannya dari bulan Januari s/d Desember 2015 adalah sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dalam satu tahun selama tahun 2015 pengalokasian anggaran Adum untuk membayar pinjaman pribadi terdakwa adalah sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).

2. Pembayaran angsuran mobil pribadi Honda Civic bekas milik saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH sebesar

Halaman 96 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ada juga memakai anggaran Adum untuk pembayaran uang muka mobil tersebut namun dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Untuk hitungan anggaran yang saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH pakai pada tahun 2015 hanya dari bulan Januari s/d Juli 2015 saja karena pada sekitar bulan Juli karena anggaran Defisit maka saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kredit mobil tersebut dan akhirnya saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH kembalikan kepada pihak delaer Automa yang berada di depan Hotel Golden Tanjung Balai Karimun.

3. Pembayaran angsuran sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH yang dengan angsuran sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari bulan Januari s/d April 2015 di Plaza Elektronik, kemudian pada bulan April tersebut juga saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH melunaskan sisa kredit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang juga saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ambil dari anggaran kegiatan Adum.
4. Angsuran pembayaran barang elektronik berupa Orgen merk Yamaha selama 6 bulan di Plaza Elektronik Tanjung Balai Karimun dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang juga saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ambil dari anggaran kegiatan Adum,
5. Pinjaman terdakwa selama tahun 2015 yang belum ada diganti maupun dikembalikan sampai sekarang ini sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. Jasa servis mobil pribadi terdakwa sebesar Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) di Bengkel Akeng Kampung Baru Tebing.
7. Pembelian Laptop untuk menjadi milik pribadi saksi ISKANDAR atas perintah dari Kepala Dinas yaitu Terdakwa dengan harga Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan setiap bulannya kepada saksi UMAR yang tinggal d daerah Tg. Batu, saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH lakukan transfer

Halaman 97 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya ke rekening milik saksi UMAR tersebut atas perintah terdakwa sehingga dalam 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 jumlahnya adalah sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

9. Uang yang dikirim setiap bulan atas perintah terdakwa dengan jumlah variatif antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Tembilahan dengan No. Rek : 1122108224 an. PUJI ASTUTI.
10. Pembelian tiket pesawat pribadi mertua saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada bulan Desember 2015.

Pembayaran untuk Keperluan Non-Budgeter.

1. Pengeluaran untuk pemberian dana bantuan bagi Wartawan yang meminta bantuan operasioanal ke Dinas Sosial Kab. Karimun dari Januari s/d Desember 2015 sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Upah tanda-tangan untuk para pegawai yang dipergunakan namanya untuk SPJ fiktif pada Tahun 2014, namun pembayaran dilakukan dengan mengalokasikan anggaran dari kegiatan Adum tahun 2015 dengan total uang yang dialokasikan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), untuk 2 (dua) orang yaitu saksi ISKANDAR dan Saksi RIDWAN,SE,Ak untuk 11 (sebelas) kegiatan.
3. Pembayaran tiket pesawat Terdakwa untuk perjalanan dinas selama tahun 2015 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), padahal sebelumnya uang untuk biaya dalam melakukan perjalanan dinas tersebut sudah diberikan utuh kepada terdakwa.
4. Pembelian gula dan kopi untuk keperluan kantor Dinas Sosial Kab Karimun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Pembuatan baju dinas untuk tiga orang yaitu untuk saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH, saksi ISKANDAR dan saksi ETI MARIATI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Pembayaran hutang untuk dana kegiatan saksi SYAFRUDDIN yang telah terpakai pada tahun 2014 dengan mengalokasikan anggaran kegiatan Adum tahun 2015 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
7. Pemberian uang untuk kegiatan MTQ sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada staf Kesra Setda Kab. Karimun.

Halaman 98 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Pembayaran hutang untuk dana kegiatan saksi M. AMIN yang juga telah terpakai pada tahun 2014, dan pengembaliannya dilakukan pada tahun 2015 dengan mengalokasikan dana Adum sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  9. Upah tanda-tangan untuk saksi RIDWAN,SE.Ak untuk SPD Fiktif pada tahun 2014, yang dibayarkan dari alokasi anggaran Adum 2015, sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  10. Pembayaran pembelian air lori pada bulan Januari dan Februari 2015 sebesar Rp.1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan sistem aplikasi keuangan, yang digunakan oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH selaku Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp. 4.359.446.982,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga sisa dana pada akhir tahun 2015 sebesar Rp. 513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah).
  - Bahwa pada tahun 2015 saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH kembali melakukan peminjaman kepada saksi TONY CHARLES untuk menutupi anggaran kegiatan yang sudah terpakai oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa.
  - Bahwa berdasarkan sistem aplikasi keuangan jumlah realisasi belanja periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sejumlah Rp. 4.466.983.484,00 (empat milyar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 139.174.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
  - Bahwa pada tahun anggaran 2016 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 1.13.01.00.00.5 tanggal 27 Januari 2016 mendapatkan alokasi dana belanja sejumlah Rp. 7.545.255.080,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan puluh rupiah) yang kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 yang merubah jumlah alokasi belanja yang semula Rp. 7.545.255.080,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) menjadi Rp.7.755.580.480,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan rician perubahan belanja sebagai berikut:

No	Uraian Alokasi Belanja	DPA 2016 (Rp)	DPPA 2016 (Perubahan)
Belanja Tidak Langsung:			
1.	Belanja Pegawai	2.219.355.080,-	2.335.861.480,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung		2.219.355.080,-	2.335.861.480,-
Belanja Langsung :			
1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	1.582.900.000,-	1.849.325.000,-
2.	Penyusunan LAKIP Dinas Sosial	20.000.000,-	20.000.000,-
3.	Monev dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah dan Tidak Layak Huni dan KUBE	125.000.000,-	80.000.000,-
4.	Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan Sosial Anak	100.000.000,-	100.000.000,-
5.	Peningkatan Pembinaan Penyandang Disabilitas/Orang dengan Kecacatan.	215.000.000,-	315.000.000,-
6.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial	185.000.000,-	185.000.000,-
7.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan korban Tindak Kekerasan	25.000.000,-	25.000.000,-
8.	Aksesibilitas Pelayanan Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial	125.000.000,-	125.000.000,-
9.	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	70.000.000,-	70.000.000,-
10.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	30.000.000,-	30.000.000,-
11.	Penyusunan RENJA	20.000.000,-	20.000.000,-
12.	Pembinaan dan Pengawasan	100.000.000,-	100.000.000,-

PBR

Halaman 100 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT



	Penjaga Taman Pemakaman Umum dan Taman Makam Pahlawan		
13.	Registrasi dan Pendataan Taman Pemakaman Bukan Umum	135.000.000,-	135.000.000,-
14.	Asistensi Pelayanan Pemakaman Masyarakat	185.000.000,-	135.000.000,-
15.	Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Rawan Sosial	75.000.000,-	75.000.000,-
16.	Bantuan Perlengkapan Anak Sekolah	100.000.000,-	95.244.000,-
17.	Asistensi Sosial Penyandang Masalah Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	304.000.000,-	221.150.000,-
18.	Dukungan Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam/ Sosial	100.000.000,-	170.000.000,-
19.	Tanggap Darurat Jenazah Terlantar/ Korban Bencana Alam/ Sosial	75.000.000,-	75.000.000,-
20.	Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH Kabupaten Karimun	325.000.000,-	390.000.000,-
21.	Fasilitas Pelaksanaan Program Aksesos 2016	75.000.000,-	75.000.000,-
22.	Fasilitas Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera	75.000.000,-	75.000.000,-
23.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rastra (Beras sejahtera) Kabupaten Karimun	200.000.000,-	200.000.000,-
24.	Pendataan / Updating data PMKS dan PSKS Kabupaten Karimun	139.000.000,-	139.000.000,-
25.	Pembinaan Lembaga Taruna Siaga Bencana	100.000.000,-	100.000.000,-
26.	Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	200.000.000,-	200.000.000,-
	Fasilitas Monitoring Evaluasi	50.000.000,-	25.000.000,-



27.	dan Pelaporan Penang- gulangan Kemiskinan Perko- taan dan Pedesaan RTLH (Insentif Pendampingan RTLH)		
28.	Asistensi Sosial dan Pem- binaan Lembaga Veteran Kabupaten Karimun	390.000.000,-	390.000.000,-
29.	Sinergitas Program dan Pengembangan Potensi Ke- wirausahaan Karang Taruna Kabupaten Karimun	200.000.00,-	200.000.000,-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2)		5.325.900.000,-	5.419.719.000,-
JUMLAH BELANJA (1)+(2)		7.545.255.080,-	7.755.580.480,-

- Bahwa terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 52 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang menetapkan antara lain:

N O	NAMA	JABATAN
1	H. INDRA GUNAWAN, S.Sos	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa
2	ARDIYANSYAH	Bendahara Pengeluaran
3	NURSYAFIANI, S.Mn	Pembantu Bendahara Pengeluaran
4	EDDY ISWANTO	Pembantu Bendahara Pengeluaran
5	EFFY YANTI, S.Sos	Pembantu Bendahara Pengeluaran

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

N O	NAMA	NAMA KEGIATAN
1	MUHAMMAD ZEN, SH, MA	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran.

Halaman 102 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



		Kegiatan Pelayanan Sosial, Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial.  Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan.  Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Askesos 2016.  Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rastra (Beras Sejahtera) Kabupaten Karimun.
2	RIDWAN, SE, AK	1. Kegiatan Penyusunan RENJA. 2. Kegiatan Penyusunan RENSTRA. 3. Kegiatan Penyusunan LAKIP.
3	DUDY ISNANDAR, SE, MM	Kegiatan Verifikasi Monitoring dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kube.
4	DEFRIZAL, S.Sos	Kegiatan Pembinaan Lembaga Taruna Siaga Bencana.  Kegiatan Asistensi Sosial dan Pembinaan Lembaga Veteran Kabupaten Karimun.  Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan
5	MOHAMMAD AMIN, S.TIS	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Kube.  Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Insentif Pendamping RTLH)
6	Hj. DARLISMA, S.Sos	Kegiatan Pelayanan Sosial dan perlindungan Orang dengan Kecacatan (Penyandang Disabilitas).
7	RITAAGUSTINA, ST, MM	Kegiatan Akseibilitas Sosial Melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rumah Perlindungan Sosial. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pusat Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial. Kegiatan Asistensi Sosial Penyandang Masalah Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.
8	NAZIRAH, S. Psi	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan Sosial dan anak.
9	Hj. JESMIWARTI	Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah Terlantar/ Korban Bencana Alam/ Sosial
10	Drs. SYAFRUDIN ABDUL ROCHIM	Kegiatan Bantuan Ibu Hamil Rawan Sosial Kegiatan Bantuan Perlengkapan Anak Sekolah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Kegiatan dukungan operasional Tanggap Darurat Bencana Alam/ SosialKegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) Kegiatan Pendataan /Updating Data PMKS dan PSKS Kabupaten Karimun
11	ABDULLAH, S.Pd	Kegiatan Sinergisitas Program dan Pengembangan Potensi Kewirausahaan Karang taruna Kabupaten Karimun
12	Drs. ZUKRI, MM	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kegiatan Regristasi Pendataan Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Kegiatan Asistensi Pelayanan Pemakaman Masyarakat.

- Bahwa pada Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.1.553.423.382,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp. 492.199.526,00

Halaman 104 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih Rp1.061.223.856,00  
Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.000.000,00
2	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.450.000,00
3	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	1.100.000,00
4	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.500.000,00
5	5.2.2.03.02	Belanja Air	4.652.000,00
6	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	640.000,00
7	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Media Propaganda	60.000.000,00
8	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.000.000,00
9	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.000.000,00
10	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	54.600.000,00
11	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.000.000,00
12	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.675.000,00
13	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.152.700,00
14	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	572.890.156,00
15	5.2.2.17.01	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek	72.000.000,00
16	5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.564.000,00
17	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.000.000,00
JUMLAH			1.061.223.856,00

ahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu antara lain :

Pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.

Terdapat perbedaan antara nilai SPJ dan nilai realisasi belanja pada bukti pendukung yang berbeda.

PBR

Halaman 105 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat pengeluaran atas belanja barang dan belanja perjalanan dinas yang fiktif.

Adanya mark – up nilai belanja barang yang di SPJ kan.

- Bahwa saksi EFFY YANTI, S.Sos selaku Pembantu PPTK menyatakan bahwa untuk penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, untuk mempertanggung jawabkan penggunaan anggarannya, biasanya cara yang dilakukan adalah membuat sendiri (merekayasa) bukti-bukti atas belanja yang dilakukan dan kemudian melampirkan bukti tersebut kedalam SPJ sehingga bukti pertanggung jawaban dalam SPJ sebenarnya hanya bukti belanja fiktif.

- Bahwa pada Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.147.177.357,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.103.651.461,00
Selisih	Rp. 43.525.896,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00
2	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00
3	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.455.500,00
4	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	3.157.896,00
5	5.2.2.15.02	Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya	9.912.500,00
JUMLAH			43.525.896,00

Selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu dikarenakan :

- Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
- Terdapat pengeluaran atas belanja perjalanan dinas yang fiktif.

Pada Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban tindak kekerasan tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.10.050.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp. 9.300.000,00
Selisih	Rp. 750.000,00

Halaman 106 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00
2	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	250.000,00
JUMLAH			750.000,00

- Bahwa Selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
- Bahwa Pada Kegiatan Bantuan Ibu Hamil Rawan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 74.100.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp. 3.325.000,00
Selisih	Rp. 70.775.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	426.250,00
2	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	310.000,00
3	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Media Propaganda	500.000,00
4	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	182.500,00
5	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	698.750,00
6	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman	420.000,00
		Rapat	
7	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.200.000,00
8	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.550.000,00
9	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	5.800.000,00
10	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	637.500,00
11	5.2.2.11.04	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	3.300.000,00
12	5.2.2.23.01	Honorarium Narasumber	1.000.000,00
13	5.2.2.24.01	Belanja Pengadaan Barang yang diserahkan kepada masyarakat	33.750.000,00
JUMLAH			70.775.000,00

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran atas belanja yang fiktif.

PBR

Halaman 107 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.356.217.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.322.217.000,00
Selisih	Rp. 34.000.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
		Belanja	
1	5.2.2.22.01	Transportasi	34.000.000,00
JUMLAH			34.000.000,00

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran atas belanja transportasi yang fiktif.

Pada Kegiatan Fasilitas program Askesos tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.74.266.250,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.53.921.250,00
Selisih	Rp.20.365.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.365.000,00
JUMLAH			20.365.000,00

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu dikarenakan :

- Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
- Terdapat pengeluaran atas belanja perjalanan dinas yang fiktif.

- Bahwa pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rastra (Beras Sejahtera) TA 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.198.588.750,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.103.658.250,00
Selisih	Rp.94.900.500,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

Halaman 108 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00
2	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00
3	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.365.000,00
4	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.535.500,00
5	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00
6	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00
JUMLAH			94.900.500,00

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu dikarenakan :

- Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
- Terdapat pengeluaran atas belanja perjalanan dinas yang fiktif.

- Bahwa pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Taruna Siaga Bencana TA 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 84.987.500,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp. 70.287.500,00
Selisih	Rp.14.700.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.950.000,00
2	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	4.750.000,00
JUMLAH			14.700.000,00

Selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.

- Bahwa pada Kegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 198.172.500,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp. 147.500.000,00
Selisih	Rp.50.672.500,00

Halaman 109 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.672.500,0 0
JUMLAH			50.672.500,0 0

➤ Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu dikarenakan :

- Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
- Terdapat pengeluaran atas belanja perjalanan dinas yang fiktif.

➤ Bahwa pada Kegiatan Asistensi sosial dan Pembinaan Lembaga Veteran tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.372.253.750,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.344.253.750,00
Selisih	Rp. 28.000.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00
2	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00
3	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00
4	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00
JUMLAH			28.000.000,00

Selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.

➤ Bahwa perbedaan antara nilai SPJ dengan uang yang diterima oleh PPTK dari Bendahara disebabkan :

Dalam membuat realisasi belanja, Bendahara Pengeluaran meminta PPTK untuk membuat BKU Manual atas rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh PPTK sedangkan kegiatan tersebut belum dilaksanakan PPTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga realisasi dan bukti pendukung kegiatan disesuaikan dengan BKU Manual yang telah dibuat dan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran.

BKU Manual yang dibuat oleh PPTK kemudian diinput kedalam Aplikasi SIMDA sebagai dasar pengajuan pencairan GU ke Bagian Keuangan Kabupaten Karimun.

Atas pencairan GU atas SPJ Kegiatan tidak sepenuhnya diberikan kepada PPTK dan terdapat juga pencairan GU atas SPJ kegiatan tanpa sepengetahuan PPTK.

- Bahwa saksi MUHAMMAD ZEN selaku PPTK kegiatan Administrasi Umum tahun anggaran 2016 menjelaskan penggunaan anggaran Adum tahun 2016 tidak semuanya sudah sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan, terdapat belanja-belanja yang telah pertanggungjawabkan namun tidak sesuai pengeluaran riil belanja dikarenakan Kepala Dinas Sosial yaitu Terdakwa ada menggunakan anggaran kegiatan ADUM untuk kepentingan pribadinya berupa pembayaran pinjaman bank, pembayaran kredit mobil, pembayaran Saksi IJAL, pembayaran Saksi DEN, dan pemberian uang kepada wartawan.
- Bahwa saksi Syafruddin selaku PPTK kegiatan tahun 2016 tidak menerima uang panjar yang bersumber dari uang persediaan tahun anggaran 2016 dan uang yang diberikan oleh bendahara tidak sesuai dengan yang diajukan / diSPJ dalam BKU.
- Bahwa di tahun 2016 Uang persediaan dicairkan sebesar Rp. 384.750.000,00 dan sisanya digunakan untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga dan PPTK kegiatan tidak ada menerima uang panjar untuk kegiatan yang bersumber dari dana Uang persediaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kab. Karimun bersama dengan saksi ARDIYANSYAH ALS ARDI BIN ABBAS SABRAH selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. Karimun telah menyalahgunakan uang anggaran kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kab Karimun seperti memotong anggaran belanja dan jasa untuk SKPD dinas sosial kab. Karimun yang merupakan anggaran belanja dalam kegiatan yang akan dilaksanakan para PPTK pada masing-masing bidang yang ada pada SKPD dinas sosial Kab Karimun yang mana pemotongan anggaran belanja PPTK yang dilaksanakan bersumber dari kegiatan Administrasi Umum yang dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu saksi ARDIYANSYAH ALS ARDI BIN ABBAS SABRAH, seperti pembayaran hutang, pembayaran

Halaman 111 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman bank pribadi dan kebutuhan pribadi lainnya serta dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ yang fiktif seperti nota fiktif atas belanja yang tidak ada dilakukan dan bukti fiktif atas perjalanan dinas baik dalam maupun luar yang hanya menggunakan nama-nama pegawai di dalam lingkungan Dinas Sosial Kab Karimun sehingga perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan dengan :

Pasal 10 huruf d, e, h, k, l, Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pasal 10

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 Ayat (3) huruf "c" mempunyai tugas:

- Menyusun RKA-SKPD.
- Menyusun DPA-SKPD.
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan.
- Menandatangani SPM.
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- Mengawasi pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Halaman 112 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pasal 68 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (6) Peraturan Daerah Kab. Karimun No. 19 Tahun 2007, Tentang pokok-pokok Pengelolaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaian.

**Pasal 68**

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

**Pasal 73**

- (6). Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas perintah pembayaran yang diterbitkannya.

Dan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ARDIYANSYAH ALS ARDI BIN ABBAS SABRAH dalam pengelolaan anggaran belanja dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016 mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 3.170.740.431 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), hal ini sesuai Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-4186/PW28/5/2017 Tanggal 19 Desember 2017.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan terdakwa dan saksi ARDIYANSYAH ALS ARDI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. Karimun kurang lebih sebesar Rp 3.170.740.431 ( tiga milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo 64 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 113 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS- 02//Ft.1 /TBK/ 07/2018 tanggal 7 November 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan penagadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. 1 (satu) buah buku catatan rekapitulasi pengeluaran atas penggunaan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab Karimun pada TA. 2014 dan 2015 dengan sampul warna Hitam dan betuliskan Agenda Kerja ERICA 166.
  2. 2 (dua) buah buku catatan rekapitulasi pencatatan pengeluaran penggunaan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas

Halaman 114 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kab. Karimun TA. 2014 dan 2015 dengan sampul warna Biru dan bertuliskan BUKU KAS merk KWARTO.

3. 1 (satu) buah buku catatan uang panjar kegiatan bendahara pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2013 s/d 2015, dengan sampul berwarna Hijau dan bertuliskan BUKU PANJAR.
4. 1 (satu) buah buku catatan pribadi saksi ARDIYANSYAH dengan sampul berwarna merah coklat berlogo Pemda Kab. Karimun dan bertuliskan ASISTENSI DAN FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014.
5. 1 (satu) bundel Map plastik bertulang merk HOMBO warna merah jambu transparan yang berisi kwitansi tanda terima anggaran asli dan salin kegiatan dan Nota Dinas Pengajuan Ganti Uang (GU) PPTK pada SKPD Dinas Sosial Kab Karimun TA. 2014
6. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Giro Bank BNI Cabang Tg. Balai Karimun atas nama Saksi ARDIYANSYAH dengan No. Rekening 0361928404 periode tanggal 01 Desember 2014 s/d 31 Januari 2015.
7. 2 (dua) buah Buku Kwitansi asli berukuran besar merk Sinar Dunia masing-masing berwarna Orange dan berwarna Ungu.
8. 1 (satu) buah Buku Kwitansi berukuran Sedang merk Sinar Dunia berwarna Kuning.
9. 1 (satu) buah bonggol Buku Cek Asli Bank BNI Cabang Tg. Balai Karimun dengan Nomor Rekening 0361928404 atas nama saksi ARDIYANSYAH dengan No. Cek CN 431151 s/d CN 431175.
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan Asli Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun dengan Nomor Rekening : 01.1.001381.9 atas nama saksi ARDIYANSYAH.
11. 1 (satu) buah Buku Tabungan Asli Bank Riau Kepri dengan No. Rekening 111-21-16419 atas nama saksi ARDIYANSYAH.
12. 1 (satu) bundel Kwitansi penyerahan uang anggaran kegiatan dari bendahara pengeluaran Dinas Sosial saksi ARDIANSYAH kepada PPTK Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 dan 2015.
13. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran biaya gaji Asli dan Salinan pegawai honor petugas kebersihan dan penjaga kapal Resque pada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 dan 2015

Halaman 115 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Nota pembayaran Asli dan salinan atas pembelian sejumlah barang oleh saksi ARDIYANSYAH dengan menggunakan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 dan 2015
15. 1 (satu) bundel asli dan salinan Nota pembayaran biaya service dan biaya pembelian spare part serta pembelian BBM kendaraan Dinas terdakwa INDRA GUNAWAN,S.Sos yaitu Mobil Kijang dengan No. Pol BP 1081 K
16. 1 (satu) bundel salinan Kwitansi Pembayaran Air Bak
17. 1 (satu) bundel Kwitansi asli dan salinan Pembayaran Belanja Jasa Propaganda dari Dinas Sosial kepada Media Haluan Kepri pada tahun 2014 dan 2015
18. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi pemberian Pinjaman kepada Pak ARMAN dengan Nilai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 8 April 2014.
19. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi dari Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun kepada LVRI (Lembaga Veteran Republik Indonesia) Kab. Karimun yang diterima oleh saksi M. EDY YUSUF untuk pembayaran Titipan Dana APBD 2014 Dinsos sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dengan keterangan Sudah disetorkan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditanda-tangani oleh terdakwa INDRA GUNAWAN,S.Sos dan saksi ARDIYANSYAH.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanda terima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Ketua LVRI Kab. Karimun saksi M. EDY YUSUF kepada saksi ARDIANSYAH untuk pembayaran Titipan Dana APBD Tahun 2014 Dinas Sosial sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan masih kurang pelunasan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
21. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi dari Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun kepada saksi SURIPTO untuk pembayaran Titipan Dana Honor
22. 1 (satu) Lembar Kwitansi asli dari saksi ARDIYANSYAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran sumbangan Anak Bapak NURDIN BASIRUN.
23. 1 (satu) lembar salinan Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Rekening Bendahara Dinas Sosial Kab. Karimun dengan No.

Halaman 116 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rek : 1110300019 oleh saksi ARDIANSYAH untuk Dana UP tanggal 04 Februari 2015 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

24. 1 (satu) lembar Kwitansi asli rangkap 3 (tiga) sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Panjar Kegiatan Hj. DARLISMA bulan Juni 2014 yang diberikan kepada saksi ARDIYANSYAH untuk dipakai dulu (Pak Dul) yang ditanda-tangani oleh saksi Hj. DARLISMA dan saksi ARDIANSYAH dengan keterangan Lunas.
25. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi dalam rangkap 2 (dua) uang sebesar Rp. 67.675.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Kegiatan Administrasi Umum Bulan Juni 2014 No 0075/SPT/1.B.01.01/VII/2014 yang dibayarkan kepada saksi ARDIYANSYAH, tanggal 10 Juli 2014 yang ditanda-tangani oleh saksi ARDIYANSYAH.
26. 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari Toko Shop & Save sebesar Rp. 11.574.000,- (sebelas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk biaya pembayaran Pembelanjaan di Market Shop & Save.
27. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bantuan Biaya Buka Puasa dan Makan Sahur di Mesjid Agung Kab. Karimun dari Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2014.
28. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan Uang dari saksi AGUS SETIAWAN uang diterima oleh saksi ARDIANSYAH untuk pembayaran Pinjaman Dana Guna Untuk Keperluan Kantor Dinas Sosial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 9 Desember 2014.
29. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pemindahbukuan Bank BNI Batam dari No. Rek : 0297396365 An. AGUSTIAWAN ke No. Rek : 0361607264 An. ARDIYANSYAH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 10 Desember 2014.
30. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pemindahbukuan Bank BNI Pekanbaru dari No. Rek : 0297396365 An. AGUSTIAWAN ke No. Rek : 0361607264 An. ARDIYANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2014 dengan keterangan berupa peminjaman uang.

Halaman 117 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



31. 1 (satu) lembar Foto copy formulir pemindahan bukuan Bank BNI Pekanbaru dari No Rek : 0361607264 An.AGUSTIAWAN Bank BNI Cab.Suka Ramai Pekanbaru Ke No Rek : 0361607264 An.ARDYANSYAH sebesar Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 15 desember 2014 dengan keterangan berupa pinjaman uang.
32. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pemindahbukuan Bank BNI Pekanbaru dari No. Rek : 0297396365 An. AGUSTIAWAN Bank BNI Cab. Pekanbaru ke No. Rek : 0361607264 An. ARDIYANSYAH sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Desember 2014 dengan keterangan berupa peminjaman uang.
33. 1 (satu) lembar salinan Slip Bukti Setoran pada Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun dengan jumlah setoran sebesar Rp. 4.778.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ke No. Rek : 0110013819 An. ARDIYANSYAH tanggal 08 September 2015.
34. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima asli dari Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun untuk debitur saksi ARDIYANSYAH berupa Sertifikat HGB Asli An. ARDIYANSYAH (891083) Perumahan Griya Praja Karimun Blok E No. 21 Tebing Luas 148 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh delapan meter persegi) tanggal 22 Januari 2016 dari saksi ARDIYANSYAH kepada saksi TONI CHANDRA (pegawai BPR Karimun Sejahtera).
35. 4 (empat) lembar Nota belanja asli dan salinan untuk keperluan pribadi saksi ARDIYANSYAH pada Tahun 2015.
36. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Nota Pembayaran Tiket Pesawat pada PT. INDAH JATI KARIMUN untuk Pesawat Lion atas nama saksi NURLELA dengan harga sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2015 kepada saksi ADI PEMDA.
37. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran Sisa Down Payment (DP) untuk pembelian Honda Civic dari saksi ARDIYANSYAH kepada PT. PAJAR TRIO PERKASA CENTRAL AUTOMALL sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 05 Maret 2015.
38. 3 (tiga) lembar Kwitansi asli pembayaran dari saksi ABDUL GAFUR kepada PT. SEMESTA ABADI MOTOR Tg. Balai Karimun

Halaman 118 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Polisi BP 3110 JK masing-masing pada bulan April, Juli dan Oktober 2014

39. 2 (dua) lembar Kwitansi asli pembayaran Kredit 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi DHORA PUSPA SARI kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda / Beat Warna Putih dengan No. Polisi BP 3110 JK masing-masing pada bulan Desember 2015 dan bulan Januari 2016.
40. 1 (satu) buah Kwitansi asli pembayaran dari saksi ARDIYANSYAH kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Kredit Barang Elektronik dengan No. Kontrak / redit : 1409 – 0048 sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
41. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran dari saksi ARDIYANSYAH kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Kredit 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk KAWASAKI KLX S/C Warna Hitam dengan No. Polisi BP 6741 IK dengan jumlah sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 05 September 2015.
42. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran dari saksi ARDIYANSYAH kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Pelunasan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Warna Hitam dengan No. Polisi BP 6741 IK sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
43. 3 (tiga) lembar dalam satu rangkap Print Out Rekening Giro HIT BUNGA BB PERORANGAN dengan No. Rekening 0361928404 atas nama saksi ARDIYANSYAH periode 01 Desember 2014 s/d 05 Mei 2015 yang telah ditulis dan diberi tanda
44. 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri Asli An. MUSLIM dengan Nomor Rekening 109-00-1515020-4.
45. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Januari tahun 2014.
46. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Februari tahun 2014
47. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Maret tahun 2014

Halaman 119 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan April tahun 2014 stabilo oleh saksi ARDIYANSYAH.
49. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Mei tahun 2014
50. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Juni tahun 2014
51. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Juli tahun 2014
52. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Agustus tahun 2014
53. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan September tahun 2014
54. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Oktober tahun 2014
55. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan November bulan Desember tahun 2014
56. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Januari – Februari tahun 2015
57. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Maret tahun 2015
58. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan April – Mei tahun 2015
59. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Juni tahun 2015
60. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Juli – September tahun 2015
61. 2 (dua) lembar Slip penyetoran Asli Bank riau ke Rekening 1118208842 an. INDRA GUNAWAN, S.Sos, yang disetor pada tanggal 16 Februari 2015 dan tanggal 30 Desember 2015
62. 1 (satu) bundel Photo Copy Daftar Potongan Angsuran Pegawai Dinas Sosial Karimun Bank Riau Kepri pada bulan Maret, April, Juni, Juli, Agustus, Oktober, Nopember, Desember 2015.
63. 1 (satu) bundel Daftar transfer gaji dan insentif/kesra DINSOS Asli pada bulan Maret 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan April 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Mei 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Juni 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Juli 2015 yang

Halaman 120 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA.

64. 1 (satu) bundel Daftar Tagihan Bank Syariah Mandiri Asli dibayarkan ke Rek Escrow 70222335418 pada bulan April 2015, pada bulan Mei 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan Juni 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan Juli 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan September 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan Oktober 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan November 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN dan EFFY YANTI, pada tanggal Desember 2015 ditanda tangani oleh AGUS SALIM.
65. 3 (tiga) lembar Asli Surat Tanda Setoran sisa UP tahun 2015 sebesar Rp 500.000.000, Rp 13.000.000 dan Surat Tanda Setoran sisa UP tahun 2016 sebesar Rp 307.956.000 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Saksi INDRA GUNAWAN, S.Sos
66. 3 (tiga) lembar Formulir Penyetoran Asli ke Nomor Rekening 111.02.00055 yang disetorkan pada tanggal 12 - 2 - 2016 sebesar Rp 500.000.00 oleh H. INDRA GUNAWAN, S.Sos, yang disetorkan pada tanggal 17 / 02 / 2016 sebesar Rp 13.000.000 oleh EFFY, yang disetorkan pada tanggal 10 Jan 2017 sebesar Rp 307.956.000 oleh EDDY ISWANTO
67. 1 (satu) bundel Slip penyetoran Asli Bank riau ke Rekening 1118209157 an. ARDIANSYAH, yang disetorkan pada tanggal 09 / 06 / 2016 sebesar Rp 3.250.000 oleh EFFY, pada tanggal 21 / 07 / 2016 sebesar Rp 3.250.000 oleh EFFY, pada tanggal 19 - 08 - 2016 Rp 3.250.000 oleh EFFY, pada tanggal 18 - 11 - 2016 sebesar Rp 3.250.000 oleh EFFY
68. 1 (satu) bundel Slip penyetoran Asli Bank riau ke Rekening 1118208842 an. INDRA GUNAWAN, S.Sos, yang disetorkan pada tanggal 17 / 02 / 2016 sebesar Rp 21.165.382 oleh EFFY, pada tanggal 09 / 06 / 2016 sebesar Rp 21.165.382 oleh EFFY, pada tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp 10.582.691 oleh EFFY, pada tanggal 19 - 08 - 2016 sebesar Rp 10.582.691 oleh EFFY, pada tanggal 14 - 10 - 2016 sebesar Rp 10.582.691 oleh EFFY YANTI, pada tanggal 18 - 11 - 2016 sebesar Rp. 10.582.691 oleh EFFY YANTI

Halaman 121 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR





69. 1 (satu) bundel Daftar Tagihan Bank Syariah Mandiri dibayarkan ke Rek Escrow 70222335418 pada bulan Januari 2016 yang ditanda tangani oleh EFFY dan AGUS SALIM pada bulan Februari 2016 yang ditanda tangani oleh EFFY dan AGUS SALIM, pada bulan Maret 2016 yang ditanda tangani oleh AGUS SALIM, pada bulan April 2016 yang ditanda tangani oleh AGUS SALIM, pada bulan Mei 2016 yang ditanda tangani oleh AGUS SALIM.
70. 1 (satu) bundel Photo Copy Daftar Potongan Angsuran Pegawai Dinas Sosial Karimun Bank Riau Kepri pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, 2016
71. 1 (satu) bundel Photo Copy Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Nomor Rek 111-03-00019 An. BENDAHARA DINAS SOSIAL KA tahun 2014, 2015, 2016
72. 2 (dua) Bundel SPJ Asli Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH (Unit Pengelola Program Keluarga Harapan) Kab. Karimun tahun 2014.
73. 2 (dua) Bundel SPJ Asli Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH (Unit Pengelola Program Keluarga Harapan) Kab. Karimun 2015
74. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera tahun 2015
75. 2 (dua) Bundel SPJ Asli Kegiatan Pembinaan Lembaga Taruna siaga bencana Kabupaten Karimun 2016
76. 1 (satu) Bundel 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) tahun 2014.
77. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Sosialisasi dan Bimtek Reguler Servis Provider UPPKH Kab. Karimun tahun 2014
78. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Updating Data PMKS dan PSKS Kab. Karimun bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2015
79. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pengadaan Logistik Bencana bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2015.
80. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Verifikasi dan Penetapan Penerima Hibah Pembangunan / Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS tahun 2014, bulan Agustus, bulan Oktober dan bulan Desember
81. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan program penanggulangan kemiskinan RT

Halaman 122 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Bundel Amprah Gaji PNS & Honorer Asli Dinas Sosial tahun 2014
83. 1 (satu) Bundel Amprah Gaji PNS & Honorer Asli Dinas Sosial tahun 2016
84. 1 (satu) buah Map yang berisi beberapa Lembar surat masuk tahun 2014 sebagian ditanda-tangani dan sebagian lagi tidak ditanda-tangani dan 1 (satu) Bundel kwitansi tanda –terima asli uang saku tanda terima peserta pelatihan ODK yang ditanda-tangani oleh pihak penerima tahun 2015.
85. 1 (satu) Bundel Hasil Print dari Aplikasi Simda Kartu Kendali Kegiatan Tahun 2014, 2015 dan 2016.
86. 2 (Dua) Buah Buku Nota Kontan warna hijau Asli masing-masing berukuran Besar & Kecil
87. 1 (satu) Map yang undangan Bimtek Asli untuk Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2015
88. 1 (satu) Map yang berisi 1 (satu) bundle hasil print daftar nama pegawai yang dipakai untuk SPJ-ADUM tahun 2016 dan beberapa lembar SPPD asli pegawai Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2016
89. 1 (satu) Buah buku Renja asli Dinas Sosial tahun 2015
90. 1 (satu) Bundel Hasil Print Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS / CPNS tahun 2014 dan 2015
91. 12 (Dua Belas) Bundel Asli SPJ Kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2016
92. 1 (Satu) Bundel DPPA Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
93. 1 (Satu) Bundel DPA Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
94. 1 (Satu) Bundel RKAP Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
95. 1 (Satu) Bundel RKA Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
96. 1 (Satu) Bundel hasil print BKU Gabungan Dinas Sosial Kab. Karimun yang tidak ditanda-tangani Tahun 2014, 2014 dan 2016.
97. 1 (Satu) buah Map File yang berisi Berita Acara Pemeriksaan KAS asli oleh Inspektorat Kab. Karimun Tahun 2014 dan 2015 serta Register Penutupan Kas asli Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2014

Halaman 123 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (Satu) Kotak dokumen photo copy yang berisi SPJ belanja, Realisasi Anggaran, Angkas Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2016 dan Register SP2D Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2014
99. 3 (Tiga) Buku Register SPT Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
100. 1 (Satu) Map yang berisi hasil print Aplikasi Simda yang tidak ditanda-tangani berupa dokumen Laporan Realisasi Semester pertama APBD Dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya.
101. 1 (Satu) Map Plastik Warna Hijau yang berisi dokumen hasil print Rekapitulasi perjalanan dinas luar daerah / luar Negeri Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2016, dan beberapa dokumen STS kegiatan PPTK Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2015 dan 2016.
102. 1 (Satu) Map yang berisi dokumen berupa SPDD Asli dan SPT yang belum ditanda-tangani pegawai dinas sosial atas nama saksi RIDWAN, saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan saksi REFA DELI DEWITA tahun 2015, dan kwitansi Lumpsum serta 2 (dua) Tiket Kapal KM. KURNIA JAYA dari Karimun ke Tg. Pinang.
103. 1 (Satu) Map plastik warna kuning yang berisi dokumen Asli berupa STS atas Temuan BKP atas penggunaan UP tahun 2015 Dinas Sosial Kab. Karimun sebesar Rp. 143.054.538,- yang disetorkan tanggal 13 Mei 2016.
104. 1 (Satu) Map yang berisi hasil print out asli Rekening Koran bendahara pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016.
105. 1 (Satu) Berkas SK pengangkatan PPTK ASLI dilingkungan dinsos Tahun 2014, 2015, 2016.
106. 1 (Satu) Berkas SK penunjukan / penetapan PA Bendahara & pembantu bendahara dilingkup dinsos Kab Karimun Tahun 2014 (F copy 2015 & 2016 ASLI).
107. 1 (Satu) buah Map yang berisi dokumen hasil print berupa Stok opname 2016.
108. 1 (Satu) buah Map yang berisi berapa lembar dokumen asli hutang Dinas Sosial Kab. Karimun.
109. 1 (Satu) buah Map yang berisi dokumen hasil print berupa Surat permintaan pembayaran (SPP) Tahun 2016
110. 1 (Satu) buah Map yang berisi dokumen hasil print berupa Laporan Realisasi semester pertama APBD & Prognosis Tahun 2016.

Halaman 124 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111. 4 (Empat) Bundel Kwitansi pembayaran baru an ARDIYANSYAH & INDRA GUNAWAN, S.Sos yang belum dipergunakan
112. 3 (Tiga) Bonggol Buku Cek BANK RIAU KEPRI Asli Tahun 2014, 2015, 2016 dengan No Rekening 111-03-00019 an. Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab Karimun.
113. 5 (Lima) Buah stample
114. 3 (Tiga) Asli Kegiatan Pembinaan & Pengawasan Penjaga TPU, Registrasi pendataan TPU & TPBU, ASISTENS, Tahun 2016
115. 2 (Dua) Bundel SPJ Asli kegiatan Tangap Darurat Jenazah Terlantar Tahun 2015
116. 2 (Dua) Bundel SPJ Asli kegiatan Pembinaan, Laporan Keranda ASONGAN Tahun 2014
117. 1 (Satu) Bundel Kwitansi Asli penyerahan anggaran kepada PPTK dari Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kab Karimun Bulan Juni s/d Desember 2016
118. 1 (Satu) Buah Buku Panjar uang kegiatan Asli dari bendahara Pengeluaran Dinas Sosial kepada PPTK Kegiatan Dinas Sosial Kab. Karimun pada Bulan Juni 2016 s/d Desember 2016
119. 1 (Satu) Bundel SPJ asli kegiatan pelayanan social & perlindungan orang dengan kecacatan Tahun 2014.
120. 1 (Satu) Bundel SPJ asli kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan kesejahteraan social kab karimun Tahun 2014
121. 1 (Satu) Bundel SPJ Asli kegiatan pelayanan & rehabilitas perlindungan social anak Tahun 2014
122. 1 (Satu) Bundel SPJ Asli kegiatan pelayanan sosial lanjut usia (Lansia).
123. 1 (satu) lembar Salinan Bukti Setoran Bank BPR Mega Lestari Tg Balai Karimun untuk Pembayaran setoran AC No. Rekening 01.1.002866.6 atas nama Saksi INDRA GUNAWAN pada tgl 07 Oktober 2015 dengan nilai setoran sebesar Rp. 8.600.000,-
124. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan fasilitas monitoring evaluasi dan pelaporan program penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (Monev) kelompok usaha bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap pendamping Kube), tanggal 08 Desember 2014.
125. 1 (satu) Bundel Asli Pembinaan kapasitas lembaga tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, tanggal 28 April 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) Bundel Asli SPJ Fasilitas money dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan KUBE (Insentif Pendamping KUBE), tanggal 22 Agustus 2014
127. 1 (satu) Lembar Cek Asli Bank BNI Nomor C0534558 sebesar Rp 28.000.000 Kepada MUHAMMAD AMIN, pada tanggal 28 April 2015.
128. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Tunasosial Tahun 2016.
129. 1 (satu) Rangkap Asli Print Out Rekening Koran an. Saksi JUMARI Januari 2016 s/d 30 Juni 2016.
130. 1 (satu) Bundel copy SPJ kegiatan pelayanan dan rehabilitasi perlindungan sosial anak tahun 2014.
131. 1 (satu) Bundel copy SPJ Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tahun 2014.
132. 2 (dua) Bundel Asli Kegiatan Pelayanan Sosial dan Perlindungan orang dengan kecacatan (ODK) Penyandang Disabilitas Tahun 2016.
133. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan (SHARING DENGAN PROPINSI KEPRI) Tahun 2014.
134. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD Melalui Pameran dan Pawai Pembangunan Tahun 2014.
135. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan Dukungan Operasional Pembangunan Rumah Suku Duanan Kec. Kundur Tahun 2014
136. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah Terlantar Tahun 2014.
137. 2 (dua) Bundel Asli Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah Terlantar Tahun 2015.
138. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum Tahun 2015.
139. 3 (tiga) Bundel Asli Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan Tahun 2015.
140. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) Tahun 2015.
141. 5 (Lima) Bundel Asli Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Beras Sejahtera Kab. Karimun Tahun 2016.

PBR

Halaman 126 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



142. 6 (enam) Bundel Asli Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan Tahun 2016
143. 2 (dua) Bundel Asli Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016
144. 3 (tiga) Bundel Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun 2014 sampai tahun 2016 beserta lampiran dokumen kelengkapannya.
145. 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri yang disetorkan ke Rek 111.02000.55 DANA PAD PEMKAB KARIMUN sebesar Rp. 139.174.400 (Seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang merupakan setoran sisa UP Tahun 2014 disetorkan oleh Saksi ARDIYANSYAH tanggal 7-1-2015.
146. 6 (enam) Lembar Salinan Bukti Setoran Bank BPR Mega Mas Lestari Tg Balai Karimun untuk Pembayaran setoran AC No. Rekening 01.1.002866.6 atas nama Saksi INDRA GUNAWAN masing-masing dengan rincian :
- Tgl 11 Mei 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.600.000,-
  - Tgl 08 Juni 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.500.000,-
  - Tgl 13 Juli 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.500.000,-
  - Tgl 18 Agustus 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.500.000,-
  - Tgl 07 September 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.500.000,-
  - Tgl 20 Desember 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.500.000,-
147. 1 (satu) lembar Salinan Bukti Setoran Bank BPR Mega Lestari Tg Balai Karimun untuk Pembayaran setoran AC No. Rekening 01.1.002866.6 atas nama Saksi INDRA GUNAWAN pada tgl 07 Oktober 2015 dengan nilai setoran sebesar Rp. 8.600.000,-
148. 1 (Satu) Unit Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Hitam Metalik No Polisi BP 1738 YK dan No Rangka: MHKM1BA3JBK000680, No mesin : DJ78510





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Hitam Metalik No Polisi BP 1738 YK dan No Rangka: MHKM1BA3JBK000680, No mesin : DJ78510
- 1 (Satu) Set Kunci Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Hitam Metalik No Polisi BP 1738 YK dan No Rangka: MHKM1BA3JBK000680, No mesin : DJ78510
- 149. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda HR-V No. Polisi BP 1866 MY Warna Abu-abu Baja Metalik, dengan No. Mesin L15Z61018646 dan No. Rangka MHRURU1850FJ413737
  - 1 (satu) buah BPKB Asli Mobil merk Honda HR-V No. Polisi BP 1866 MY Wara Abu-abu Baja Methalik degan No. Mesin L15Z61018646 dan No. Rangka MHRURU1850FJ413737 atas nama pemilik Saksi MARIANI
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Asli Mobil Merk Honda HR-V No. Polisi BP 1866 MY Warna Abu-abu Baja Metalik, dengan No. Mesin L15Z61018646 dan No. Rangka MHRURU1850FJ413737 atas nama pemilik Saksi MARIANI
  - 1 (satu) Set Kunci Mobil merk Honda HR-V dengan No. Polisi BP 1866 MY Warna Abu-abu Baja Metalik.

## Dipergunakan dalam berkas perkara **ARDIANSYAH ALS ARDI BIN ABBAS SABRAH**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg tanggal 5 Desember 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA GUNAWAN S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi secara Bersama-sama” sebagaimana di dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA GUNAWAN S.Sos dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 128 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.728.202.000,00 ( dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah buku catatan rekapitulasi pengeluaran atas penggunaan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab Karimun pada TA. 2014 dan 2015 dengan sampul warna Hitam dan betuliskan Agenda Kerja ERICA 166.
  2. 2 (dua) buah buku catatan rekapitulasi pencatatan pengeluaran penggunaan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun TA. 2014 dan 2015 dengan sampul warna Biru dan bertuliskan BUKU KAS merk KWARTO.
  3. 1 (satu) buah buku catatan uang panjar kegiatan bendahara pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2013 s/d 2015, dengan sampul berwarna Hijau dan bertuliskan BUKU PANJAR.
  4. 1 (satu) buah buku catatan pribadi saksi ARDIYANSYAH dengan sampul berwarna merah coklat berlogo Pemda Kab. Karimun dan bertuliskan ASISTENSI DAN FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014.
  5. 1 (satu) bundel Map plastik bertulang merk HOMBO warna merah jambu transparan yang berisi kwitansi tanda terima anggaran asli dan salin kegiatan dan Nota Dinas Pengajuan Ganti Uang (GU) PPTK pada SKPD Dinas Sosial Kab Karimun TA. 2014
  6. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Giro Bank BNI Cabang Tg. Balai Karimun atas nama Sdr. ARDIYANSYAH dengan No. Rekening 0361928404 periode tanggal 01 Desember 2014 s/d 31 Januari 2015.

PBR

Halaman 129 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) buah Buku Kwitansi asli berukuran besar merk Sinar Dunia masing-masing berwarna Orange dan berwarna Ungu.
8. 1 (satu) buah Buku Kwitansi berukuran Sedang merk Sinar Dunia berwarna Kuning.
9. 1 (satu) buah bonggol Buku Cek Asli Bank BNI Cabang Tg. Balai Karimun dengan Nomor Rekening 0361928404 atas nama saksiARDIYANSYAH dengan No. Cek CN 431151 s/d CN 431175.
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan Asli Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun dengan Nomor Rekening : 01.1.001381.9 atas nama saksiARDIYANSYAH.
11. 1 (satu) buah Buku Tabungan Asli Bank Riau Kepri dengan No. Rekening 111-21-16419 atas nama saksiARDIYANSYAH.
12. 1 (satu) bundel Kwitansi penyerahan uang anggaran kegiatan dari bendahara pengeluaran Dinas Sosial saksiARDIANSYAH kepada PPTK Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 dan 2015.
13. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran biaya gaji Asli dan Salinan pegawai honor petugas kebersihan dan penjaga kapal Resque pada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 dan 2015
14. 1 (satu) bundel Nota pembayaran Asli dan salinan atas pembelian sejumlah barang oleh saksiARDIYANSYAH dengan menggunakan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 dan 2015.
15. (satu) bundel asli dan salinan Nota pembayaran biaya service dan biaya pembelian spare part serta pembelian BBM kendaraan Dinas saksi INDRA GUNAWAN,S.Sos yaitu Mobil Kijang dengan No. Pol BP 1081 K
16. 1 (satu) bundel salinan Kwitansi Pembayaran Air Bak.
17. 1 (satu) bundel Kwitansi asli dan salinan Pembayaran Belanja Jasa Propaganda dari Dinas Sosial kepada Media Haluan Kepri pada tahun 2014 dan 2015
18. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi pemberian Pinjaman kepada Pak ARMAN dengan Nilai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 8 April 2014.
19. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi dari Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun kepada LVRI (Lembaga Veteran Republik Indonesia) Kab. Karimun yang diterima oleh saksiM. EDY YUSUF untuk pembayaran Titipan Dana APBD 2014 Dinsos sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dengan keterangan Sudah disetorkan

Halaman 130 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditanda-tangani oleh saksi INDRA GUNAWAN, S.Sos dan saksi ARDIYANSYAH.

20. 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanda terima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Ketua LVRI Kab. Karimun saksi M. EDY YUSUF kepada saksi ARDIANSYAH untuk pembayaran Titipan Dana APBD Tahun 2014 Dinas Sosial sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan masih kurang pelunasan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
21. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi dari Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun kepada saksi SURIPTO untuk pembayaran Titipan Dana Honor
22. 1 (satu) Lembar Kwitansi asli dari saksi ARDIYANSYAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran sumbangan Anak Bapak NURDIN BASIRUN.
23. 1 (satu) lembar salinan Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Rekening Bendahara Dinas Sosial Kab. Karimun dengan No. Rek : 1110300019 oleh saksi ARDIANSYAH untuk Dana UP tanggal 04 Februari 2015 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar Kwitansi asli rangkap 3 (tiga) sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Panjar Kegiatan Hj. DARLISMA bulan Juni 2014 yang diberikan kepada saksi ARDIYANSYAH untuk dipakai dulu (Pak Dul) yang ditanda-tangani oleh saksi Hj. DARLISMA dan saksi ARDIANSYAH dengan keterangan Lunas.
25. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi dalam rangkap 2 (dua) uang sebesar Rp. 67.675.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Kegiatan Administrasi Umum Bulan Juni 2014 No 0075/SPT/1.B.01.01/VII/2014 yang dibayarkan kepada saksi ARDIYANSYAH, tanggal 10 Juli 2014 yang ditanda-tangani oleh saksi ARDIYANSYAH
26. 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari Toko Shop & Save sebesar Rp. 11.574.000,- (sebelas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk biaya pembayaran Pembelanjaan di Market Shop & Save.
27. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bantuan Biaya Buka Puasa dan Makan Sahur di Mesjid Agung Kab. Karimun dari Kepala Dinas

Halaman 131 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kab. Karimun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2014.

28. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan Uang dari saksi AGUS SETIAWAN uang diterima oleh saksi ARDIANYSAH untuk pembayaran Pinjaman Dana Guna Untuk Keperluan Kantor Dinas Sosial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 9 Desember 2014.
29. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pemindahbukuan Bank BNI Batam dari No. Rek : 0297396365 An. AGUSTIAWAN ke No. Rek : 0361607264 An. ARDIYANSYAH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 10 Desember 2014.
30. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pemindahbukuan Bank BNI Pekanbaru dari No. Rek : 0297396365 An. AGUSTIAWAN ke No. Rek : 0361607264 An. ARDIYANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2014 dengan keterangan berupa peminjaman uang.
31. 1 (satu) lembar Foto copy formulir pemindahan bukuan Bank BNI Pekanbaru dari No Rek : 0361607264 An. AGUSTIAWAN Bank BNI Cab. Suka Ramai Pekanbaru Ke No Rek : 0361607264 An. ARDIYANSYAH sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 15 desember 2014 dengan keterangan berupa pinjaman uang.
32. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pemindahbukuan Bank BNI Pekanbaru dari No. Rek : 0297396365 An. AGUSTIAWAN Bank BNI Cab. Pekanbaru ke No. Rek : 0361607264 An. ARDIYANSYAH sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Desember 2014 dengan keterangan berupa peminjaman uang.
33. 1 (satu) lembar salinan Slip Bukti Setoran pada Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun dengan jumlah setoran sebesar Rp. 4.778.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ke No. Rek : 0110013819 An. ARDIYANSYAH tanggal 08 September 2015.
34. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima asli dari Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun untuk debitur saksi ARDIYANSYAH berupa Sertifikat HGB Asli An. ARDIYANSYAH (891083) Perumahan Griya Praja Karimun Blok E No. 21 Tebing Luas 148 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh delapan meter persegi) tanggal 22 Januari 2016 dari

Halaman 132 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksiARDIYANSYAH kepada saksiTONI CHANDRA (pegawai BPR Karimun Sejahtera).

35. 4 (empat) lembar Nota belanja asli dan salinan untuk keperluan pribadi saksiARDIYANSYAH pada Tahun 2015.
36. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Nota Pembayaran Tiket Pesawat pada PT. INDAH JATI KARIMUN untuk Pesawat Lion atas nama saksi NURLELA dengan harga sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2015 kepada saksiADI PEMDA.
37. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran Sisa Down Payment (DP) untuk pembelian Honda Civic dari saksi ARDIYANSYAH kepada PT. PAJAR TRIO PERKASA CENTRAL AUTOMALL sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 05 Maret 2015.
38. 3 (tiga) lembar Kwitansi asli pembayaran dari saksiABDUL GAFUR kepada PT. SEMESTA ABADI MOTOR Tg. Balai Karimun untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Polisi BP 3110 JK masing-masing pada bulan April, Juli dan Oktober 2014
39. 2 (dua) lembar Kwitansi asli pembayaran Kredit 1 (satu) unit sepeda motor dari saksiDHORA PUSPA SARI kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda / Beat Warna Putih dengan No. Polisi BP 3110 JK masing-masing pada bulan Desember 2015 dan bulan Januari 2016.
40. 1 (satu) buah Kwitansi asli pembayaran dari saksi ARDIYANSYAH kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Kredit Barang Elektronik dengan No. Kontrak / kredit : 1409 – 0048 sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
41. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran dari saksi ARDIYANSYAH kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Kredit 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk KAWASAKI KLX S/C Warna Hitam dengan No. Polisi BP 6741 IK dengan jumlah sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 05 September 2015.
42. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran dari saksi ARDIYANSYAH kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Pelunasan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki

Halaman 133 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam dengan No. Polisi BP 6741 IK sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.

43. 3 (tiga) lembar dalam satu rangkap Print Out Rekening Giro HIT BUNGA BB PERORANGAN dengan No. Rekening 0361928404 atas nama saksiARDIYANSYAH periode 01 Desember 2014 s/d 05 Mei 2015 yang telah ditulis dan diberi tanda
44. 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri Asli An. MUSLIM dengan Nomor Rekening 109-00-1515020-4.
45. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Januari tahun 2014.
46. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Februari tahun 2014
47. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Maret tahun 2014
48. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan April tahun 2014stabilo oleh saksiARDIYANSYAH
49. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Mei tahun 2014
50. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Juni tahun 2014
51. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Juli tahun 2014
52. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Agustus tahun 2014
53. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan September tahun 2014
54. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Oktober tahun 2014
55. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan November, bulan Desember tahun 2014
56. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Januari – Februari tahun 2015
57. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Maret tahun 2015
58. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan April – Mei tahun 2015

Halaman 134 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Juni tahun 2015
60. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Juli – September tahun 2015
61. 2 (dua) lembar Slip penyetoran Asli Bank riau ke Rekening 1118208842 an. INDRA GUNAWAN, S.Sos, yang disetor pada tanggal 16 Februari 2015 dan tanggal 30 Desember 2015
62. 1 (satu) bundel Photo Copy Daftar Potongan Angsuran Pegawai Dinas Sosial Karimun Bank Riau Kepri pada bulan Maret, April, Juni, Juli, Agustus, Oktober, Nopember, Desember 2015.
63. 1 (satu) bundel Daftar transfer gaji dan insentif/kesra DINSOS Asli pada bulan Maret 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan April 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Mei 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Juni 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Juli 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA.
64. 1 (satu) bundel Daftar Tagihan Bank Syariah Mandiri Asli dibayarkan ke Rek Escrow 70222335418 pada bulan April 2015, pada bulan Mei 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan Juni 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan Juli 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan September 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan Oktober 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan November 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN dan EFFY YANTI, pada tanggal Desember 2015 ditanda tangani oleh AGUS SALIM.
65. 3 (tiga) lembar Asli Surat Tanda Setoran sisa UP tahun 2015 sebesar Rp 500.000.000, Rp 13.000.000 dan Surat Tanda Setoran sisa UP tahun 2016 sebesar Rp 307.956.000 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Sdr. INDRA GUNAWAN, S.Sos
66. 3 (tiga) lembar Formulir Penyetoran Asli ke Nomor Rekening 111.02.00055 yang disetorkan pada tanggal 12 – 2 – 2016 sebesar Rp 500.000.00 oleh H. INDRA GUNAWAN, S.Sos, yang disetorkan pada tanggal 17 / 02 / 2016 sebesar Rp 13.000.000 oleh EFFY, yang disetorkan pada tanggal 10 Jan 2017 sebesar Rp 307.956.000 oleh EDDY ISWANTO

PBR

Halaman 135 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel Slip penyetoran Asli Bank riau ke Rekening 1118209157 an. ARDIANSYAH, yang disetorkan pada tanggal 09 / 06 / 2016 sebesar Rp 3.250.000 oleh EFFY, pada tanggal 21 / 07 / 2016 sebesar Rp 3.250.000 oleh EFFY, pada tanggal 19 - 08 - 2016 Rp 3.250.000 oleh EFFY, pada tanggal 18 - 11 - 2016 sebesar Rp 3.250.000 oleh EFFY
68. 1 (satu) bundel Slip penyetoran Asli Bank riau ke Rekening 1118208842 an. INDRA GUNAWAN, S.Sos, yang disetorkan pada tanggal 17 / 02 / 2016 sebesar Rp 21.165.382 oleh EFFY, pada tanggal 09 / 06 / 2016 sebesar Rp 21.165.382 oleh EFFY, pada tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp 10.582.691 oleh EFFY, pada tanggal 19 - 08 - 2016 sebesar Rp 10.582.691 oleh EFFY, pada tanggal 14 - 10 - 2016 sebesar Rp 10.582.691 oleh EFFY YANTI, pada tanggal 18 - 11 - 2016 sebesar Rp. 10.582.691 oleh EFFY YANTI
69. 1 (satu) bundel Daftar Tagihan Bank Syariah Mandiri dibayarkan ke Rek Escrow 70222335418 pada bulan Januari 2016 yang ditanda tangani oleh EFFY dan AGUS SALIM pada bulan Februari 2016 yang ditanda tangani oleh EFFY dan AGUS SALIM, pada bulan Maret 2016 yang ditanda tangani oleh AGUS SALIM, pada bulan April 2016 yang ditanda tangani oleh AGUS SALIM, pada bulan Mei 2016 yang ditanda tangani oleh AGUS SALIM.
70. 1 (satu) bundel Photo Copy Daftar Potongan Angsuran Pegawai Dinas Sosial Karimun Bank Riau Kepri pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, 2016
71. 1 (satu) bundel Photo Copy Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Nomor Rek 111-03-00019 An. BENDAHARA DINAS SOSIAL KA tahun 2014, 2015, 2016
72. 2 (dua) Bundel SPJ Asli Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH (Unit Pengelola Program Keluarga Harapan) Kab. Karimun tahun 2014.
73. 2 (dua) Bundel SPJ Asli Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH (Unit Pengelola Program Keluarga Harapan) Kab. Karimun 2015
74. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera tahun 2015
75. 2 (dua) Bundel SPJ Asli Kegiatan Pembinaan Lembaga Taruna siaga bencana Kabupaten Karimun 2016

Halaman 136 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) Bundel 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) tahun 2014
77. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Sosialisasi dan Bimtek Reguler Servis Provider UPPKH Kab. Karimun tahun 2014
78. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Updating Data PMKS dan PSKS Kab. Karimun bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2015
79. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pengadaan Logistik Bencana bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2015.
80. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Verifikasi dan Penetapan Penerima Hibah Pembangunan / Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS tahun 2014, bulan Agustus, bulan Oktober dan bulan Desember
81. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan program penanggulangan kemiskinan RT
82. 1 (satu) Bundle Amprah Gaji PNS & Honorer Asli Dinas Sosial tahun 2014
83. 1 (satu) Bundle Amprah Gaji PNS & Honorer Asli Dinas Sosial tahun 2016
84. 1 (satu) buah Map yang berisi beberapa Lembar surat masuk tahun 2014 sebagian ditandatangani dan sebagian lagi tidak ditandatangani dan 1 (satu) bundle kwitansi tanda –terima asli uang saku tanda terima peserta pelatihan ODK yang ditanda-tangani oleh pihak penerima tahun 2015.
85. 1 (satu) Bundle Hasil Print dari Aplikasi Simda Kartu Kendali Kegiatan Tahun 2014, 2015 dan 2016.
86. 2 (Dua) Buah Buku Nota Kontan warna hijau Asli masing-masing berukuran Besar & Kecil
87. 1 (satu) Map yang undangan Bimtek Asli untuk Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2015
88. 1 (satu) Map yang berisi 1 (satu) bundle hasil print daftar nama pegawai yang dipakai untuk SPJ-ADUM tahun 2016 dan beberapa lembar SPPD asli pegawai Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2016
89. 1 (satu) Buah buku Renja asli Dinas Sosial tahun 2015
90. 1 (satu) Bundle Hasil Print Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS / CPNS tahun 2014 dan 2015
91. 12 (Dua Belas) Bundle Asli SPJ Kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2016

Halaman 137 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (Satu) Bundle DPPA Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
93. 1 (Satu) Bundle DPA Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
94. 1 (Satu) Bundle RKAP Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
95. 1 (Satu) Bundle RKA Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
96. 1 (Satu) Bundle hasil print BKU Gabungan Dinas Sosial Kab. Karimun yang tidak ditanda-tangani Tahun 2014, 2014 dan 2016.
97. 1 (Satu) buah Map File yang berisi Berita Acara Pemeriksaan KAS asli oleh Inspektorat Kab. Karimun Tahun 2014 dan 2015 serta Register Penutupan Kas asli Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2014
98. 1 (Satu) Kotak dokumen photo copy yang berisi SPJ belanja, Realisasi Anggaran, Angkas Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2016 dan Register SP2D Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2014
99. 3 (Tiga) Buku Register SPT Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
100. 1 (Satu) Map yang berisi hasil print Aplikasi Simda yang tidak ditandatangani berupa dokumen Laporan Realisasi Semester pertama APBD Dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya.
101. 1 (Satu) Map Plastik Warna Hijau yang berisi dokumen hasil print Rekapitulasi perjalanan dinas luar daerah / luar Negeri Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2016, dan beberapa dokumen STS kegiatan PPTK Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2015 dan 2016.
102. 1 (Satu) Map yang berisi dokumen berupa SPDD Asli dan SPT yang belum ditanda-tangani pegawai dinas sosial atas nama saksiRIDWAN, SaksiSKANDAR ZULKARNAL dan saksi REFA DELI DEWITA tahun 2015, dan kwitansi Lumpsum serta 2 (dua) Tiket Kapal KM. KURNIA JAYA dari Karimun ke Tg. Pinang.
103. 1 (Satu) Map plastik warna kuning yang berisi dokumen Asli berupa STS atas Temuan BKP atas penggunaan UP tahun 2015 Dinas Sosial Kab. Karimun sebesar Rp. 143.054.538,- yang disetorkan tanggal 13 Mei 2016.
104. 1 (Satu) Map yang berisi hasil print out asli Rekening Koran bendahara pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016.

Halaman 138 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (Satu) Berkas SK pengangkatan PPTK ASLI dilingkungan dinsos Tahun 2014, 2015, 2016.
106. 1 (Satu) Berkas SK penunjukan / penetapan PA Bendahara & pembantu bendahara dilingkup dinsos Kab Karimun Tahun 2014 (F copy 2015 & 2016 ASLI).
107. 1 (Satu) buah Map yang berisi dokumen hasil print berupa Stok opname 2016.
108. 1 (Satu) buah Map yang berisi berapa lembar dokumen asli hutang Dinas Sosial Kab. Karimun.
109. 1 (Satu) buah Map yang berisi dokumen hasil print berupa Surat permintaan pembayaran (SPP) Tahun 2016
110. 1 (Satu) buah Map yang berisi dokumen hasil print berupa Laporan Realisasi semester pertama APBD & Prognosis Tahun 2016.
111. 4 (Empat) Bundle Kwitansi pembayaran baru an ARDIYANSYAH & INDRA GUNAWAN, S.Sos yang belum dipergunakan
112. 3 (Tiga) Bongol Buku Cek BANK RIAU KEPRI Asli Tahun 2014, 2015, 2016 dengan No Rekening 111-03-00019 an. Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab Karimun.
113. 5 (Lima) Buah stample.
114. 3 (Tiga) Asli Kegiatan Pembinaan & Pengawasan Penjaga TPU, Registrasi pendataan TPU & TPBU, ASISTENS, Tahun 2016
115. 2 (Dua) Bundle SPJ Asli kegiatan Tangap Darurat Jenazah Terlantar Tahun 2015
116. 2 (Dua) Bundle SPJ Asli kegiatan Pembinaan, Laporan Keranda ASONGAN Tahun 2014
117. 1 (Satu) Bundle Kwitansi Asli penyerahan anggaran kepada PPTK dari Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kab Karimun Bulan Juni s/d Desember 2016
118. 1 (Satu) Buah Buku Panjar uang kegiatan Asli dari bendahara Pengeluaran Dinas Sosial kepada PPTK Kegiatan Dinas Sosial Kab. Karimun pada Bulan Juni 2016 s/d Desember 2016
119. 1 (Satu) Bundle SPJ asli kegiatan pelayanan sosial & perlindungan orang dengan kecacatan Tahun 2014.
120. 1 (Satu) Bundle SPJ asli kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan kesejahteraan social kab karimun Tahun 2014
121. 1 (Satu) Bundle SPJ Asli kegiatan pelayanan & rehabilitas perlindungan social anak Tahun 2014

Halaman 139 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





122. 1 (Satu) Bundle SPJ Asli kegiatan pelayanan sosial lanjut usia (Lansia).
123. 1 (satu) lembar Salinan Bukti Setoran Bank BPR Mega Lestari Tg Balai Karimun untuk Pembayaran setoran AC No. Rekening 01.1.002866.6 atas nama Sdr. INDRA GUNAWAN pada tgl 07 Oktober 2015 dengan nilai setoran sebesar Rp. 8.600.000,-
124. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan fasilitas monitoring evaluasi dan pelaporan program penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (Monev) kelompok usaha bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap pendamping Kube), tanggal 08 Desember 2014.
125. 1 (satu) Bundel Asli Pembinaan kapasitas lembaga tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, tanggal 28 April 2014.
126. 1 (satu) Bundel Asli SPJ Fasilitas monev dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan KUBE (Insentif Pendamping KUBE), tanggal 22 Agustus 2014
127. 1 (satu) Lembar Cek Asli Bank BNI Nomor C0534558 sebesar Rp 28.000.000 Kepada MUHAMMAD AMIN, pada tanggal 28 April 2015.
128. 1 (satu) Bundle Asli Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Tunasosial Tahun 2016.
129. 1 (satu) Rangkap Asli Print Out Rekening Koran an. SaksiJUMARI Januari 2016 s/d 30 Juni 2016.
130. 1 (satu) Bundle copy SPJ kegiatan pelayanan dan rehabilitasi perlindungan sosial anak tahun 2014.
131. 1 (satu) Bundle copy SPJ Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tahun 2014.
132. 2 (dua) Bundle Asli Kegiatan Pelayanan Sosial dan Perlindungan orang dengan kecacatan (ODK) Penyandang Disabilitas Tahun 2016.
133. 1(satu) Bundle Asli Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan (SHARING DENGAN PROPINSI KEPRI) Tahun 2014.
134. 1 (satu) Bundle Asli Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD Melalui Pameran dan Pawai Pembangunan Tahun 2014.
135. 1(satu) Bundle Asli Kegiatan Dukungan Operasional Pembangunan Rumah Suku Duanan Kec. Kundur Tahun 2014
136. 1 (satu) Bundle Asli Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah Terlantar Tahun 2014.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 2 (dua) Bundle Asli Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah Terlantar Tahun 2015
138. 1(satu) Bundle Asli Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum Tahun 2015.
139. 3 (tiga) Bundle Asli Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan Tahun 2015.
140. 1 (satu) Bundle Asli Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) Tahun 2015.
141. 5 (Lima) Bundle Asli Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Beras Sejahtera Kab. Karimun Tahun 2016.
142. 6 (enam) Bundle Asli Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan Tahun 2016
143. 2 (dua) Bundle Asli Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016
144. 3 (tiga) Bundle Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun 2014 sampai tahun 2016 beserta lampiran dokumen lengkapannya.
145. 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri yang disetorkan ke Rek 111.02000.55 DANA PAD PEMKAB KARIMUN sebesar Rp. 139.174.400 (Seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang merupakan setoran sisa UP Tahun 2014 disetorkan oleh Sdr. ARDIYANSYAH tanggal 7-1-2015.
146. 6 (enam) Lembar Salinan Bukti Setoran Bank BPR Mega Mas Lestari Tg Balai Karimun untuk Pembayaran setoran AC No. Rekening 01.1.002866.6 atas nama Sdr. INDRA GUNAWAN masing-masing dengan rincian :
  - Tgl 11 Mei 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp. 8.600.000,-
  - Tgl 08 Juni 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp. 8.500.000,-
  - Tgl 13 Juli 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp. 8.500.000,-
  - Tgl 18 Agustus 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp. 8.500.000,-

PBR

Halaman 141 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 07 September 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp. 8.500.000,-
- Tgl 20 Desember 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp. 8.500.000,-

147. 1 (satu) lembar Salinan Bukti Setoran Bank BPR Mega Lestari Tg Balai Karimun untuk Pembayaran setoran AC No. Rekening 01.1.002866.6 atas nama Sdr. INDRA GUNAWAN pada tgl 07 Oktober 2015 dengan nilai setoran sebesar Rp. 8.600.000,-

**Dikembalikan ke Dinas Sosial Kabupaten Karimun melalui Terdakwa.**

148. 1 (Satu) Unit Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Hitam Metalik No Polisi BP 1738 YK dan No Rangka: MHKM1BA3JBK000680, No mesin : DJ78510

- 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Hitam Metalik No Polisi BP 1738 YK dan No Rangka: MHKM1BA3JBK000680, No mesin : DJ78510
- 1 (Satu) Set Kunci Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Hitam Metalik No Polisi BP 1738 YK dan No Rangka: MHKM1BA3JBK000680, No mesin : DJ78510

**Dikembalikan kepada saksi MARZUKI.**

149.1 (satu) unit Mobil Merk Honda HR-V No. Polisi BP 1866 MY Warna Abu-abu Baja Metalik, dengan No. Mesin L15Z61018646 dan No. Rangka MHRRU1850FJ413737

- 1 (satu) buah BPKB Asli Mobil merk Honda HR-V No. Polisi BP 1866 MY Wara Abu-abu Baja Methalik degan No. Mesin L15Z61018646 dan No. Rangka MHRURU1850FJ413737 atas nama pemilik Saksi MARIANI
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Asli Mobil Merk Honda HR-V No. Polisi BP 1866 MY Warna Abu-abu Baja Metalik, dengan No. Mesin L15Z61018646 dan No. Rangka MHRRU1850FJ413737 atas nama pemilik Saksi MARIANI
- 1 (satu) Set Kunci Mobil merk Honda HR-V dengan No. Polisi BP 1866 MY Warna Abu-abu Baja Metalik.

**Dirampas Untuk Negara.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Halaman 142 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- ( dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2018/PN Tpg Jo Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg tanggal 10 Desember 2018, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2018/PN Tpg Jo Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg tanggal 11 Desember 2018, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 20 Desember sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2018/PN Tpg Jo Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg tanggal 26 Desember 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Januari 2019, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umu juga mengajukan kontra memori banding tertanggal Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tersebut telah memenuhi syarat tenggang

Halaman 143 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding tersebut terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penuntut Umum, beserta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg, tanggal 5 Desember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya merupakan pengulangan dari Pledoi yang telah dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan telah pula dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian alasan dan argumen Terdakwa dalam memori banding tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pada hakikatnya tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, serta tidak menimbulkan efek jera baik kepada Terdakwa maupun orang lain, maka dengan ini Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru agar memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada hakikatnya tidak sependapat dengan alasan dan argumen Terdakwa dalam memori bandingnya, maka Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh

Halaman 144 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang dijatuhkan, demikian juga dengan kontra memori bandingnya maka dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut baik dalam memori banding maupun dalam kontra memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg tanggal 5 Desember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar jumlah kerugian negara yang dinikmati oleh Terdakwa sebagai mana yang terdapat pada halaman 263 sampai dengan halaman 265 yaitu sebagai berikut;

Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, dimana dari jumlah kerugian negara sebesar Rp. 4.712.302.731,00- (empat milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dan selanjutnya dari penggunaan dana yang dinikmati oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN.S.Sos tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Hutang Terdakwa Ardiyansyah Alias Ardi dari Sdr. Agustiawan atas perintah dan permintaan dari Terdakwa Indra Gunawan, S.Sos selama bulan Desember 2014 sebesar **Rp.1.272.752.000,00**; ( satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Uang Persediaan tahun 2014 Dinas Sosial Kabupaten Karimun sebesar **RP. 350.000.000,00** (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan Terdakwa Ardiyansyah untuk membayar hutang pribadi Terdakwa Indra Gunawan kepada saksi Tony Charles dan Sdr. Agustiawan;
- Pembayaran Angsuran mobil dan angsuran pinjaman atas nama Indra Gunawan yang disetorkan ke BPR KS atas perintah Terdakwa Indra Gunawan sebesar : Rp. **74.505.000,00** (tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Uang Persediaan (UP) tahun 2015 dinas Sosial Kabupaten Karimun sebesar **Rp.513.000.000,00** (lima ratus tiga belas juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa Ardiyansyah atas perintah Indra Gunawan untuk membayar hutang Indra Gunawan kepada Sdr. Agustiawan;
- Pembayaran angsuran Hutang Indra Gunawan sebesar : Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan, yang berdasarkan fakta persidangan dibayarkan sejak Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 12 bulan ke Bank Riau Kepri cabang Tanjung Balai

Halaman 145 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun yang diambil dari anggaran Adum Dinas Sosial Kabupaten karimun sehingga :  $12 \times \text{Rp.7.000.000,00} = \text{Rp. 84.000.000,00}$  (delapan puluh empat juta rupiah).

- Hutang Terdakwa Indra Gunawan yang dipinjam atas nama saksi Ardiansyah yang dibayarkan sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya, yang berdasarkan fakta persidangan dibayarkan sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 (12 bulan) ke Bank Riau Kepri cabang Tanjung Balai Karimun yang diambil dari anggaran Adum Dinas Sosial Kabupaten Karimun Sehingga :  $12 \times \text{Rp. 3.250.000,00} = \text{Rp. 39.000.000,00}$  (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Pinjaman Terdakwa Indra Gunawan,S.Sos selama tahun 2015 yang belum ada diganti maupun dikembalikan sampai sekarang ini sebesar Rp. **16.500.000,00** (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Jasa servis mobil pribadi Terdakwa Indra Gunawan,S.Sos sebesar Rp.**1.220.000,00** (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) di Bengkel Akeng Kampung Baru Tebing.
- Pembayaran Tiket Pesawat Terdakwa Indra Gunawan untuk perjalanan dinas selama tahun 2015 sebesar Rp. **4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah), padahal sebelumnya uang untuk biaya dalam melakukan perjalanan dinas tersebut sudah diberikan utuh kepada Terdakwa Indra Gunawan,S.Sos.
- Permintaan atas bagian dari pencairan uang untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh saksi Abdullah sebesar Rp. **5.000.000,00** (lima juta rupiah)
- Uang Persediaan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2016 sebesar Rp. **384.750.000,00** (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa Indra Gunawan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa Indra Gunawan kepada pihak ketiga;
- Total dana yang dinikmati oleh Terdakwa Indra Gunawan S.Sos dan saksi Ardiansyah Alias Ardi dari tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah sebesar Rp. **2.728.202.000,-** (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari perhitungan jumlah yang dinikmati Terdakwa apabila dijumlahkan bukan Rp. **2.728.202.000,-** (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah). melainkan **2.745.227.000,-**

Halaman 146 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). dengan perincian sebagai berikut ;

Rp.	1.272.752.000,00	+
Rp.	350.000.000,00	+
Rp.	74.505.000,00	+
Rp.	513.000.000,00	+
Rp.	84.000.000,00	+
Rp.	39.000.000,00	+
Rp.	16.500.000,00	+
Rp.	1.220.000,00	+
Rp.	4.500.000,00	+
Rp.	5.000.000,00	+
Rp.	<u>384.750.000,00</u>	+
<b>Total</b>	<b>Rp. 2.745.227.000,00</b>	

(dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka kerugian negara yang dimikmati harus dikembalikan oleh Terdakwa jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang juga harus diperbaiki yaitu pertimbangan yang menyatakan sebagai berikut; "Total dana yang dinikmati oleh Terdakwa Indra Gunawan S.Sos **dan saksi Ardiyansyah Alias Ardi** dari tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah sebesar Rp. **2.728.202.000,00** ( dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah). Seharusnya, total dana yang dinikmati oleh Terdakwa Indra Gunawan. S.Sos, sendiri. Tidak bersama-sama dengan saksi Ardiyansyah Alias Ardi, karena pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada alinea berikutnya, halaman yang sama menyatakan sebagai berikut; "Majelis Hakim Tipikor sudah pantas dan patut Terdakwa **INDRA GUNAWAN S.Sos** dibebankan untuk membayar uang pengganti yakni sebesar Rp. 2.728.202.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah). Pertimbangan ini bahwa kerugian negara sebesar

Halaman 147 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT

PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.728.202.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah) dinikmati sendiri oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN S.Sos;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah sudah tepat dan benar serta beralasan sehingga disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri serta menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan yang telah diperbaiki di atas, maka pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 17Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg tanggal 5 Desember 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa:

### Hal-hal Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perbuatan tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan terdakwa secara tidak langsung telah ikut merugikan keuangan negara;\_

### Hal-Hal Yang Meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
5. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diatas, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut;

PBR

Halaman 148 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus tetap berada dalam tahanan negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang akan disebutkan pada amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **Mengadili**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PNTpg, tanggal 5 Desember 2018, sekedar mengenai jumlah uang pengganti menjadi sejumlah Rp. 2.745.227.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menguatkan selebihnya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg, tanggal 5 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal 4 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan, Mulyanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, K.A, Syukri, S.H.,M.H dan H. Yusdirman Yusuf, S.H., M.H Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 telah diucapkan dalam persidangan yang

*Halaman 149 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2019/PT*

PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusnidar, S.H Panitera pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

K.A. Syukri, S.H.,M.H

Mulyanto, S.H.,M.H

H. Yusdirman Yusuf, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

Yusnidar, S.H